



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BERAU

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN BERAU

TAHUN ANGGARAN 2024



TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 dapat terselesaikan dengan baik. Hal ini menjadi sebuah kewajiban bagi setiap Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan evaluasi secara menyeluruh terhadap berjalannya suatu Pemerintahan Daerah. Disamping itu, laporan ini disusun untuk memenuhi amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa Bupati / Walikota menyampaikan LPPD Kabupaten/Kota kepada Menteri melalui Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, dimana LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja pemerintah daerah yang terdiri atas capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (*Pencapaian Penerapan Standar pelayanan Minimal, Capaian Kinerja Makro, Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pilihan serta Capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah*) dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan.

Sebagai kewajiban dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka struktur, ruang lingkup dan substansi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 selain mengacu pada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, juga secara teknis disusun dengan berpedoman kepada Surat Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Nomor : 100.2.2.7/10582/OTDA Tanggal 24 Desember 2024 Perihal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024.

Akhirnya, perkenankan kami atas nama Pemerintah Kabupaten Berau



untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan aktif membangun Kabupaten Berau di berbagai sektor pembangunan, dengan produktivitas dan komitmen yang tinggi **Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Handal untuk Transformasi ekonomi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan** dan semoga Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 yang juga menyajikan Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun Anggaran 2024 mempunyai banyak manfaat serta dapat dijadikan landasan bagi pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

Tanjung Redeb, 24 Maret 2025



Hj. SRI JUNIARSIH MAS, M.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

INSPEKTORAT

Jalan SM. Aminuddin Nomor : 1012 Telepon (0554) 22438, Fax/Telepon (0554) 21573

TANJUNG REDEB

inspektorat.berau@gmail.com <http://inspektorat.beraukab.go.id>

KODE POS 77312

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Berau untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah Ini .

Tanjung Redeb, 21 Maret 2025


Inspektur,
Ir H Riza Fakhmi
Pembina Utama Muda
NIP. 19671001 199803 1 007



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.1.1. Penjelasan Umum	3
1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah.....	37
1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal	114
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	168
2.1. Capaian Kinerja Makro	168
2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	168
2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Outcome</i>).	169
2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.	181
2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.....	183
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	214
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	215
4.1. Urusan Pendidikan	215
4.2. Urusan Kesehatan	230
4.3. Urusan Pekerjaan Umum.....	262
4.4. Urusan Perumahan Rakyat	271
4.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	277
4.6. Urusan Sosial.....	292
BAB V PENUTUP	326



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 “ yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 “ tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) kepada masyarakat.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan progress report atas hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama satu tahun dan menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kegagalan dan keberhasilan pencapaian indikator kinerja kunci akan dijadikan sebagai acuan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Berau di tahun mendatang dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan.

Berdasarkan UUD 1945 pasal 5 ayat 2 yang berbunyi Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya. Sehingga perlu regulasi dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.

Sedangkan mengenai muatan LPPD menurut Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada pasal 4 dijelaskan bahwa sekurang-kurangnya menjelaskan: LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja



Pemerintah Daerah yang terdiri atas: a. capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan b. capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan.

Terbitnya Peraturan Pemerintah ini merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu adanya akuntabilitas, efektifitas, efisiensi, transparansi, partisipasi masyarakat (publik), penegakan hukum dalam setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Dalam rangka melaksanakan prinsip akuntabilitas, LPPD disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir dan melakukan evaluasi terhadap LPPD Kabupaten/Kota. Ringkasan hasil evaluasi disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 1 (satu) bulan setelah Gubernur menerima LPPD Kabupaten/Kota. Ringkasan hasil evaluasi LPPD Kabupaten/Kota dijadikan dasar untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Adapun yang menjadi dasar hukum pelaksanaan penyusunan LPPD Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan (resmi) Daerah Otonom Kabupaten/Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten dan Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Kalimantan.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan Sebagai Undang-Undang
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;



5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Berau Tahun 2006 – 2026;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah;

Kabupaten Berau adalah salah satu Kabupaten di Propinsi Kalimantan Timur yang pada awalnya merupakan daerah bentukan sementara atau dengan sebutan Swapraja yang diberikan hak-hak otonomi daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Nomor 186/OPBI/92/14 tanggal 14 Agustus 1950.



Daerah bentukan sementara Berau tersebut tidak memiliki landasan hukum secara yuridis yang menimbulkan kendala-kendala dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah otonom, sehubungan dengan perkembangan ketatanegaraan yang demokratis serta desakan-desakan dari masyarakat diseluruh daerah Propinsi Kalimantan yang telah menyelenggarakan persiapan pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dan Daerah Otonom yang setingkat dengan Kabupaten, sehingga Pemerintah Pusat segera menetapkan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan Daerah Otonom di Kalimantan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia.

Pemerintah Pusat membentuk secara resmi Kabupaten/Daerah Istimewa tingkat Kabupaten dan Kota Besar yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya melalui Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan (Resmi) Daerah Otonomi Kabupaten Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten dan Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Kalimantan, dengan pembagian Kalimantan wilayah timur menjadi 3 (tiga) Daerah Istimewa yang meliputi :

1. Daerah Istimewa Kutai yang terdiri dari Kawedanan Kutai Selatan, Kutai Timur, Kutai Tengah, Kutai Barat, Kutai Ulu dan Sendawan;
2. Daerah Istimewa Berau yang terdiri dari Kawedanan Gunung Tabur dan Sambeliung;
3. Daerah Istimewa Bulongan yang terdiri dari Bulongan, Tarakan Tanah Tidung dan Apok Kayan.

Adapun pembentukan 3 (tiga) Daerah Kutai, Berau dan Bulongan sebagai Daerah Istimewa dikarenakan ke 3 (tiga) Daerah tersebut memenuhi syarat-syarat yang tercantum di dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 yaitu bahwa Sultan Kutai



dan Sultan Bulongan sebagai Kepala Swapraja menguasai seluruh daerah di wilayah Swapraja Kutai dan Swapraja Bulongan yang sekarang dibentuk sebagai Daerah Istimewa, sedangkan Daerah Istimewa Berau dikarenakan ke 2 (dua) Swapraja Gunung Tabur dan Sambaliung menyetujui pembentukan sebagai 1 (satu) Daerah Istimewa.

Adapun pembentukan 3 (tiga) Daerah Kutai, Berau dan Bulongan sebagai Daerah Istimewa dikarenakan ke 3 (tiga) Daerah tersebut memenuhi syarat-syarat yang tercantum di dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 yaitu bahwa Sultan Kutai dan Sultan Bulongan sebagai Kepala Swapraja menguasai seluruh daerah di wilayah Swapraja Kutai dan Swapraja Bulongan yang sekarang dibentuk sebagai Daerah Istimewa, sedangkan Daerah Istimewa Berau dikarenakan ke 2 (dua) Swapraja Gunung Tabur dan Sambaliung menyetujui pembentukan sebagai 1 (satu) Daerah Istimewa.

Daerah Istimewa Berau dipimpin oleh Kepala Daerah Istimewa yang pertama kali dijabat oleh Sultan Muhammad Aminuddin dengan pusat Pemerintahan Daerah Istimewa Berau berkedudukan di Tanjung Redeb. Sultan Muhammad Aminuddin memerintah sampai dengan adanya peraturan peralihan dari Daerah Istimewa menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II Berau.

Selanjutnya Pemerintah Pusat menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan Sebagai Undang-Undang.



Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 menyebabkan Daerah Istimewa Berau berubah menjadi Daerah Tingkat II Berau dan termasuk dalam cakupan wilayah Propinsi Kalimantan Timur dari pembagian wilayah Propinsi Kalimantan. Daerah Tingkat II Berau dipimpin oleh Sultan Aji Raden Muhammad Ayub yang menjadi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Berau yang pertama dan menetapkan Kota Tanjung Redeb sebagai Pusat Pemerintahan Daerah Tingkat II Berau.

Pada tahun 1999 Daerah Tingkat II Berau berubah menjadi Kabupaten Berau dengan wilayah yang terbagi dalam 8 (delapan) Kecamatan yaitu Tanjung Redeb, Sambaliung, Gunung Tabur, Kelay, Segah, Pulau Derawan, Talisayan dan Biduk-Biduk namun kemudian terjadi penambahan Kecamatan Teluk Bayur yang merupakan gabungan sebagian wilayah Kecamatan Tanjung Redeb, Sambaliung dan Gunung Tabur.

Selanjutnya berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Tubaan dan Kecamatan Maratua dalam Daerah Kabupaten Berau yang diubah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Tabalar dan Kecamatan Maratua, serta berdasar Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Batu Putih dan Kecamatan Biatan yang menyebabkan terjadi penambahan Kecamatan yaitu Kecamatan Tabalar merupakan bagian dari Kecamatan Sambaliung dan Talisayan, Kecamatan Maratua yang merupakan bagian dari Kecamatan Pulau Derawan dan Kecamatan Batu Putih yang merupakan bagian dari Kecamatan Biduk-Biduk dan Kecamatan Talisayan serta Kecamatan Biatan yang merupakan bagian Kecamatan Tabalar. Sehingga sampai dengan saat ini wilayah Kabupaten Berau terbagi menjadi 13 (tiga belas) Kecamatan yang



terdiri dari wilayah Kecamatan Sekitar Kota, Kecamatan Pedalaman dan Kecamatan Pesisir.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Kabupaten Berau telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 sebagai pedoman perencanaan pembangunan tahun 2021-2026 yang implementasinya setiap tahun dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

b. Data Geografis Wilayah;

1. Batas Administrasi Daerah

Kabupaten Berau Merupakan salah satu Kabupaten di wilayah Propinsi Kalimantan Timur yang berada tidak jauh dari Garis Khatulistiwa. Kabupaten Berau terletak antara 116° Bujur Timur sampai dengan 119° Bujur Timur dan 1° Lintang Utara sampai dengan 2°33' Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Berau secara administrasi mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Utara
- b. Sebelah Timur dibatasi oleh laut Sulawesi
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Malinau Propinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Kutai Barat

2. Luas Wilayah

Kabupaten Berau memiliki luas wilayah ± 34.127,17 Km² yang terdiri dari daratan ±23.558,50 Km² dan lautan ±10.568,85 Km²



sepanjang 4 mil dari garis pantai pulau terluar. Luas wilayah Kabupaten Berau dirinci menurut Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Kelay seluas 6134,60 Km² atau sekitar 17,98% dari luas wilayah keseluruhan, dan yang paling kecil adalah Kecamatan Tanjung Redeb dengan luasan 23,76 Km² atau 0,07% dari luas wilayah secara keseluruhan. Adapun secara rinci Pembagian Luas Wilayah berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Berau dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1

Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Berau

NO	KECAMATAN	LUAS (Km ²)	PERSENTASE (%)
1	Kelay	6.134,60	17,98
2	Talisayan	1.798,00	5,27
3	Tabalar	2.373,45	6,95
4	Biduk Biduk	3.002,99	8,80
5	Pulau Derawan	3.858,96	11,31
6	Maratua	4.118,80	12,07
7	Sambaliung	2.403,86	7,04
8	Tanjung Redeb	23,76	0,07
9	Gunung Tabur	1.987,49	5,82
10	Segah	5.166,40	15,14
11	Teluk Bayur	175,40	0,51
12	Batu Putih	1.651,42	4,84
13	Biatan	1.432,04	4,20
JUMLAH		34.127,17	100,00

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Berau

Sedangkan dirinci menurut jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten, Kecamatan yang paling jauh adalah Kecamatan Biduk-Biduk sejauh 254 Km dari Ibukota Kabupaten dan yang paling dekat adalah Kecamatan Sambaliung dengan



jarak 2 Km dari Ibukota Kabupaten. Adapun secara rinci jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.2

Jarak Dari Ibukota Kecamatan Ke Ibukota Kabupaten

NO	KECAMATAN	IBUKOTA	JARAK (Km)
1	Kelay	Sido Bangen	125
2	Talisayan	Talisayan	150
3	Tabalar	Tubaan	91
4	Biduk Biduk	Biduk-Biduk	254
5	Pulau Derawan	Tanjung Batu	112
6	Maratua	Maratua Teluk Harapan	152
7	Sambaliung	Sambaliung	2
8	Tanjung Redeb	Tanjung Redeb	2
9	Gunung Tabur	Gunung Tabur	11,6
10	Segah	Tepian Buah	86
11	Teluk Bayur	Teluk Bayur	10
12	Batu Putih	Batu Putih	200
13	Biatan	Biatan Lempake	120

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Berau

3. Topografis

Kabupaten Berau memiliki kondisi topografi wilayah yang cukup bervariasi. Topografi secara umum dapat digambarkan melalui bentuk relief, kemiringan lereng dan ketinggian dari permukaan laut. Topografi wilayah daratan Kabupaten Berau banyak berbentuk gugusan bukit yang terdapat hampir diseluruh Kecamatan, terutama Kecamatan Kelay yang membentang perbukitan Batu Kapur yang memiliki panjang hampir mencapai 100 Km. Dengan kondisi topografi seperti itu, maka Kabupaten Berau memiliki potensi sumber daya alam yang cukup kaya



seperti batu bara, batu kapur, kayu hutan, rotan, dan hasil hutan lainnya.

Kabupaten Berau memiliki 21 sungai besar yang merupakan sumber vital bagi penduduk dan ekosistem sekitarnya. Sungai Kelay merupakan sungai terpanjang di Kabupaten Berau. Mengalir dari pegunungan sekitar Gunung Mantan sepanjang 254 Km sampai pada pertemuan dengan Sungai Segah membentuk Sungai Berau di Tanjung Redeb. Sungai Segah sendiri panjangnya sekitar 152 Km dimana Hulu sungai berada di sekitar Gunung Kundas. Sedangkan Sungai Tanian Buku di Kecamatan Talisayan merupakan Sungai yang terpendek dengan panjang 12 Km.

Adapun Nama dan Panjang Sungai Menurut Kecamatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.3

Nama Dan Panjang Sungai Menurut Kecamatan

NO	KECAMATAN	SUNGAI	PANJANG (KM)
1	Kelay	Kelay	254
		Long Gie	49
		Lesan	64
		Tawon	59
2	Talisayan	Sulaiman	23
		Dumaring	49
		Tanian Buku	12
		Lumbungan	18
3	Tabalar	Tabalar	49
4	Sambaliung	Suaran	19
		Inaran	22
		Bental	58
5	Gunung Tabur	Berau	292
		Lati	43



NO	KECAMATAN	SUNGAI	PANJANG (KM)
		Birang	58
		Sambarata	39
6	Segah	Segah	152
		Malinau	58
		Pura	72
		Siagung	38
		Siduung	83

Sumber : BPS Kabupate Berau

4. Iklim

Seperti iklim wilayah Indonesia pada umumnya, Kabupaten Berau memiliki Iklim Tropis dan mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Mei sampai dengan bulan Oktober. Sedangkan musim Penghujan terjadi pada bulan November sampai dengan bulan april.

Keadaan ini terus berlangsung setiap tahun yang diselengi peralihan pada bulan-bulan tertentu. Selain itu, karena letaknya di daerah khatulistiwa, maka iklim di Kabupaten Berau juga dipengaruhi oleh angin Muson Barat pada Nopember - April dan Angin Muson Timur pada Mei – Oktober.

Namun dalam tahun-tahun terakhir ini, keadaan musim di Kabupaten Berau kadang tidak menentu. Pada bulan-bulan yang seharusnya turun hujan dalam kenyataannya tidak ada hujan sama sekali, atau sebaliknya pada bulan-bulan yang seharusnya kemarau justru terjadi hujan dengan waktu yang jauh lebih panjang.



c. Jumlah Penduduk;

1. Jumlah Penduduk

Perkembangan penduduk merupakan salah satu dari karakteristik demografi yaitu dari proses kelahiran, kematian, datang dan pindah (migrasi) penduduk yang disebut mutasi penduduk. Menurut data kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau tentang mutasi penduduk di Kabupaten Berau perkembangan penduduk yang terbanyak berasal dari penduduk yang datang (migrasi) dan penduduk yang lahir. Per tanggal 31 Desember 2024 jumlah penduduk Kabupaten Berau mencapai angka **299.005 Jiwa** dan Jumlah Kepala Keluarga sebanyak **103.888 KK**.

Kecamatan Tanjung Redeb merupakan Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar dengan jumlah penduduk sebesar 78.230 jiwa, dimana hal ini dapat dimaklumi mengingat Kecamatan Tanjung Redeb merupakan ibukota dari Kabupaten Berau dengan pusat pemerintahan dan perekonomian yang berada di Kecamatan ini sedangkan Kecamatan Maratua merupakan Kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil dengan jumlah penduduk sebesar 4.035 jiwa, dimana hal ini dapat dimaklumi mengingat Kecamatan Maratua tergolong Kecamatan Sangat Terpencil yang hanya dapat ditempuh dengan menggunakan jalur laut dan udara.

Adapun Jumlah Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Berau dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.4

Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KK
1	Kelay	8.122	2.826



NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KK
2	Talisayan	18.316	6.129
3	Sambaliung	47.473	16.899
4	Segah	19.866	7.474
5	Tanjung Redeb	78.230	26.742
6	Gunung Tabur	33.512	11.924
7	Pulau Derawan	15.197	5.301
8	Biduk Biduk	8.140	2.495
9	Teluk Bayur	37.232	13.254
10	Tabalar	8.470	2.856
11	Maratua	4.035	1.223
12	Batu Putih	10.310	3.394
13	Biatan	10.102	3.371
JUMLAH		299.005	103.888

Sumber Data: sumber : Disdukcapil, DKB Semester II Tahun 2024

2. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Karakteristik penduduk Kabupaten Berau menurut jenis kelamin dapat dilihat dari angka rasio jenis kelamin (*sex ratio*) yang merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin menunjukkan banyaknya penduduk laki-laki diantara seratus penduduk perempuan. Jika dilihat perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, Kabupaten Berau memiliki penduduk laki-laki yang lebih banyak dibanding penduduk perempuan. Hal tersebut juga terjadi di setiap Kecamatan di Kabupaten Berau dimana angka rasio jenis kelamin mencapai lebih dari 100. Rasio jenis kelamin Kabupaten Berau pada tahun 2024 adalah sebesar 113 yang berarti terdapat 113 orang laki-laki diantara 100 orang perempuan. Kecamatan yang memiliki rasio jenis kelamin terbesar adalah Kecamatan Segah yang mencapai 125, sedangkan Kecamatan Maratua dan Kecamatan



Biduk-Biduk memiliki jumlah rasio jenis kelamin yang relatif paling kecil jika dibandingkan dengan Kecamatan lainnya yaitu sebesar 103.

Adapun Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Berau dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.5
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

NO	KECAMATAN	LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PENDUDUK	SEX RATIO
1	Kelay	4.405	3.717	8.122	119
2	Talisayan	9.610	8.706	18.316	110
3	Sambaliung	25.456	22.017	47.473	116
4	Segah	11.041	8.825	19.866	125
5	Tanjung Redeb	40.903	37.327	78.230	110
6	Gunung Tabur	18.172	15.340	33.512	118
7	Pulau Derawan	8.105	7.092	15.197	114
8	Biduk Biduk	4.139	4.001	8.140	103
9	Teluk Bayur	19.811	17.421	37.232	114
10	Tabalar	4.460	4.010	8.470	111
11	Maratua	2.065	1.970	4.035	105
12	Batu Putih	5.426	4.884	10.310	111
13	Biatan	5.334	4.768	10.102	112
	JUMLAH	158.927	140.078	299.005	113

Sumber Data: Disdukcapil, DKB Semester II Tahun 2024

3. Komposisi Jumlah Penduduk Menurut Struktur Usia

Adapun Komposisi Jumlah Penduduk menurut Struktur Usia berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Berau dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



Tabel 1.6
Jumlah Penduduk Penurut Struktur Usia Tahun 2024

NO	KECAMATAN	1	2	3	4	5	6	7
1	Kelay	110	120	114	140	155	167	131
2	Talisayan	261	293	327	353	416	403	365
3	Sambaliung	758	793	847	981	1007	923	931
4	Segah	289	325	364	368	375	364	382
5	Tanjung Redeb	1126	1145	1376	1442	1506	1471	1478
6	Gunung Tabur	578	575	684	693	718	640	709
7	Pulau Derawan	204	211	293	298	295	280	354
8	Biduk Biduk	147	155	150	162	183	155	159
9	Teluk Bayur	619	592	692	757	744	761	725
10	Tabalar	101	128	136	186	152	191	178
11	Maratua	49	71	59	66	76	64	64
12	Batu Putih	145	180	199	209	230	204	219
13	Biatan	145	182	176	213	206	221	192
JUMLAH		4532	4770	5417	5868	6063	5844	5887



NO	KECAMATAN	8	9	10	11	12	13	14
1	Kelay	163	160	166	168	166	171	162
2	Talisayan	366	386	396	361	364	353	357
3	Sambaliung	928	913	960	868	894	902	893
4	Segah	414	413	456	376	380	325	356
5	Tanjung Redeb	1497	1576	1545	1485	1584	1529	1570
6	Gunung Tabur	634	701	727	667	710	612	609
7	Pulau Derawan	322	316	310	352	357	327	313
8	Biduk Biduk	165	181	187	152	165	180	143
9	Teluk Bayur	715	733	734	740	667	690	708
10	Tabalar	179	163	169	172	172	165	173
11	Maratua	75	92	80	82	85	84	75
12	Batu Putih	233	214	211	216	258	216	203
13	Biatan	198	204	225	228	229	181	200
JUMLAH		5889	6052	6166	5867	6031	5735	5762



NO	KECAMATAN	15	16	17	18	19	20	21
1	Kelay	168	165	83	129	127	146	167
2	Talisayan	351	368	204	274	292	312	317
3	Sambaliung	888	804	587	762	840	935	1037
4	Segah	349	340	157	264	335	400	447
5	Tanjung Redeb	1543	1478	1095	1302	1432	1429	1578
6	Gunung Tabur	611	593	368	482	587	655	730
7	Pulau Derawan	270	306	177	224	288	316	354
8	Biduk Biduk	153	191	136	133	162	153	172
9	Teluk Bayur	672	640	436	559	669	722	725
10	Tabalar	170	162	104	138	158	172	170
11	Maratua	95	79	71	51	92	95	103
12	Batu Putih	188	207	139	161	168	197	217
13	Biatan	190	175	97	155	198	193	174
JUMLAH		5648	5508	3654	4634	5348	5725	6191



NO	KECAMATAN	22	23	24	25	26	27	28
1	Kelay	135	134	158	144	115	126	116
2	Talisayan	299	290	325	336	279	294	312
3	Sambaliung	984	993	999	989	940	881	855
4	Segah	428	389	453	416	360	372	393
5	Tanjung Redeb	1451	1443	1538	1505	1367	1283	1363
6	Gunung Tabur	691	657	771	665	653	678	585
7	Pulau Derawan	299	257	287	266	252	199	216
8	Biduk Biduk	148	154	129	133	113	101	110
9	Teluk Bayur	760	738	768	783	642	658	673
10	Tabalar	173	143	153	165	113	144	133
11	Maratua	87	74	67	59	53	54	58
12	Batu Putih	176	212	177	169	173	152	151
13	Biatan	159	177	189	187	156	163	163
JUMLAH		5790	5661	6014	5817	5216	5105	5128



NO	KECAMATAN	29	30	31	32	33	34	35
1	Kelay	134	131	137	150	123	119	138
2	Talisayan	297	330	325	352	282	307	287
3	Sambaliung	820	831	771	826	748	747	697
4	Segah	387	347	400	384	353	367	347
5	Tanjung Redeb	1308	1303	1260	1280	1156	1180	1154
6	Gunung Tabur	601	585	590	571	539	525	508
7	Pulau Derawan	219	218	244	243	216	217	225
8	Biduk Biduk	129	135	113	127	126	124	100
9	Teluk Bayur	656	644	619	657	576	594	573
10	Tabalar	126	128	124	131	121	137	116
11	Maratua	61	53	60	59	64	57	59
12	Batu Putih	146	168	160	151	131	160	145
13	Biatan	155	168	172	175	124	164	158
JUMLAH		5039	5041	4975	5106	4559	4698	4507



NO	KECAMATAN	36	37	38	39	40	41	42
1	Kelay	133	133	138	138	129	118	150
2	Talisayan	291	318	294	297	290	280	332
3	Sambaliung	797	740	643	752	739	696	786
4	Segah	356	343	327	339	332	319	346
5	Tanjung Redeb	1262	1177	1184	1238	1185	1227	1335
6	Gunung Tabur	511	540	499	494	487	483	572
7	Pulau Derawan	221	261	232	240	229	233	266
8	Biduk Biduk	105	120	107	131	115	116	171
9	Teluk Bayur	628	586	588	601	562	582	649
10	Tabalar	123	131	88	158	114	121	150
11	Maratua	72	79	62	65	79	47	71
12	Batu Putih	143	156	161	191	146	164	197
13	Biatan	137	152	178	149	182	127	193
JUMLAH		4779	4736	4501	4793	4589	4513	5218



NO	KECAMATAN	43	44	45	46	47	48	49
1	Kelay	102	130	132	125	137	118	122
2	Talisayan	212	281	262	233	235	222	233
3	Sambaliung	590	736	670	570	566	560	672
4	Segah	234	333	279	239	265	220	244
5	Tanjung Redeb	1144	1294	1184	1077	1176	1062	1069
6	Gunung Tabur	429	519	504	476	417	366	391
7	Pulau Derawan	209	288	246	217	217	195	234
8	Biduk Biduk	101	135	122	101	101	90	95
9	Teluk Bayur	535	600	540	523	520	437	494
10	Tabalar	92	138	103	104	117	95	138
11	Maratua	42	76	50	51	41	51	38
12	Batu Putih	125	156	162	151	151	118	156
13	Biatan	115	169	129	113	120	99	136
JUMLAH		3930	4855	4383	3980	4063	3633	4022



NO	KECAMATAN	50	51	52	53	54	55	56
1	Kelay	108	104	92	71	99	88	84
2	Talisayan	180	218	214	164	206	194	181
3	Sambaliung	549	545	527	386	531	461	423
4	Segah	208	241	231	166	192	171	146
5	Tanjung Redeb	917	870	938	723	871	769	729
6	Gunung Tabur	358	393	385	261	352	312	271
7	Pulau Derawan	173	178	188	111	190	137	115
8	Biduk Biduk	94	84	74	59	68	86	81
9	Teluk Bayur	397	410	409	308	368	363	289
10	Tabalar	91	104	98	69	115	105	81
11	Maratua	41	34	36	35	42	36	43
12	Batu Putih	120	129	137	84	117	80	74
13	Biatan	94	146	139	96	151	109	95
JUMLAH		3330	3456	3468	2533	3302	2911	2612



NO	KECAMATAN	57	58	59	60	61	62	63
1	Kelay	73	50	68	46	42	47	30
2	Talisayan	157	113	146	110	111	96	61
3	Sambaliung	320	264	351	246	209	235	165
4	Segah	139	88	132	128	85	85	57
5	Tanjung Redeb	547	535	611	488	449	402	287
6	Gunung Tabur	181	179	216	153	165	146	99
7	Pulau Derawan	120	83	110	89	78	73	54
8	Biduk Biduk	72	54	62	43	48	47	30
9	Teluk Bayur	249	215	285	196	189	180	124
10	Tabalar	75	56	94	44	49	34	38
11	Maratua	29	25	46	30	34	22	16
12	Batu Putih	87	53	87	65	55	55	36
13	Biatan	78	59	90	65	59	48	26
JUMLAH		2127	1774	2298	1703	1573	1470	1023



NO	KECAMATAN	64	65	66	67	68	69	70
1	Kelay	46	23	28	26	19	25	18
2	Talisayan	108	86	87	73	51	58	51
3	Sambaliung	268	159	163	144	88	114	102
4	Segah	91	56	51	34	40	40	25
5	Tanjung Redeb	375	317	256	237	210	239	160
6	Gunung Tabur	160	104	96	82	73	66	68
7	Pulau Derawan	80	48	50	51	29	41	41
8	Biduk Biduk	62	40	35	25	30	34	21
9	Teluk Bayur	167	117	123	97	90	105	90
10	Tabalar	58	27	32	27	24	49	27
11	Maratua	23	15	37	18	14	9	12
12	Batu Putih	66	42	33	45	27	27	20
13	Biatan	66	39	32	30	22	40	31
JUMLAH		1570	1073	1023	889	717	847	666

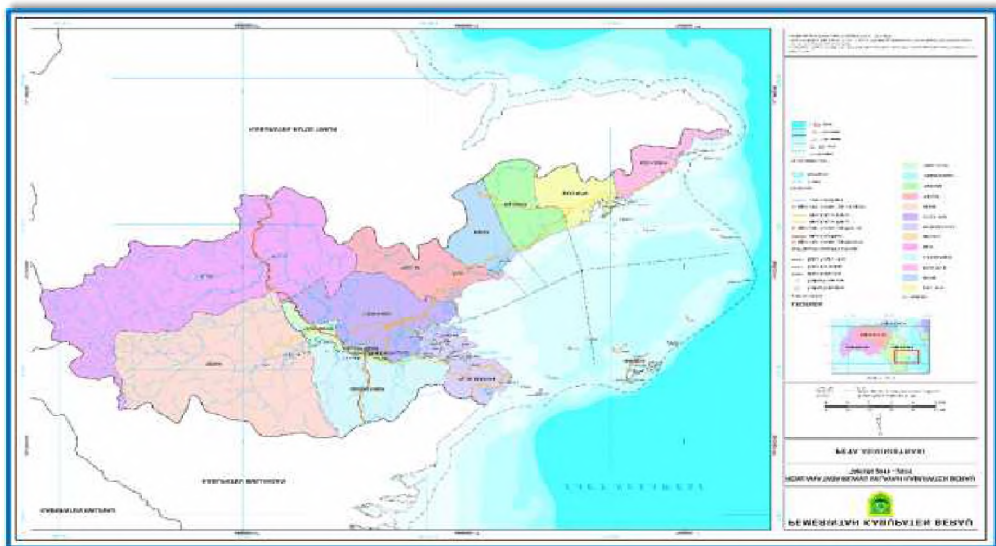


d. Jumlah Kecamatan Dan Desa/Kelurahan

Pembagian Wilayah Administrasi Kecamatan, Kelurahan dan Kampung di Kabupaten Berau dapat dilihat pada Peta Wilayah Kabupaten Berau gambar berikut:

Gambar 1.1

Peta Wilayah Kabupaten Berau



Sumber : Bappeda, 2016

Kabupaten Berau terdiri dari Kecamatan sebanyak 13 (tiga belas) Kecamatan ,10 (sepuluh) Kelurahan dan (seratus) 100 Kampung. Jumlah dan Nama Kecamatan, Kelurahan dan Kampung di Kabupaten Berau dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.7

Jumlah Dan Nama Kecamatan, Kelurahan Dan Kampung Di Kabupaten Berau

KODE	NAMA WILAYAH ADMINISTRASI		
	KECAMATAN	KELURAHAN	KAMPUNG
64,03	13	10	100
64.03.01	1 Kelay	-	14
64.03.01.2001			1 Merabu



KODE	NAMA WILAYAH ADMINISTRASI		
	KECAMATAN	KELURAHAN	KAMPUNG
64.03.01.2002			2 Panaan
64.03.01.2003			3 Merapun
64.03.01.2004			4 Muara Lesan
64.03.01.2005			5 Merasa
64.03.01.2006			6 Lesan Dayak
64.03.01.2007			7 Long Beliu
64.03.01.2008			8 Long Duhung
64.03.01.2009			9 Long Lamcin
64.03.01.2010			10 Long Keluh
64.03.01.2011			11 Long Pelay
64.03.01.2012			12 Mapulu
64.03.01.2013			13 Long Sului
64.03.01.2014			14 Sido Bangen
64.03.02	2 Talisayan	-	10
64.03.02.2002			1 Dumaring
64.03.02.2003			2 Talisayan
64.03.02.2014			3 Campur Sari
64.03.02.2015			4 Bumi Jaya
64.03.02.2016			5 Tunggal Bumi
64.03.02.2017			6 Sumber Mulya
64.03.02.2018			7 Suka Murya
64.03.02.2019			8 Purna Sari Jaya
64.03.02.2022			9 Eka Sapta
64.03.02.2023			10. Capuak
64.03.03	3 Sambaliung	1	13
64.03.03.2001			1 Long Lanuk
64.03.03.2002			2 Tumbit Dayak
64.03.03.2004			3 Inaran
64.03.03.2005			4 Pegat Bukur
64.03.03.2006			5 Rantau Panjang
64.03.03.2007			6 Suaran
64.03.03.2008			7 Pijanau



KODE	NAMA WILAYAH ADMINISTRASI		
	KECAMATAN	KELURAHAN	KAMPUNG
64.03.03.2009			8 Pesayan
64.03.03.2010			9 Sei Bebanir Bangun
64.03.03.2011			10 Gurimbang
64.03.03.2012			11 Sukan Tengah
64.03.03.1013		1 Sambaliung	
64.03.03.2014			12 Tanjung Perangat
64.03.03.2015			13 Bena Baru
64.03.04	4 Segah	-	13
64.03.04.2001			1 Long La'ai
64.03.04.2002			2 Punah Segah
64.03.04.2003			3 Long Ayap
64.03.04.2004			4 Long Ayan
64.03.04.2005			5 Punan Malinau
64.03.04.2006			6 Punan Mahkam
64.03.04.2007			7 Gunung Sari
64.03.04.2008			8 Pandan Sari
64.03.04.2009			9 Bukit Makmur
64.03.04.2010			10 Harapan Jaya
64.03.04.2011			11 Tepian Buah
64.03.04.2012			12. Batu Rajang
64.03.04.2013			13. Siduung Indah
64.03.05	5 Tanjung Redeb	6	-
64.03.05.1003		1 Sungai Bedungun	
64.03.05.1004		2 Tanjung Redeb	
64.03.05.1005		3 Bugis	
64.03.05.1006		4 Gayam	
64.03.05.1007		5 Karang Ambun	
64.03.05.1008		6 Gunung Panjang	
64.03.06	6 Gunung Tabur	1	10
64.03.06.2001			1 Tasuk
64.03.06.2002			2 Birang
64.03.06.1003		1 Gunung Tabur	



KODE	NAMA WILAYAH ADMINISTRASI		
	KECAMATAN	KELURAHAN	KAMPUNG
64.03.06.2004			3 Maluang
64.03.06.2005			4 Samburakat
64.03.06.2006			5 Sambakungan
64.03.06.2007			6 Merancang Ulu
64.03.06.2008			7 Merancang Ilir
64.03.06.2009			8 Pulau Besing
64.03.06.2010			9 Melati Jaya
64.03.06.2011			10 Batu-Batu
64.03.07	7 Pulau Derawan	-	5
64.03.07.2001			1 Pegat Batumbuk
64.03.07.2002			2 Teluk Semanting
64.03.07.2003			3 Tanjung Batu
64.03.07.2004			4 Pulau Derawan
64.03.07.2009			5 Kasai
64.03.08	8 Biduk-Biduk	-	6
64.03.08.2001			1 Biduk-Biduk
64.03.08.2002			2 Pantai Harapan
64.03.08.2003			3 Tanjung Prepat
64.03.08.2004			4 Teluk Sumbang
64.03.08.2008			5 Teluk Sulaiman
64.03.08.2009			6 Giring-Giring
64.03.09	9 Teluk Bayur	2	4
64.03.09.2001			1 Tumbit Melayu
64.03.09.1002		1 Teluk Bayur	
64.03.09.1003		2 Rinding	
64.03.09.2004			2 Labanan Jaya
64.03.09.2005			3 Labanan Makmur
64.03.09.2006			4 Labanan Makarti
64.03.10	10 Tabalar	-	6
64.03.10.2002			1 Tabalar Muara
64.03.10.2003			2 Tubaan
64.03.10.2004			3 Tabalar Ulu



KODE	NAMA WILAYAH ADMINISTRASI		
	KECAMATAN	KELURAHAN	KAMPUNG
64.03.10.2005			4 Semurut
64.03.10.2006			5 Buyung-Buyung
64.03.10.2007			6 Harapan Maju
64.03.11	11 Maratua	-	4
64.03.11.2001			1 Ma. Bohe Silian
64.03.11.2002			2 Ma. Payung-Payung
64.03.11.2003			3 Ma. Teluk Alulu
64.03.11.2004			4 Ma. Teluk Harapan
64.03.12	12 Batu Putih	-	7
64.03.12.2001			1 Tembudan
64.03.12.2002			2 Kayu Indah
64.03.12.2003			3 Batu Putih
64.03.12.2004			4 Lobang Kelatak
64.03.12.2005			5 Ampen Medang
64.03.12.2006			6 Balikukup
64.03.12.2007			7 Sumber Agung
64.03.13	13 Biatan	-	8
64.03.13.2001			1 Biatan Ulu
64.03.13.2002			2 Biatan Ilir
64.03.13.2003			3 Karang
64.03.13.2004			4 Biatan Lempake
64.03.13.2005			5 Manunggal Jaya
64.03.13.2006			6 Biatan Bapinang
64.03.13.2007			7 Biatan Baru
64.03.13.2008			8 Bukit Makmur Jaya

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Berau, 2023

e. Rincian Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah Serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah;

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 7 Tahun



2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
Perangkat Daeah di Kabupaten Berau Berjumlah 45 Perangkat
Daerah

Adapun Nama dan Jumlah Perangkat Daerah serta jumlah Pegawai
Pemerintahnya, dapat dilihat pada table berikut:

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	Dasar Hukum	
		PERDA PEMBENTUKAN	PERBUP SOTK
1	Sekretariat Daerah	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 48 Tahun 2023
2	Sekretariat Dprd	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 40 Tahun 2022
3	Inspektorat	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 19 Tahun 2023
4	Dinas Pendidikan	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 20 Tahun 2023
5	Dinas Kesehatan	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 15 Tahun 2023
6	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 39 Tahun 2023
7	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 18 Tahun 2023
8	Satuan Polisi Pamong Praja	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 54 Tahun 2016
9	Dinas Sosial	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 21 Tahun 2023
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 40 Tahun 2023
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 41 Tahun 2023
12	Dinas Pangan	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 27 Tahun 2023
13	Dinas Pertanahan	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 16 Tahun 2023
14	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 24 Tahun 2023
15	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 43 Tahun 2023
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 46 Tahun 2023
17	Dinas Perhubungan	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 22 Tahun 2023
18	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 42 Tahun 2023
19	Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 38 Tahun 2023
20	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 12 Tahun 2023
21	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 13 Tahun 2024
22	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 50 Tahun 2023
23	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 25 Tahun 2023
24	Dinas Perikanan	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 23 Tahun 2023
25	Dinastanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan	Perda No 2 Tahun 2023	Perbup No 45 Tahun 2023
26	Dinas Perkebunan	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 28 Tahun 2023



NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	Dasar Hukum	
		PERDA PEMBENTUKAN	PERBUP SOTK
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm	Perda No 2 Tahun 2023	Perbup No 17 Tahun 2023
28	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 47 Tahun 2023
29	Badan Pendapatan Daerah	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 49 Tahun 2023
30	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 51 Tahun 2023
31	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 25 Tahun 2023
32	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 44 Tahun 2023
33	Kecamatan Batu Putih	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 80 Tahun 2016
34	Kecamatan Biatan	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 80 Tahun 2016
35	Kecamatan Biduk-Biduk	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 80 Tahun 2016
36	Kecamatan Gunung Tabur	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 80 Tahun 2016
37	Kecamatan Kelay	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 80 Tahun 2016
38	Kecamatan Maratua	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 80 Tahun 2016
39	Kecamatan Pulau Derawan	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 80 Tahun 2016
40	Kecamatan Sambaliung	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 80 Tahun 2016
41	Kecamatan Segah	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 80 Tahun 2016
42	Kecamatan Tabalar	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 80 Tahun 2016
43	Kecamatan Talisayan	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 80 Tahun 2016
44	Kecamatan Tanjung Redeb	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 80 Tahun 2016
45	Kecamatan Teluk Bayur	Perda No 7 Tahun 2016	Perbup No 80 Tahun 2016

Sumber : Bagian Organisasi

f. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah Dan Pegawai Pemerintah;

Sampai dengan 31 Desember 2024, jumlah aparatur Sipil Negara sebanyak 6.254 Orang yang terdiri dari 4.546 PNS dan 1.708 PPPK. Sebaran ASN Kabupaten Berau Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:



Tabel 1.8

Nama Perangkat Daerah Kabupaten Berau Per 31 Desember 2024

No	Nama Perangkat Daerah	Rincian Asn			Total
		Struktural	Fungsional	Pelaksana	
1	Sekretariat Daerah	18	36	91	145
2	Sekretariat DPRD	5	9	42	56
3	Inspektorat	7	31	18	56
4	Dinas Pendidikan	15	2.471	242	2.728
5	Dinas Kesehatan	46	905	109	1.060
	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Rivai	14	473	94	581
6	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	19	26	64	109
7	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	6	17	19	42
8	Satuan Polisi Pamong Praja	16	-	30	46
9	Dinas Sosial	8	8	12	28
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	8	9	12	29
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	11	10	11	32
12	Dinas Pangan	7	11	14	32
13	Dinas Pertanahan	5	5	10	20
14	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	16	13	40	69
15	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	7	12	14	33
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	7	9	19	35
17	Dinas Perhubungan	22	1	70	93
18	Dinas Komunikasi Dan Informatika	6	14	18	38
19	Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan	10	15	34	59
20	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3	10	18	31
21	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	6	9	23	38
22	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	8	11	20	39
23	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	5	14	22	41
24	Dinas Perikanan	8	10	22	40
25	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan	25	67	32	124
26	Dinas Perkebunan	10	11	23	44
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7	13	25	45
28	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	15	8	42	65



No	Nama Perangkat Daerah	Rincian Asn			Total
		Struktura l	Fungsiona l	Pelaksana a	
29	Badan Pendapatan Daerah	14	5	26	45
30	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	9	15	18	42
31	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	6	8	16	30
32	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4	8	31	43
33	Kecamatan Batu Putih	9	-	6	15
34	Kecamatan Biatan	7	-	5	12
35	Kecamatan Biduk-Biduk	9	-	13	22
36	Kecamatan Gunung Tabur	9	-	18	27
	Kelurahan Gunung Tabur	4	-	5	9
37	Kecamatan Kelay	9	-	5	14
38	Kecamatan Maratua	9	-	11	20
39	Kecamatan Pulau Derawan	9	-	7	16
40	Kecamatan Sambaliung	10	-	16	26
	Kelurahan Sambaliung	5	-	5	10
41	Kecamatan Segah	9	-	9	18
42	Kecamatan Tabalar	9	-	8	17
43	Kecamatan Talisayan	9	-	13	22
44	Kecamatan Tanjung Redeb	9	-	12	21
	Kelurahan Tanjung Redeb	5	-	1	6
	Kelurahan Gunung Panjang	5	-	5	10
	Kelurahan Gayam	5	-	3	8
	Kelurahan Karang Ambun	5	-	3	8
	Kelurahan Bugis	4	-	5	9
	Kelurahan Bedungun	3	-	2	5
45	Kecamatan Teluk Bayur	10	-	10	20
	Kelurahan Teluk Bayur	3	-	6	9
	Kelurahan Rinding	5	-	7	12
Total		534	4.264	1.456	6.254

Sumber : BKPSDM Kab. Berau



g. Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Tabel 1.9

Target dan realisasi Pendapatan dan Belanja Kabupaten Berau pada Tahun 2024 dapat di lihat pada tabel sebagai berikut:

Kode Rekening	URAIAN	REFP CALK	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	2	3	4	5	6=(5/4)*100	7
4	PENDAPATAN	5.1.1	6.107.982.827.838,00	6.194.026.383.086,08	101,41	4.700.904.175.374,78
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.1	303.864.396.033,00	343.480.236.165,39	113,04	286.669.630.661,78
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	93.558.789.845,00	91.558.760.332,00	97,86	93.382.456.473,00
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	110.642.378.350,00	18.110.450.696,00	16,37	14.933.984.444,00
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	19.600.000.000,00	17.957.639.584,26	91,62	16.119.182.280,09
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.4	80.063.227.838,00	215.853.385.553,13	269,60	162.234.007.464,69
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		303.864.396.033,00	343.480.236.165,39	113,04	286.669.630.661,78
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	5.774.413.283.269,00	5.774.506.770.500,00	100,00	4.406.411.710.669,00
4.2.01.01	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	5.1.1.2.1	4.813.515.450.269,00	4.847.083.601.192,00	100,70	3.579.099.939.714,00
4.2.01.01.01	Dana Bagi Hasil	5.1.1.2.1.1	4.005.399.285.269,00	4.053.383.565.000,00	101,20	2.846.123.582.480,00
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1.2	589.047.874.000,00	588.991.002.328,00	99,99	565.773.403.521,00
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.1.1.2.1.3	82.281.122.000,00	80.364.880.846,00	97,67	52.763.540.954,00
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	5.1.1.2.1.4	136.787.169.000,00	124.344.153.018,00	90,90	114.439.412.759,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		4.813.515.450.269,00	4.847.083.601.192,00	100,70	3.579.099.939.714,00
	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	5.1.1.2.2	109.441.195.000,00	112.337.773.000,00	102,65	93.677.389.000,00
4.2.01.02	Dana Desa	5.1.1.2.2.1	95.468.642.000,00	95.468.642.000,00	0,00	93.677.389.000,00
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus	5.1.1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.04	Dana Keistimewaan	5.1.1.2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.05	Insentif Fiskal	5.1.1.2.2.4	13.972.553.000,00	16.869.131.000,00	100,00	0,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya		109.441.195.000,00	112.337.773.000,00	102,65	93.677.389.000,00
4.2.02	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	5.1.1.2.3	851.456.638.000,00	815.085.396.308,00	95,73	733.634.381.955,00



Kode Rekening	URAIAN	REF KALK	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	2	3	4	5	6=(5/4)*100	7
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.3.1	495.496.638.000,00	459.125.396.308,00	92,66	509.121.881.955,00
4.2.02.02	Bantuan keuangan	5.1.1.2.3.2	355.960.000.000,00	355.960.000.000,00	100,00	224.512.500.000,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		851.456.638.000,00	815.085.396.308,00	95,73	733.634.381.955,00
	Total Pendapatan Transfer LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		5.774.413.283.269,00	5.774.506.770.500,00	100,00	4.406.411.710.669,00
4.3		5.1.1.3	29.705.148.536,00	76.039.376.420,69	255,98	7.822.834.044,00
4.3.01	Pendapatan Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.02	Pendapatan Dana Darurat		0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.03	Pendapatan Lainnya		29.705.148.536,00	76.039.376.420,69	255,98	7.822.834.044,00
	Jumlah Lain - Lain Pendapatan daerah yang sah		29.705.148.536,00	76.039.376.420,69	255,98	7.822.834.044,00
	JUMLAH PENDAPATAN		6.107.982.827.838,00	6.194.026.383.086,08	101,41	4.700.904.175.374,78
5	BELANJA	5.1.2	6.999.194.000.000,00	6.411.806.512.153,84	91,61	4.608.120.868.464,26
5.1	BELANJA OPERASI	5.1.2.1	2.406.630.766.545,02	2.111.530.856.755,59	87,74	1.818.795.262.619,26
5.1.01	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	1.152.667.557.073,60	1.038.160.066.708,34	90,07	812.677.295.576,65
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	1.028.744.361.989,42	868.596.837.598,25	84,43	834.570.312.408,61
5.1.03	Belanja Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.04	Belanja Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	5.1.2.1.3	209.963.847.482,00	189.599.952.449,00	90,30	163.011.244.933,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.4	15.255.000.000,00	15.174.000.000,00	99,47	8.536.409.701,00
	Jumlah Belanja operasi		2.406.630.766.545,02	2.111.530.856.755,59	87,74	1.818.795.262.619,26
5.2	BELANJA MODAL	5.1.2.2	4.103.994.263.579,98	3.828.798.419.151,25	93,29	2.345.617.541.442,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	16.566.742.200,00	1.352.415.463,00	8,16	7.825.488.693,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	279.149.073.890,00	261.092.131.764,29	93,53	172.966.458.500,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	580.117.759.021,98	472.715.286.591,51	81,49	307.876.754.279,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.1.2.2.4	3.215.293.974.101,00	3.081.747.295.756,45	95,85	1.848.412.488.655,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	7.278.373.017,00	7.214.571.667,00	99,12	8.536.351.315,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6	5.588.341.350,00	4.676.717.909,00	83,69	0,00
	Jumlah Belanja Modal		4.103.994.263.579,98	3.828.798.419.151,25	93,29	2.345.617.541.442,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3	22.640.327.875,00	5.774.799.583,00	25,51	1.826.837.315,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3	22.640.327.875,00	5.774.799.583,00	25,51	1.826.837.315,00



Kode Rekening	URAIAN	REFF CALK	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023	
1	2	3	4	5	6=(5/4)*100	7	
5.4	Jumlah Belanja Tak Terduga	5.1.2.4	22.640.327.875,00	5.774.799.583,00	25,51	1.826.837.315,00	
	BELANJA TRANSFER		465.928.642.000,00	465.702.436.664,00	99,95	441.881.227.088,00	
	5.4.01.01 Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota		5.1.2.4.1	11.100.000.000,00	11.024.007.000,00	99,32	9.540.281.000,00
	5.4.01.02 Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/kota ke Daerah Provinsi		5.1.2.4.2	454.828.642.000,00	454.678.429.664,00	99,97	432.340.946.088,00
	5.4.01.03 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kpd Desa			0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Belanja Transfer		465.928.642.000,00	465.702.436.664,00	99,95	441.881.227.088,00	
	JUMLAH BELANJA		6.999.194.000.000,00	6.411.806.512.153,84	91,61	4.608.120.868.464,26	
6	SURPLUS/DEFISIT	5.1.3	(891.211.172.162,00)	(217.780.129.067,76)	24,44	92.783.306.910,52	
	PEMBIAYAAN	5.1.4					
	6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.4.1	893.211.172.162,00	893.211.172.162,04	100,00	802.427.865.251,52	
	6.1.01 Penggunaan SILPA	5.1.4.1	893.211.172.162,00	893.211.172.162,04	100,00	802.427.865.251,52	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		893.211.172.162,00	893.211.172.162,04	100,00	802.427.865.251,52	
	6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.4.2	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00	
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO		891.211.172.162,00	891.211.172.162,04	100,00	800.427.865.251,52	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	5.1.5	0,00	673.431.043.094,28	0,00	893.211.172.162,04	

Sumber Data : Simda Keuangan Per 5 Maret 2025



h. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah;

Dalam perencanaan pembangunan RKPD 2024 dirumuskan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah khususnya permasalahan yang sedang terjadi maupun akan terjadi. Berikut faktor penghambat (permasalahan pembangunan) Kabupaten Berau Menurut Sasaran Pembangunan Daerah:

Tabel 1.10
Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan Sasaran Pembangunan
Kabupaten Berau

Sasaran Pembangunan Daerah	Masalah Pokok	Permasalahan
laju pertumbuhan Ekonomi	Perekonomian Daerah	1) Pertumbuhan ekonomi cenderung fluktuatif dan akan semakin rendah di tengah pelambanan ekonomi global
		2) Perekonomian didominasi oleh sektor primer (pertambangan dan perkebunan) yang sangat tergantung pada permintaan ekspor
		3) Pertumbuhan ekonomi belum berpengaruh secara signifikan pada upaya mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan
		4) Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemandirian fiskal.
		5) Masih rendahnya PDRB perkapita Kabupaten Berau dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Timur. Tahun 2019 Kabupaten Berau di bawah masuk peringkat 6 dari 10 daerah dan masih di bawah PDRB perkapita Provinsi Kalimantan Timur
		6) Angka ketergantungan Kabupaten Berau tergolong tinggi yaitu 48,06 ditahun 2019. Artinya setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung beban hidup sekitar 48 orang usia non produktif
Angka Kemiskinan	Sosial	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang cenderung



Sasaran Pembangunan Daerah	Masalah Pokok	Permasalahan
		meningkat. Untuk P1 meningkat dari 0,57 di tahun 2018 menjadi 0,66 di tahun 2019 dan P2 dari meningkat 0,11 di tahun 2018 menjadi 0,12 di tahun 2019. Angka kemiskinan akan semakin meningkat sejalan dengan pelambatan ekonomi global, nasional dan daerah
Angka Pengangguran	Ketenagakerjaan	Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengurangan angka pengangguran. Tingkat pengangguran akan semakin meningkat sejalan dengan pelambatan ekonomi global, nasional dan daerah.
Indeks Pembangunan Manusia	Kesejahteraan Masyarakat	1) Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh angka usia harapan hidup Kab. Berau (71,94) masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Kaltim (74,22) 2) Masih rendahnya kualitas pendidikan yang ditunjukkan oleh angka Harapan Lama Sekolah dan rata-rata lama sekolah sebesar 13,31 dan 9,25, masih di bawah Provinsi Kaltim dengan nilai 13,69 dan 9,70 di tahun 2019 3) Masih rendahnya pendapatan masyarakat yang ditunjukkan oleh tingkat pengeluaran perkapita (Rp.12.726.000/tahun di tahun 2019) dan akan semakin rendah karena pengaruh pelambatan ekonomi
	Infrastruktur	1) Masih ada rumah tangga yang belum menggunakan listrik. Ada sekitar 12,58% pengguna listrik non PLN dan 0,21% yang belum menggunakan listrik di tahun 2019 2) Cakupan layanan telekomunikasi belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Berau 3) Masih terdapat kampung yang belum terakses jalan dan jembatan 4) Kondisi jalan yang kurang memadai sepanjang 638,58 km jalan dalam kondisi rusak dan 193,48 km rusak berat. 5) Terbatasnya fasilitas air minum/air bersih
Kategori Reformasi Birokrasi	Tata Kelola Pemerintahan	1) Masih tingginya ketergantungan fiskal pada dana perimbangan (69,96%) dan akan semakin terbatas sebagai dampak dari pandemi covid 19 dan pelambatan ekonomi; 2) Kurangnya koordinasi antar Perangkat Daerah 3) Belum optimalnya peran Pemerintahan Kampung/Desa



Sasaran Pembangunan Daerah	Masalah Pokok	Permasalahan
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Belum optimalnya tata kelola lingkungan hidup

Sumber Data: RKPD Kabupaten Berau Tahun 2024

b. Visi Dan Misi Kepala Daerah;

Visi Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 adalah **“Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Handal untuk Transformasi ekonomi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan”**

Adapun penjelasan dari Visi Kabupaten Berau di atas adalah sebagai berikut :

MAJU

Maju adalah suatu kondisi yang dalam banyak hal lebih baik dari kondisi yang ada saat ini. Berau yang Maju berarti kondisi masyarakat Berau yang lebih baik, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan, politik, keamanan dan ketertiban.

SEJAHTERA

Sejahtera pada dasarnya memiliki lingkup yang luas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejahtera artinya tenteram, selamat sentosa, dan senang. Artinya kondisi manusia di mana masyarakatnya dalam keadaan sehat, damai, dan senang. Untuk dapat hidup sehat, damai dan senang diperlukan perbaikan pada berbagai aspek kehidupan, bukan hanya pembangunan ekonomi tapi juga fungsi-fungsi pembangunan lainnya. Sejalan dengan hal tersebut, maka sejahtera yang dimaksud dalam visi ini adalah suatu kondisi kehidupan masyarakat di mana masyarakatnya dapat menikmati hasil-hasil pembangunan yang lebih baik dan layak, baik di bidang



ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan dan ketertiban. Sejahtera tidak semata-mata dilihat dari layak dan membaiknya tingkat pendapatan masyarakat di masa depan, tapi juga dilihat dari aspek-aspek yang lain seperti kemudahan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, keamanan dan politik.

SUMBER DAYA MANUSIA YANG HANDAL

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah daerah. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan suatu daerah. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah daerah sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan pembangunan daerah tersebut. Demi mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Berau 2021- 2026, maka Sumber Daya Manusia perlu dipersiapkan secara matang dan berkelanjutan. SDM yang handal dapat terwujud dengan memberikan Pendidikan dan pelatihan secara tepat sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah. Bupati dan Wakil Bupati 2021-2026 bertekad membentuk SDM yang handal sebagai pondasi dari keberhasilan pembangunan yang di cita-citakan

TRANSFORMASI EKONOMI DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN

Sekalipun konsep pembangunan yang dijalankan di Kab. Berau selama ini, dirasakan telah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi yang didorong oleh sektor Pertambangan dan Penggalian, dalam kenyataannya belum mampu menekan angka kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Berau. Konsep



pembangunan yang selama ini lebih menekankan pada pemanfaatan sumberdaya tidak terbarukan (*unrenewable resources*) di sektor Pertambangan tidak lagi bisa dipertahankan dalam jangka panjang dan karenanya perlu dilakukan transformasi ekonomi ke pemanfaatan sumberdaya ekonomi terbarukan (*renewable resources*) seperti Pertanian, Perkebunan dan Perikanan, Pariwisata, dan UMKM.

Dengan konsep ini, maka pemanfaatan sumberdaya ekonomi akan lebih dapat dirasakan secara berkelanjutan dan dalam jangka panjang. Dengan konsep pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan diharapkan sumber daya alam akan dapat dinikmati untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan manusia atau penduduk saat ini tanpa mengurangi potensinya untuk memenuhi kebutuhan manusia di masa mendatang.

Visi Kabupaten Berau periode 2021-2026 menitikberatkan pada pembentukan sumber daya manusia yang handal. Sumber daya manusia yang handal akan memudahkan Kabupaten Berau dalam pemulihan ekonomi sehingga bisa tercipta masyarakat yang sejahtera dan maju. Arah pemulihan ekonomi Kabupaten Berau tetap dengan memaksimalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki akan tetapi dengan konsep pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan sehingga kelestarian lingkungan bisa tercipta dan dapat dinikmati oleh generasi-generasi berikutnya.

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Berau 2021-2026 seperti yang telah ditetapkan di atas, maka dirumuskan Misi Pembangunan Kabupaten Berau sebagai berikut:



1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, sejahtera dan berbudi luhur

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Berau. Hal ini didasarkan atas kesadaran bahwa tujuan akhir dari pelaksanaan pembangunan adalah dengan menempatkan manusia sebagai kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan alat dari pembangunan.

Pembangunan sumber daya manusia adalah sebuah proses pembangunan yang bertujuan agar mampu memiliki lebih banyak pilihan, khususnya dalam pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak yang dapat diukur dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tujuan utama dari misi ini adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif United Nation Development Program (UNDP). Untuk melaksanakan misi ini, maka peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan harus ditingkatkan. Dalam bidang pendidikan, misi ini diharapkan mampu untuk mengatasi masalah kualitas serta pemerataan layanan pendidikan agar semua masyarakat di Kabupaten Berau dapat merasakan penyelenggaraan pelayanan pendidikan yang layak dan sesuai standar. Tidak hanya pendidikan formal, namun pendidikan non formal pun akan



ikut ditingkatkan agar terciptanya kehidupan masyarakat yang berbudi luhur.

Dalam bidang kesehatan, misi ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Berau. Tidak ada lagi masyarakat yang tidak bisa mengakses layanan kesehatan. Penyediaan layanan kesehatan murah dan gratis untuk masyarakat miskin akan membantu meningkatkan usia harapan hidup masyarakat Berau. Penyediaan rumah sakit sesuai standar yang lengkap juga akan membantu meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik. Sehingga apabila pendidikan dan kesehatan yang menjadi dasar dalam pembangunan manusia ini sudah meningkat, maka diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat ke depan juga ikut meningkat.

2. Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sektor hilir sumber daya alam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangan kerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan kewirausahaan yang kreatif dan produktif, mewujudkan ketahanan pangan yang terjangkau, memadai, berkualitas, dan berkelanjutan, mendorong terciptanya kesejahteraan dan keadilan sosial-ekonomi masyarakat.

Salah satu amanah pembangunan nasional adalah memajukan kesejahteraan umum, memastikan dampak pembangunan dirasakan semua golongan serta memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Kabupaten Berau. Langkah pertama untuk mewujudkan amanah tersebut diwujudkan



melalui penyediaan lapangan kerja untuk menurunkan angka pengangguran. Tidak sekedar menyediakan lapangan kerja, tapi pemerintah juga mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat melalui munculnya wirausaha-wirausaha baru yang mampu membuka lapangan kerja sendiri berbasis pertanian, perikanan, industri dan pariwisata. Sejalan dengan hal tersebut, maka transformasi ekonomi dari mengandalkan pembangunan ekonomi pada sumber daya tidak terbarukan (*unrenewable resources*), khususnya di sektor Pertambangan dan Penggalian secara perlahan dan pasti mulai bergeser ke pemanfaatan sumber daya ekonomi terbarukan (*renewable resources*), khususnya yang menjadi sektor andalan di Kabupaten Berau seperti sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pariwisata.

3. Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil dan berwawasan lingkungan

Sarana dan prasarana publik atau infrastruktur diakui sebagai salah satu roda penggerak ekonomi. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi memungkinkan mobilitas orang, barang, dan jasa menjadi lebih cepat dan efisien ke dan dari Kab. Berau. Di samping itu, telekomunikasi, listrik, dan air merupakan elemen yang sangat penting dalam proses produksi dari sektor-sektor ekonomi seperti perdagangan, industri dan pertanian. Keberadaan infrastruktur akan mendorong terjadinya peningkatan produktivitas bagi faktor-faktor produksi.

Pentingnya sarana dan prasarana publik, khususnya telekomunikasi dan jaringan digital akan semakin penting di era digital sekarang ini. Hal ini didasari atas kesadaran bahwa saat ini dan terlebih lagi di masa mendatang, ekonomi digital



dipastikan akan menjadi suatu yang tidak bisa dihindari keberadaannya. Era ekonomi digital telah menjadi tantangan dan sekaligus peluang bagi daerah dalam memacu pertumbuhan ekonomi di daerah. Daerah yang tidak bisa memanfaatkan peluang dan sekaligus mengantisipasi tantangan pembangunan di era digital ini, dipastikan tidak akan mampu bersaing dan akhirnya akan tertinggal dengan daerah lain di masa depan. Bank Indonesia (BI) bahkan meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan akan ditopang oleh ekonomi digital. Terlebih digitalisasi sudah menjalar hampir ke semua jenis usaha.

4. Meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel

Misi ini mengarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat Kabupaten Berau. Pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan menjadi perhatian dalam misi ini. Dalam menjalankan pelayanan publik, pemerintah didorong untuk melakukan pelayanan yang maksimal, profesional, bersih, berwibawa, transparan, akuntabel, dan harus senantiasa mengedepankan konsep adil sebagai landasan etik dalam melakukan setiap layanan kepada masyarakat.

Misi ini juga akan mendorong pemerintah menjalankan pelayanan publik yang bersih dan berbudaya. Kondisi ini diwujudkan dengan tidak adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam melakukan kerja pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, dalam menjalankan pelayanan masyarakat, prosedur dan mekanisme yang ada senantiasa harus ditaati. Pemerintah Kabupaten Berau harus mempermudah segala jenis pelayanan perizinan, baik izin



usaha, izin pendudukan, izin kepemilikan, izin bangunan, dan sebagainya dengan senantiasa taat pada aturan-aturan yang berlaku.

**c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen
Perencanaan Jangka Menengah**

Program pembangunan merupakan bentuk instrumen kebijakan berupa program prioritas yang memuat satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat. Pelaksanaan program-program pembangunan daerah bertujuan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang berpedoman kepada strategi dan kebijakan umum yang telah ditetapkan sebelumnya, maka disusunlah program-program pembangunan Kabupaten Berau tahun 2021-2026. Program-program prioritas pada masing-masing strategi ini disebut sebagai program pembangunan daerah yang menggambarkan capaian secara langsung terhadap sasaran RPJMD sesuai dengan masing-masing arah kebijakan pembangunan Kabupaten Berau.

- Program Prioritas I: Belanja Langsung Wajib dan Mengikat serta Pemenuhan Penerapan Pelayanan Dasar
Kebijakan belanja daerah pada RPJMD 2021-2026 diarahkan pada pemenuhan kebutuhan belanja wajib yang diatur berdasarkan peraturan Perundang-undangan seperti:
 - 1) Pemenuhan kebutuhan belanja fungsi pendidikan sebesar 20 persen sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;



- 2) Pemenuhan belanja fungsi kesehatan sebesar 10 persen sebagaimana tercantum pada Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 3) Pemenuhan kewajiban belanja moda transportasi sebesar 10 persen dari target Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum pada Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
 - 4) Pemenuhan belanja pegawai atas belanja gaji dan tunjangan dan rencana pemberian tambahan penghasilan PNS berdasarkan prestasi kerja kepada seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Berau.
- Program Prioritas II: Belanja Pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah
- Program prioritas pembangunan dalam RPJMD merupakan manifestasi dari visi politik kepala daerah terpilih sebagai komitmen kepada rakyat Kabupaten Berau. Terkait dengan hal tersebut, maka perlu diidentifikasi program prioritas pembangunan Daerah sesuai dengan janji politik pada saat kampanye.
- Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau periode 2021-2026, Hj. Sri Juniarsih, M.Pd. dan H. Gamalis, S.E. memiliki 18 janji kampanye yang disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Berau. 18 janji kampanye tersebut antara lain:
- 1) Melanjutkan Program Percepatan Pembangunan Desa dengan SIGAP;
 - 2) Melanjutkan Program Percepatan Pembangunan 50 s/d 100 Juta Per RT;
 - 3) Pembangunan Rumah Sakit Tipe B Termasuk Layanan PCR Gratis;
 - 4) Gratis Iuran BPJS Kesehatan Bagi Warga Yang Tidak Mampu;



- 5) Gratis Fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal;
- 6) Penyediaan 1000 Titik Wifi Gratis Hingga Ke Tingkat Kampung;
- 7) Peningkatan Infrastruktur Jalan Untuk Menunjang Perekonomian Kampung dan Kota;
- 8) Peningkatan Program Beasiswa Berau Cerdas, 1.000 Laptop Untuk Guru Sekolah dan Bantuan Perlengkapan Sekolah Bagi Pelajar yang Tidak Mampu;
- 9) Peningkatan Insentif Untuk Kader Posyandu, Tenaga Kesehatan, PTT, Ketua RT & Pembimbing Rohani dan Tenaga Pendidikan (Guru Sekolah dan PAUD);
- 10) Program Peningkatan Sarana Fasilitas Air Bersih (25.000 Sambungan Baru) dan Listrik di Seluruh Kampung;
- 11) Pembangunan Kawasan Terpadu Pusat Seni, Budaya dan Kreativitas (Terdiri dari Taman, Budaya, Amphiteater, Pusat Kreativitas & Kawasan UMKM Terpadu) Serta Pembangunan Balai Adat;
- 12) Bantuan Langsung Tunai Bagi Fakir Miskin, Yatim Piatu & Orang Tua Jompo yang Terlantar Termasuk Warga Terdampak COVID-19;
- 13) Revitalisasi Bangunan Bersejarah (Keraton, Makam Bersejarah, dan lain-lain);
- 14) Pemberian Bantuan Stimulan (SAPRONAK, SAPRODI, ALSINTAN) Serta Mewujudkan Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan yang Maju Berbasis Teknologi;
- 15) Pengembangan Sarana & Prasarana Destinasi Pariwisata;
- 16) Menyediakan Fasilitas Pembinaan, Pelatihan serta Kredit Lunak Kepada UMKM;
- 17) Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih & Berkualitas Melalui SDM Yang Profesional Berbasis Digital Teknologi;



18) Bantuan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Kurang Mampu.

Program prioritas pembangunan Daerah merupakan program perangkat daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terpilih sebagaimana dituangkan dalam RPJMD. Dengan demikian program prioritas II meliputi Program Perangkat Daerah pendukung janji kampanye sebagaimana disajikan dalam Tabel 1.2 dan Program Perangkat Daerah yang mendukung visi dan misi Kepala Daerah terpilih sebagaimana disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 1.11

Integrasi Janji Kampanye ke dalam Program Perangkat Daerah

No	Program Unggulan Bupati dalam Janji Kampanye	Program Terkait dalam Kepmendagri 50	OPD Penyelenggara
1	Melanjutkan Program Percepatan Pembangunan Desa dengan SIGAP	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan
2	Melanjutkan Program Percepatan Pembangunan 50 s/d 100 Juta Per RT	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kec. Tanjung Redeb, Kec. Teluk Bayur, Kec. Sambaliung, dan Kec. Gunung Tabur
3	Pembangunan Rumah Sakit Tipe B Termasuk Layanan PCR Gratis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	Dinkes
		Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
		Program Penataan Bangunan Gedung	DPUPR
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Distanah
4	Gratis Iuran BPJS Kesehatan Bagi Warga Yang Tidak Mampu	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
5	Gratis Fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Disnakertrans
		Program Hubungan Industrial	Disnakertrans
6	Penyediaan 1000 Titik Wifi Gratis Hingga Ke Tingkat Kampung	Program Aplikasi Informatika	Diskominfo
7		Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR



No	Program Unggulan Bupati dalam Janji Kampanye	Program Terkait dalam Kepmendagri 50	OPD Penyelenggara
	Peningkatan Infrastruktur Jalan Untuk Menunjang Perekonomian Kampung dan Kota	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	DPUPR
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Disperkim
8	Peningkatan Program Beasiswa Berau Cerdas, 1.000 Laptop Untuk Guru Sekolah dan Bantuan Perlengkapan Sekolah Bagi Pelajar yang Tidak Mampu	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesra
		Program Pengelolaan Pendidikan	Disdik
9	Peningkatan Insentif Untuk Kader Posyandu, Tenaga Kesehatan, PTT, Ketua RT & Pembimbing Rohani dan Tenaga Pendidikan (Guru Sekolah dan PAUD)	Program Pengelolaan Pendidikan	Disdik
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesra
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kec. Tanjung Redeb, Kec. Teluk Bayur, Kec. Sambaliung, dan Kec. Gunung Tabur
10	Program Peningkatan Sarana Fasilitas Air Bersih (25.000 Sambungan Baru) dan Listrik di Seluruh Kampung	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR
		Program Tentang Kelistrikan Masuk dalam Program Urusan Provinsi (Program Pengelolaan Ketenagalistrikan)	Distamben Prop
11	Pembangunan Kawasan Terpadu Pusat Seni, Budaya dan Kreativitas (Terdiri dari Taman, Budaya, Amphiteater, Pusat Kreativitas & Kawasan UMKM Terpadu) Serta Pembangunan Balai Adat	Program Penataan Bangunan Gedung	DPUPR
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Disbudpar
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	DLHK
12	Bantuan Langsung Tunai Bagi Fakir Miskin, Yatim Piatu & Orang Tua Jompo yang Terlantar Termasuk Warga Terdampak COVID-19	Program Rehabilitasi Sosial	Dinsos
13	Revitalisasi Bangunan Bersejarah (Keraton, Makam Bersejarah, dan lain-lain)	Program Penataan Bangunan Gedung	DPUPR
14	Pemberian Bantuan Stimulan (SAPRONAK, SAPRODI, ALSINTAN) Serta Mewujudkan Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan yang Maju Berbasis Teknologi	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Distanak & Dinas Perkebunan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Distanak & Dinas Perkebunan
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan



No	Program Unggulan Bupati dalam Janji Kampanye	Program Terkait dalam Kepmendagri 50	OPD Penyelenggara
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
15	Pengembangan Sarana & Prasarana Destinasi Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Disbudpar
		Program Penataan Bangunan Gedung	DPUPR
		Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR
		Program Pengelolaan Pelayaran	Dishub
16	Menyediakan Fasilitas Pembinaan, Pelatihan serta Kredit Lunak Kepada UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Diskoperindag
17	Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih & Berkualitas Melalui SDM Yang Profesional Berbasis Digital Teknologi	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Perangkat Daerah
		Program Aplikasi Informatika	Diskominfo
18	Bantuan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Kurang Mampu	Program Pengembangan Perumahan	Disperkim
		Program Kawasan Pemukiman	Disperkim
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Disperkim



Tabel 1.12
Program Prioritas pembangunan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Kinerja		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
m	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Misi 1. Meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia yang cerdas, sejahtera dan berbudi luhur				401.50 4.628. 399		544.55 5.897. 712		644.51 9.242. 282		1.133. 566.17 4.902		688.14 5.637. 509		730.22 3.248. 346		3.961.7 61.892. 550	
	Mewujudkan Masyarakat Berau yang berdayasaing	Indeks Pembangunan	74,71	74,99	401.50 4.628. 399	75,10	544.55 5.897. 712	75,50	644.51 9.242. 282	75,89	1.133. 566.17 4.902	76,29	688.14 5.637. 509	76,69	730.22 3.248. 346	76,69	3.961.7 61.892. 550	



				Manusia														
				Harapan Lama Sekolah	13,32	13,53		14,10		14,29		14,47		14,65		14,83		14,83
				Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan			136.31		195.02		267.84		270.16		269.01		283.58	1.421.9
				Rata-rata Lama Sekolah	9,52	9,69	8.867.889	9,70	5.904.218	9,84	8.513.138	9,98	5.892.650	10,12	7.713.238	10,26	8.635.416	65.526.550
1	1	2	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	75,14	76,17		77,22		78,28		79,35		80,44		81,54		81,54
				Angka partisi kasar SD/MI	104,29	105,33	134.078.736.589	106,39	190.810.323.018	107,45	263.501.013.138	108,52	265.605.767.650	109,61	264.234.331.988	110,71	278.570.835.104	1.396.801.007.487
				Angka partisi pasi	95,82	96,78		97,75		98,72		99,71		100,00		100,00		100
																		Dinas Pendidikan



				Angka Putus Sekolah SD/MI	0,02	0,01		0		0		0		0,00		0,00	
				Angka Putus Sekolah SMP/MTS	0,03	0,02		0,01		0		0		0,00		0,00	
				Angka Kelulusan													
				Angka Kelulusan SD/MI	100	100		100		100		100		100,00		100	
				Angka Kelulusan SMP/MTs	100	100		100		100		100		100,00		100	
				Angka Melanjutkan Sekolah	105,59	100,00		100,00		100		100		100		100	



				h SD ke SMP																
				Angka melek huruf	99,42	99,46		99,49		99,53		99,56		99,6		99,64		99,64		
				Sekolah dalam kondisi bangunan baik	65	68,25		71,66		75,25		79,01		82,96		87,11		87,11		
1	1	4	Program Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV			2.240.131.300		4.215.581.200		4.347.500.000		4.560.125.000		4.783.381.250		5.017.800.313		25.164.519.062.50	Dinas Pendidikan
				PAUD	33,13	33,46		33,80		34,13		34,48		34,82		35,17		35,17		
				SD	76,36	77,12		77,89		78,67		79,46		80,26		81,06		81,06		



			SMP	94,38	95,32		96,28		97,24		98,21		99,19		100,00		100		
			Rasio murid/guru sekolah																
			Rasio murid/guru SD Negeri	15	15		15		15		15		15		15,00		15,00		
			Rasio murid/guru SD Swasta	15,19	15,19		15,19		15,19		15,19		15,19		15,19		15,19		
			Rasio murid/guru SMP Negeri	13,36	13,36		13,36		13,36		13,36		13,36		13,36		13,36		
			Rasio murid/guru SMP Swasta	12,76	12,76		12,76		12,76		12,76		12,76		12,76		12,76		



			Rasio guru/murid per kelas rata-rata														
Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan kesehatan	Angka Harapan Hidup (Tahun)	72,06	72,17		72,28		72,38		72,49		72,60		72,71		72,71		
	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang	9,30%	19,70%	265.185.760.510	29,60%	349.529.993.494	44,90%	376.670.729.144	66,60%	863.400.282.252	99,90%	419.127.924.271	100%	446.634.612.929	100%	2.539.796.366.000	



1	2	2	Program Pemanfaatan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Persentase balita gizi kurang	7,30	7,80		7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80				
				Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran dan Upaya hidup	22,00	22,00		20,00	19,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00		
				Jumlah kematian ibu melahirkan	8,00	10,00		10,00	9,00	8,00	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00		
				Angka kematian	15,00	17,00		16,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00		
																	Dinas Kesehatan		



			anak balita											
			Persen tase desa/k elurah an denga n Stop Buang air besar Semba rangan (SBS) /ODF	30, 00	60,00		80,00	90,00	95,00	98,00	100,00	100,00		
			Persen tase Pemen uhan Kualit as Keseh atan Lingk ungan	60, 00	67,00		70,00	75,00	80,00	83,00	85,00	85,00		



				Persen tase penan ggulan gan Kejadi an Luar Biasa	10 0,0 0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
				(KLB) / Wabah < 24 jam												
				Cakup an Desa/k elurah an (%) Univer sal Child Immu nizatio n (UCI)	59, 00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	85,00			



				Persen tase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	94,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00		
				presensi unit kerja melaksanakan upaya kesehatan terhadap PTM sesuai standar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
				Persen tase	87,90	93,60	94,10	94,60	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00		



			Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	0,84	0,49	0,48	0,47	0,46	0,45	0,85	0,85			
			Angka kejadian Malaria	0,00	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1		
			Cakupan Pelayanan kesehatan ibu hamil	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
			Cakupan Pelayanan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		



				pada usia pendidikan dasar													
				Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				Cakupan Pelayanan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



				ksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immundeficiency Virus)																
1	2	3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	Presentase tenaga kesehatan yang mengikut pelatihan	79,00	100,00	4.122.686.896	100,00	10.355.968.000	100,00	11.737.162.000	100,00	12.100.594.000	100,00	12.316.713.000	100,00	12.536.056.000	100,00	63.169.179.896	Dinas Kesehatan



			Jumlah Tenaga Perawat	58 4,0 0	600,00		615,00		630,00		645,00		660,00		675,00				
1	2	4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Cakupan Sarana Pelayanan Kefarmasian yang sesuai standar	10 0,0 0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	10.622. 698.00	0	Dinas Kesehatan
				persentase TPM yang memenuhi syarat Kesehatan	65, 65	70,00	73,00	76,00	80,00	82,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	0	0	
						936.67 7.000		1.166. 562.00	0	1.476. 453.00	0	1.831. 184.00	0	2.297. 015.00	0	2.914. 807.00	0	0	



			Persen tase IRTP Yang dilakukan Pengawasan Memenuhi Syarat	57,14	60,00		65,00		70,00		75,00		80,00		85,00		85,00		
1	2	5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Desa/kelurahan	59,00	83,80		87,90		91,60		95,00		95,00		95,00		95,00	
				Cakupan rumah tangga sehat (PHBS Rumah Tangga) (%)	3,8	35,00	790.00 0.000	45,00	1.275. 000.00 0	50,00	1.384. 500.00 0	55,00	1.615. 950.00 0	55,00	1.679. 545.00 0	55,00	1.550. 499.50 0	55,00	8.295.4 94.500



			Persen tase Kejadian Luar Biasa (KLB) / Wabah ditang gulangi kurang dari 24 jam	10 0,0 0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
		Program Pemanfaatan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan	Terpenuhiya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM	10 0%	100%	92.157 .271.8 04	100%	101.37 2.998. 984	100%	111.51 0.298. 883	100%	122.66 1.328. 771	100%	134.92 7.461. 648	100%	148.42 0.207. 813	100%	711.04 9.567.9 04	RSU D dr. Abdul Rivani



			atan Masya rakat	dan UKP di Wilay ah Kabup aten																
			Progra m Pening katan Kapasi tas Sumbe r Daya Manus ia Keseh atan	Terpen uhinya Pelaya nan Keseh atan dan Mutu Tenaga Teknis Keseh atan Ruma h Sakit	10 0%	100%	496.82 0.100	100%	546.50 2.110	100%	601.15 2.321	100%	661.26 7.553	100%	727.39 4.308	100%	800.13 3.739	100%	3.833.2 70.132	RSU D dr. Abdul Riva i
2	1	4	Progra m Pembe rdayaa n Dan	Angka kelahir an remaja (perem kel	19 per 10 00	18 per 1000 kelahir an	319.95 1.210	17 per 1000 kelahir an	901.46 1.000	16 per 1000 kelahir an	1.100. 000.00	15 per 1000 kelahir an	1.319. 000.00	14 per 1000 kelahir an	1.481. 000.00	13 per 1000 kelahir an	1.693. 000.00	13 per 1000 kelahir an	6.814.4 12.210	Dina s Peng enda lian



		Peningkatan Keluaran Sejahtera (KS)	jumlah penduduk usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)														Penduduk Keluarga Bercanda, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Misi 2:	Meningkatkan ekonomi sektor hilir sumber daya alam berbasis kerakyatan dengan	masyarakat dengan optimalisasi pertanian dalam arti luas yang															
			74.487	159.19	125.96	141.18	143.22	155.75	799.81								
			.599.7	8.906.	5.328.	6.843.	9.575.	0.974.	9.227.8								
			90	194	287	768	599	200	38								



pe pengembangan usaha berbasis				rluasan lapangan kerja dan pariwisata dan kearifan lokal																
Meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat yang mantap dan berdaya saing				Laju Pertumbuhan ekonomi	-	1,29	55.568.421.924	2,29	65.748.088.194	3,79	66.742.128.287	4,29	74.351.843.768	4,79	77.437.625.599	5,29	82.882.829.200	5,29	422.730.936.972	
Menurunnya angka pengangguran di Kab. Berau				Tingkat Pengangguran terbuka	5,08	4,96	974.999.818	4,84	4.359.072.000	4,73	4.772.000.000	4,62	5.538.200.000	4,51	6.132.020.000	4,41	6.765.222.000	4,41	28.541.513.818	
2	7	3	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas	Presensi Angkatan Kerja Lokal yang berke	70%	70%	629.999.818	70%	1.284.072.000	75%	1.342.000.000	75%	1.476.200.000	75%	1.623.820.000	80%	1.786.202.000	80%	8.142.293.818	Dinas Tenaga Kerja dan Tran



				smig Tenaga Kerja	mpete n															smig rasi	
2	7	4		Progr am Pene mpata n Tenag a Kerja	Persen tase Tenag a Kerja Lokal yang ditemp atkan	20 %	20%	70.000 .000	25%	2.475. 000.00 0	25%	2.750. 000.00 0	30%	3.314. 000.00 0	30%	3.685. 400.00 0	35%	4.073. 940.00 0	35%	16.368. 340.00 0	Dina s Tena ga Kerj a dan Tran smig rasi
2	7	5		Progr am Hubu ngan Indust rial	Persen tase Besara n kasus yang diseles aikan denga n Perjanj ian Bersa	10 0%	100%	275.00 0.000	100%	600.00 0.000	100%	680.00 0.000	100%	748.00 0.000	100%	822.80 0.000	100%	905.08 0.000	100%	4.030.8 80.000	Dina s Tena ga Kerj a dan Tran smig rasi



				ma (PB)																
				Perse ntase pendu duk yang hidup di bawah garis kemis kinan	5,1 9	5,13	54.593 .422.1 06	5,07	61.389 .016.1 94	5,01	61.970 .128.2 87	4,95	68.813 .643.7 68	4,90	71.305 .605.5 99	4,84	76.117 .607.2 00	4,84	394.18 9.423.1 54	
1	6	2		Persen tase Penya ndang Masal ah Keseja htraaa n Sosial yang tertang ani		100%	1.160. 000.00 0	100%	1.910. 000.00 0	100%	1.625. 000.00 0	100%	3.750. 000.00 0	100%	1.500. 000.00 0	100%	4.100. 000.00 0	100%	14.045. 000.00 0	Dina s Sosi al



1	6	4	Persen tase terlaksananya kegiatan pelayanan dan rehabilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
			Program Rehabilitasi Sosial															
			Persen tase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3.754.000.000	2.730.000.000	2.730.000.000	2.730.000.000	2.730.000.000
			Persen tase panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							



				sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial															
1	6	5	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase masyarakat yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	365.000.000	100%	395.000.000	100%	395.000.000	100%	395.000.000	100%	395.000.000	100%	1.945.000.000		Dinas Sosial



2	1	3	5	Rata-rata jumlah kelompok pembinaan PKK	TA D	50		80	100	120	150	160	160					
				Persen tase LPM Berprestasi	TA D	100		100	100	100	100	100	100	100	100			
				Persen tase PKK aktif	100	100	1.764.998.909	100	3.150.000.000	100	3.770.000.000	100	4.600.000.000	100	5.430.000.000	100	6.050.000.000	24.764.998.909
				Persen tase Posyandu aktif	26,4	26,4		100	100	100	100	100	100	100	100	100		
				Swadaya Masyarakat terhadap	TA D	10		15	20	25	30	35	35					
														Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung				



				progr m pembe rdayaa n masya rakat																
4	1	2	Progr am Pemer intaha n Dan	Presen tase menig katnya Kinerj a Penyel enggar aan	10 0%	100%	1.145. 000.00 0	100%	2.453. 800.00 0	100%	2.500. 000.00 0	100%	2.500. 000.00 0	100%	2.500. 000.00 0	100%	13.598. 800.00 0		Bagi an Tata Pemer intaha n	
			Keseja hteraa n Rakya t	Pemeri ntahan Daera h kab. Berau Persen tase Menin gkatny a kualita	10 0%	100%	29.530 .000.0 00	100%	30.650 .000.0 00	100%	30.150 .000.0 00	100%	32.450 .000.0 00	100%	34.522 .000.0 00	100%	34.796 .000.0 00	100%	192.09 8.000.0 00	Bagi an Kesra a



s dan pendalaman agama, mental Spritual dan capaian kinerja sosial serta masyarakat																
Prosentase pelayanan bidang hukum dan kerjasama yang terfasilitasi &	87%	900.000.000	90%	1.690.000.000	92%	1.913.000.000	95%	2.099.300.000	97%	2.329.230.000	98%	2.523.153.000	98%	11.454.683.000	Bagian Hukum dan Perundang-undangan	



				terkoo rdinir.																
7	1	3	Progra m Pembe rdayaa n Masya rakat Desa Dan Kelura han	Cakup an Pembe rdayaa n Masya rakat Desa dan kelura han	10 0%	100%	20.093 .423.1 97	100%	17.416 .216.1 94	100%	18.887 .128.2 87	100%	20.289 .343.7 68	100%	21.899 .375.5 99	100%	23.023 .454.2 00	100%	121.60 8.941.2 45	Kec amat an
Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program ekonomi kerakyatan			PDRB Per Kapita (Juta Rp)	14 8,9 0	151,45	18.919 .177.8 66	154,04	93.450 .818.0 00	156,67	59.223 .200.0 00	159,35	66.835 .000.0 00	162,08	65.791 .950.0 00	164,85	72.868 .145.0 00	164,85	377.08 8.290.8 66		
Meningkatnya Industri Kecil Dan menengah (IKM)			Presen tase Usaha mikro dan kecil	24 %	0%	1.760. 000.00 0	6%	1.760. 000.00 0	3%	2.100. 000.00 0	2%	2.460. 000.00 0	2%	2.820. 000.00 0	3%	3.140. 000.00 0	40%	14.040. 000.00 0		



2	1	7	7	Program Pembedayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMK M Aktif	45%	0%	960.000.000	5%	550.000.000	5%	590.000.000	5%	630.000.000	5%	670.000.000	5%	710.000.000	70%	4.110.000.000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
2	1	7	8	Program Pengembangan UMK M	Jumlah UMK M Naik Kelas	3000	5 UMK	120.000.000	5 UMK	170.000.000	10 UMK	200.000.000	15 UMK	250.000.000	20 UMK	300.000.000	25 UMK	350.000.000	25 UMK	1.390.000.000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perd



																					agan gan
3	3	0	2	Progra m Perizi nan Dan Pendaf taran Perusa haan	Jumla h SKA yang diterbi tkan	25 0 SK A	100 SKA	80.000 .000	120 SKA	100.00 0.000	150 SKA	150.00 0.000	180 SKA	200.00 0.000	200 SKA	250.00 0.000	220 SKA	260.00 0.000	1220 SKA	1.040.0 00.000	Dina s Kop erasi Peri ndus tria n dan Perd agan gan
3	3	0	3	Progra m Pening katan Sarana Distrib usi Perdag angan	Jumla h Pasar yang dikelol a	2 Pa sar	2 Pasar	250.00 0.000	3 Pasar	400.00 0.000	3 Pasar	450.00 0.000	4 Pasar	500.00 0.000	4 Pasar	550.00 0.000	4 Pasar	600.00 0.000	4 pasar	2.750.0 00.000	Dina s Kop erasi Peri ndus tria n dan Perd



																				agan gan	
3	3	0	7	Progra m Pengg unaan Dan Pemas aran Produ k Dalam Negeri	Jumla h Lapora n Sistem Jaring an Inform asi Perdag angan	12 La pora n	12 Lapora n	50.000 .000	12 Lapora n	60.000 .000	12 Lapora n	70.000 .000	12 Lapora n	80.000 .000	12 Lapora n	90.000 .000	12 Lapora n	100.00 0.000	12 Lapora n	450.00 0.000	Dina s Kop erasi , Peri ndus tria n dan Perd agan gan
3	3	0	4	Progra m Stabili sasi Harga Baran g Kebut uhan Pokok Dan Baran	Presen tase perke mbang an Harga Kebut uhan Pokok dan Bahan	0,2 %	0	300.00 0.000	0,2%	480.00 0.000	0,2%	640.00 0.000	0,2%	800.00 0.000	0,2%	960.00 0.000	0,2%	1.120. 000.00 0	1%	4.300.0 00.000	Dina s Kop erasi , Peri ndus tria n dan Perd



				g Pentin g	Pentin g														agan gan	
Terwujudnya pengembangan Pariwisata berbasis sustainable tourism				Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB		0,97	3.143.574.986	0,98	22.460.160.000	0,99	18.035.000.000	1,00	21.695.000.000	-	23.500.000.000	-	27.220.000.000	1,03	116.053.734.986	
3	2	6	2	Progra m Pening katan Daya Tarik Destin asi Pariwi sata	Jumla h Wisata wan Lama kunjun gan Pariwi sata Wisata	12 7.3 96 Orang 2 3 Hari	177.418 Orang	195.159 Orang	214.674 Orang	236.141 Orang	259.755 Orang	270.355 Orang	270.355 Orang	11.035.000.000	12.845.000.000	13.300.000.000	16.020.000.000	270.355 Orang	70.513.736.012	Dina s Keb udayan dan Pari wisata
3	2	6	3	Progra m Pemas aran Pariwi sata	Jumla h Destin asi Wisata Yang	5 Desti nas i Wisata Wi	7 Destin asi Wisata	7 Destin asi Wisata	7 Destin asi Wisata	7 Destin asi Wisata	7 Destin asi Wisata	8 Destin asi Wisata	8 Destin asi Wisata	2.200.000.000	2.550.000.000	3.050.000.000	3.600.000.000	3.900.000.000	15.639.999.774	Dina s Keb udayan dan



				Dipasar kan	sat a															Pari wisa ta	
3	2	5	6	Program Penge mbang an Sumbe r Daya Pariwi sata Dan Ekono mi Kreati f	Jumla h Pelaku Usaha Berbas is Ekono mi Kreatif Unggu lan	30 Or an g	30 Orang	64.999 .800	30 Orang	2.300. 000.00 0	60 Orang	2.250. 000.00 0	90 Orang	2.300. 000.00 0	120 Orang	2.350. 000.00 0	150 Orang	2.350. 000.00 0	150 Orang	11.614. 999.80 0	Dina s Keb uday aan dan Pari wisa ta
2	2	2	2	Program Penge mbang an Kebud ayaan	Jumla h penyel enggar aan festiva l seni dan buday a	4 Ev ent	5 Event	719.99 9.400	6 Event	2.665. 000.00 0	7 Event	2.200. 000.00 0	7 Event	3.500. 000.00 0	7 Event	4.250. 000.00 0	7 Event	4.950. 000.00 0	7 Event	18.284. 999.40 0	Dina s Keb uday aan dan Pari wisa ta



Menigkatnya Produksi Sektor Primer				Kontri busi Sektor Pertani an, Kehut anan dan Perika nan	11, 64	11,71	12.865 .602.8 80	11,79	65.550 .658.0 00	11,86	35.293 .200.0 00	11,94	38.345 .000.0 00	12,01	34.871 .950.0 00	12,09	37.778 .145.0 00	12,09	224.70 4.555.8 80		
3	2	7	2	Progra m Penye diaan Dan Penge mbang an Sarana Pertan ian	Produ ksi Komo ditas Perkeb unan (Ton)	To n	2.235. 00 0		2.250. 00 0		2.317. 50 0		2.385. 00 0		2.475. 00 0		2.520. 00 0		2.520. 00 0		Dina s Perk ebun an
				Kelapa Dalam	3,4 83	4,071	703.98 6.174	5,571	1.450. 000.00 0	6,871	1.595. 000.00 0	8,371	500.00 0	9,471	950.00 0	9,980	2.122. 945.00 0	9,980	9.556.3 81.174		
				Kakao	78 8	900		1,200		1,400		1,700		1,950		2,100		2,100		2,100	
				Karet	82	185		205		255		300		400		515		515		515	
				Lada	82 7	919		1,019		1,219		1,340		1,455		1,500		1,500		1,500	
3	2	7	3	Progra m Penye yang	Luas Kebun yang		50	119.99 6.760	60	1.675.	100	1.700.	100	1.750.	100	2.075.	100	2.175.	100	9.494.9 96.760	Dina s Perk



			diaan Dan Penge mbang an	dikem bangk an					000.00 0	000.00 0		000.00 0		000.00 0		000.00 0			ebun an	
			Prasar ana Pertan ian																	
3	2	5	Progra m Penge ndalia n Dan Penan ggulan gan Benca na Pertan ian	Luas ANKT di lokasi Usaha Perkeb unan yang dikelol a/ dibina (Hekta r)	3,0 00	5000	306.28 3.916	6000	2.030. 000.00 0	7500	2.460. 000.00 0	10000	2.525. 000.00 0	12500	2.580. 000.00 0	15000	2.655. 000.00 0	15000	12.556. 283.91 6	Dina s Perk ebun an
3	2	6	Progra m Perizi nan Usaha	Jumla h Penera pan Ijin	15	15	174.99 1.800	15	450.00 0.000	20	550.00 0.000	20	550.00 0.000	25	650.00 0.000	25	650.00 0.000	130	3.024.9 91.800	Dina s Perk ebun an



			Pertanian	Usaha yang dibangun dan diawasi																
3	2	7	Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan petani yang mendapatkan pelatihan/pembiayaan	30 Kelompok Tani	10 Kelompok Tani	378.714.800	10 Kelompok Tani	1.150.000.000	10 Kelompok Tani	1.255.000.000	10 Kelompok Tani	1.275.000.000	10 Kelompok Tani	1.280.000.000	10 Kelompok Tani	1.285.000.000	60 Kelompok Tani	6.623.714.800	Dinas Perkebunan
3	2	2	Program Penyelesaian Dan Pengembangan Sarana	Produktivitas Padi Sawah dan Padi Ladang)	3	3,07	2.789.898.494	3,15	22.124.500.000	3,26	9.945.000.000	3,37	10.920.000.000	3,49	12.120.000.000	3,62	13.332.000.000	3,62	71.231.398.494	Dinas Pertanian dan Peternakan



			Pertanian	Produktivitas Jagung	5	5,55		5,65	5,75	5,85	5,95		6	6					
				Produktivitas Cabai (Besar, Keriting, dan Rawit)	4	3,62		3,77	3,9	4,02	4,17		4,25	4,25					
				Produksi Dagin g Sapi	470	472,35		474,71	477,09	479,47	481,87		484,28	484,28					
				Produksi Telur Ayam Ras	1,753	1805,59		1859,76	1915,55	1973,02	2032,21		2093,17	2093,17					
3	2	3	Program Penyelesaian Dan Penge	Peningkatan Pemanfaatan Luas Lahan	230	265	799.973.232	300	7.645.400	2.145.000.000	450	2.393.000.000	550	2.675.000.000	550	2.942.500.000	550	18.600.473.232	Dinas Pertanian dan



			mbang an Prasar ana Pertan ian																Pete rnak an	
3	2	5	Progra m Penge ndalia n Dan Penan ggulan gan Benca na Pertan ian	Tingka t Cakup an penge ndalia n dan penan ggulan gan bencan a pertani an	31 2	500	199.99 9.800	2535	2.788. 900.00 0	3305	1.998. 200.00 0	4000	2.477. 500.00 0	4700	2.942. 000.00 0	5000	3.236. 200.00 0	5000	13.642. 799.80 0	Dina s Pert ania n dan Pete rnak an
3	2	6	Progra m Perizi nan Usaha Pertan ian	Jumla h Reko menda si izin usaha pertani		33	273.87 6.200	33	1.125. 000.00 0	40	1.400. 000.00 0	42	1.525. 000.00 0	44	1.675. 000.00 0	45	1.842. 500.00 0	45	7.841.3 76.200	Dina s Pert ania n dan Pete



				an dan peternakan yang difasilitasi															rnakan		
3	2	7	7	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan bina kelompok petani	83	84	596.875.088	85	2.230.000.000	86	2.020.000.000	87	2.750.000.000	88	1.420.000.000	89	1.562.000.000	89	10.578.875.088	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	2	5	3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi perikanan Tangkap	20.448,9 ton	23.399,74 ton	5.267.221.788	24.101,3 ton	17.942.258.000	24.824,78 ton	7.425.000.000	25569,53	7.275.000.000	26336,61	2.275.000.000	27126,71	2.675.000.000	27126,71	42.859.479.788	Dinas Perikanan
3	2	5	4	Program Pengelolaan	Jumlah Produksi		2.379.90 ton	1.253.784.828	2.403,7 ton	3.410.000.000	2.427,74 ton	1.600.000.000	2.452.01 ton	1.650.000.000	2.476,53 ton	1.750.000.000	2.501.30 ton	1.800.000.000	2.501.30 ton	11.463.784.828	Dinas Perikanan



			Perik nan Budid aya	perika nan Budid aya															kana n		
3	2	5	6	Progra m Pengol ahan Dan Pemas aran Hasil Perika nan	Jumla h Produ ksi Pengol ahan Hasil Perika nan															Dina s Peri kana n	
				Meningkatnya Ketahanan dan Keberagaman Konsumsi Pangan	Score Pola Panga n Harap an	78, 05	78,05	1.150. 000.00 0	80,00	3.680. 000.00 0	82,00	3.795. 000.00 0	83,00	4.335. 000.00 0	84,10	4.600. 000.00 0	85,10	4.730. 000.00 0	85,10	22.290. 000.00 0	
2	9	2		Progra m Pengel olaan Sumbe r Daya Ekono	Jumla h Keters ediaan panga n	26. 69 4 ton	20.000 ton	50.000 .000	20.500 ton	830.00 0.000	21.000 ton	950.00 0.000	21.500 ton	1.030. 000.00 0	22.000 ton	1.100. 000.00 0	22.500 ton	1.000. 000.00 0	22.500 ton	4.960.0 00.000	Dina s Pang an



			mi Untuk Kedau latan Dan Kema ndiria n Panga n	utama (beras)																
2	9	3	Progra m Pening katan Divers ifikasi Dan Ketah anan Panga n Masya rakat	Penca paian skor Pola Panga n Harap an (PPH) Persen tase Pengu atan cadang an panga n	78, 05	78,05	80,00	82,00	83,00	84,10	86,00	86,00	950.00 0.000	2.350. 000.00	2.320. 000.00	2.680. 000.00	2.850. 000.00	3.080. 000.00	14.230. 000.00	Dina s Pang an
					50 %	60%	80%	90%	100%	100%	100%	100%								



2	9	4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Presensi Penanganan Daerah Rawan Pangan	40,15%	45%	150.000.000	50%	500.000.000	60%	525.000.000	60%	625.000.000	60%	650.000.000	60%	650.000.000	60%	3.100.000.000	Dinas Pangan
Misi 3: Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil dan berwawasan lingkungan							517.084.990.505		583.895.030.540		648.645.000.263		801.403.895.000		755.741.018.750		843.279.934.061		4.150.049.869.119	
Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah			Indeks Gini	0,300	0,3000	509.351.970.124	0,3000	575.841.517.744	0,29	639.634.600.263	0,29	791.851.770.000	0,29	745.385.932.500	0,28	832.860.538.499	0,28	4.094.926.329.130		
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar			Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	65,50	66,00	469.892.970.124	66,50	511.067.517.744	67,00	575.270.600.263	67,50	658.657.520.000	68,00	675.304.520.000	68,50	751.106.546.000	68,50	3.641.299.674.131		



Capaian akses Air Minum Jaringan Perpipaan	9,70%	10,20%	10,70%	11,20%	11,70%	12,70%	13,70%	13,70%
	73,28	79,00	83,00	86,00	90,00	93,00	97,00	97,00
Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	19,00%	7,00%	13,00%	21,00%	23,00%	25,00%	30,00%	30,00%
Persentase	99,54	99,59	99,64	99,69	99,74	99,84	99,94	99,94



				rumah tangga pengguna listrik																
				Rasio rumah layak huni	0.195	0.195		0.196		0.197		0.198		0.199		0.20		0.20		
1	3	2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	19,10%	7,19%	44.177.000.00	13,09%	55.700.000.00	21,25%	61.600.000.00	22,97%	67.300.000.00	24,95%	72.500.000.00	29,76%	79.570.000.00	32,61%	380.847.000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	3	Program Pengelolaan Dan Pengeimbangan	Persentase penduduk berakses air minum	73%	79%	144.808.148.260	83%	150.140.454.840	86%	164.262.520.000	90%	172.462.520.000	93%	131.862.520.000	97%	167.862.846.000	97%	931.399.009.100	Dinas Pekerjaan Umum dan



			an Sistem Penye diaan Air Minu m	Propor si rumah tangga denga n akses berkel anjuta n terhad ap air minum layak, perkot aan dan perdes aan	71 %	77%	80%	83%	87%	89%	94%	94%							Pena taan Rua ng	
1	3	6	Progra m Pengel olaan Dan Penge mbang an	Persen tase draina se dalam kondis i baik/ pembu	40, 0%	15,0%	20.467 .000.0 00	19,0%	13.100 .000.0 00	37,0%	16.100 .000.0 00	38,0%	16.100 .000.0 00	39,0%	13.100 .000.0 00	40,0%	22.100 .000.0 00	40,0%	100.96 7.000.0 00	Dina s Peke rjaan Umum dan Penu



			Sistem Drainase	angan aliran air tidak tersumbat															taan Ruang	
1	3	8	Program Penataan Bangunan Gedung	Jumlah Infrastruktur Bangunan Gedung yang terbandingkan dan ditingkatkan	66 unit	71	43.400.000	78	54.350.000	85	64.350.000	92	74.350.000	99	84.350.000	106	94.350.000	106	415.150.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	0	Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam	66	66	205.064.020.864	66,5	213.260.173.592	67	244.616.190.951	67,5	303.300.000.000	68	342.300.000.000	68,5	350.800.000.000	68,5	1.659.340.385.407	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



				kondisi baik																taan Ruang
1	4	2	Program Peningkatan Perumahan	Rasio rumah layak huni	0.195	75.000.000	0.196	1.650.000.000	0.197	2.050.000.000	0.198	1.900.000.000	0.199	4.500.000.000	0.200	6.900.000.000	0,20	17.075.000.000		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	3	Program Kawasan Perumahan	Persentase luasan permukiman di kawasan perkotaan	79%	2.366.801.000	88%	1.950.000.000	91%	1.175.000.000	93,86%	675.000.000	97%	675.000.000	100%	575.000.000	100%	7.416.801.000		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Persentase	0,14%		0,11%		0,08%		0,05%		0,03%		0,00%		0,00%			



				lingku ngan pemuk iman kumuh																
1	4	4	Progra m Perum ahan Dan Kawas an Permu kiman Kumu h	Cakup an keterse diaan rumah layak huni	90, 11 %	90,35 %	410.00 0.000	90,90 %	450.00 0.000	91,17 %	900.00 0.000	91,45 %	900.00 0.000	91,72 %	500.00 0.000	91,72 %	500.00 0.000	91,72 %	3.660.0 00.000	Dina s Peru mah an dan Kaw asan Per muk iman
1	4	5	Progra m Pening katan Prasar ana, Sarana Dan Utilita s	Cakup an Lingk ungan Yang Sehat dan Aman yang diduku ng	46, 4	52,0	9.125. 000.00 0	61,3	7.650. 000.00 0	71,0	7.900. 000.00 0	80,7	8.670. 000.00 0	90,3	9.517. 000.00 0	100,0	10.448 .700.0 00	100,00	53.310. 700.00 0	Dina s Peru mah an dan Kaw asan Per muk iman



			Umum (PSU)	denga n PSU																	
2	1	0	5	Program Penyel esaian Ganti Kerugi an Dan Santun an Tanah Untuk Pemba nguna n	Penyel esaian Kasus ganti rugi dan santun an Tanah			100%	12.816 .889.3 12	100%	12.316 .889.3 12	100%	13.000 .000.0 00	100%	16.000 .000.0 00	100%	18.000 .000.0 00	100	72.133. 778.62 4	Dina s Pert anah an	
				Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Rasio Konek tivitas antar wilaya h di kabup aten	39	50	39.459 .000.0 00	55,00	64.774 .000.0 00	60,00	64.364 .000.0 00	65,00	133.19 4.250. 000	70,00	70.081 .412.5 00	75,00	81.753 .992.4 99	75,00	453.62 6.654.9 99	
				Indeks SPBE	1,3 0	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	1,6	1,6									



2	1	2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Lalan (LLA)	Rasio konektivitas antar wilayah di Kabupaten	39	50	11.429.000.000	55	17.299.000.000	60	14.474.000.000	65	16.501.000.000	70	24.301.000.000	75	32.101.000.000	75	116.105.000.000	Dinas Perhubungan
2	1	3	Program Pengolaan Pelayaran	Jumlah pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang dibangun	57	2	28.030.000.000	2	41.675.000.000	2	40.325.000.000	2	106.950.000.000	2	37.050.000.000	2	40.755.000.000	12	294.785.000.000	Dinas Perhubungan



2	1	2	6	Program Aplikasi Informatika	Indeks SPBE	1,3		1,3	5.800.000.000	1,4	9.565.000.000	1,4	9.743.250.000	1,5	8.730.412.500	1,6	8.897.992.499	1,6	42.736.654.999	Dinas Komunikasi dan Informatika
Meningkatkan Fungsi Ekologi Lingkungan Hidup					Penurunan Gas Emisi Rumah Kaca	416,564	403,903	7.733.020.381	391,466	8.053.379,179	9.010.400.000	366,998	9.552.125.000	354,906	10.355.086.250	342,901	10.419.395.562	342,901	55.123.539.989	
Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup					Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air	56,19	56,29	7.733.020.381	56,39	8.053.512.796	9.010.400.000	56,59	9.552.125.000	56,69	10.355.086.250	56,79	10.419.395.562	56,79	55.123.539.989	
					Indeks Kualitas Tutupan Lahan	85,87	85,97		86,07			86,27		86,37	86,47			86,47		



				Hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara	89,78	89,79		89,79		89,80		89,80		89,81		89,81		89,81		
2	1	3	Program Pengendalian	Terjaganya kualitas lingkungan hidup	2,38	90%	514.506.735	90%	994.999.150	90%	1.071.700.000	90%	1.149.025.000	90%	1.236.886.250	90%	1.285.395.562	90%	6.252.512.697	Dinas Lingkungan
			Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup																	Hidup dan Kebersihan
2	1	5	Program Pengendalian	Jumlah B3 dan Limba	2,38	90%	74.993.000	90%	74.993.000	90%	78.700.000	90%	82.600.000	90%	86.700.000	90%	91.000.000	90%	488.986.000	Dinas Lingkungan



			n h B3 Bahannya yang Berba tertang haya ani Dan Berac un (B3) Dan Limba h Bahan Berba haya Dan Berac un (Limb ah B3)																	an Hidu p dan Keb ersih an
2	1	1	Progra m Pengel olaan Pera mpaha n	Terkel olanya sampa h	97, 58	90%	7.143. 520.64 6	90%	6.983. 520.64 6	90%	7.860. 000.00 0	90%	8.320. 500.00 0	90%	9.031. 500.00 0	90%	9.043. 000.00 0	90%	48.382. 041.29 2	Dina s Ling kung an Hidu p dan



																		Keb ersih an
Misi 4: Meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel				325.32 5.606. 784		358.80 9.749. 829		378.61 9.185. 802		422.76 2.077. 753		508.33 3.093. 763		524.96 3.940. 682		2.512.8 40.701. 517		
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas KKN	Indeks Reformasi Birokrasi		B	325.32 5.606. 784	B	358.80 9.749. 829	A	378.61 9.185. 802	A	422.76 2.077. 753	A	508.33 3.093. 763	A	524.96 3.940. 682	A	2.512.8 40.701. 517		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Opini BPK	WTP	WTP	317.78 6.283. 288	WTP	346.44 4.589. 364	WTP	355.28 8.045. 194	WTP	400.08 4.974. 616	WTP	481.35 2.681. 816	WTP	497.89 8.879. 917	WTP	2.398.8 55.454. 194		
	Nilai/Predikat AKIP	B (63,50)	B (64)		B (65)		B (67)		B (68)		B (70)		BB (72)		BB (72)			
	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	sangat tinggi	Tinggi		Tinggi		Tinggi		Tinggi		Tinggi		Tinggi		Tinggi		Tinggi	



				h kab. Berau															
5	2	2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
				Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	278.34 0.781. 180	Tepat Waktu	289.93 2.000. 000	Tepat Waktu	291.02 2.000. 000	Tepat Waktu	325.62 4.950. 943	Tepat Waktu	393.05 3.541. 132	Tepat Waktu	393.29 4.849. 358	1.971.2 68.122. 613	
				Persentase SILPA terhadap APBD	25, 93	21,04		20		20		19		19		18		18	
5	2	3	Program Pengelolaan Baran	Presentase Aset yang terdata	80 %	100%	1.244. 340.48 8	100%	4.145. 342.30 0	100%	4.345. 342.30 0	100%	4.545. 342.30 0	100%	4.695. 342.30 0	100%	4.845. 342.30 0	23.821. 051.98 8	Badan Pengelolaan



				apusan aset																
5	2	4	Program Pengeluaran Pendapatan Daerah yang terealisasi	Kontribusi PAD dalam APBD	10.01%	10,50%	2.865.190.548	10,50%	3.724.724.712	11%	4.842.172.026	11%	6.294.823.634	11,5%	8.183.270.724	12%	10.638.251.941	12%	36.548.433.585	Badan Pendapatan Daerah
				Persentase target penerimaan pajak daerah yang terealisasi	100%	100%	2.865.190.548	100%	3.724.724.712	100%	4.842.172.026	100%	6.294.823.634	100%	8.183.270.724	100%	10.638.251.941	100%	36.548.433.585	
5	2	2	Program Pengeluaran Keuangan Daerah	Terkelolanya Keuangan Daerah		1.902.840.100	1.952.000.000	'1.882.328.900	2.147.200.000	'1.931.129.900	2.361.920.000	'2.155.129.900	2.598.112.000	'2.284.629.900	2.857.923.200	'2.322.129.900	3.143.715.520	'2.322.129.900	15.060.870.720	Badan Pendapatan Daerah
5	1	2	Program	Presentase	100%	2.649.	100%	1.920.	100%	1.920.	100%	1.920.	100%	1.920.	100%	1.920.	100%	1.920.	12.249.	Badan



			Perencanaan, Peningkatan Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	konsistensi program RPJM D dan RKPD			999.770		000.000		000.000		000.000		000.000		000.000		999.770	Pereanaan, Penelitian dan Pengembangan
5	1	3	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rata-rata capaian kinerja program pembangunan	100%	100%	2.509.998,8	100%	3.129.500,00	100%	3.129.500,00	100%	3.129.500,00	100%	3.129.500,00	100%	3.129.500,00	100%	18.157.498,8	Badan Pereanaan, Penelitian dan Pengembangan



6	1	2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Temuan	80%	80%	2.063.156.500	80%	5.821.290.140	80%	7.567.677.182	85%	9.837.980.337	85%	12.789.374.438	85%	16.626.186.769	85%	54.705.665.365	Inspektorat
6	1	3	Program Perumusan Kebijakan, Penda mping an Dan Asiste nsi	Presen tase Cakup an Perum usan Kebija kan, Kebija kan Penda mping an dan Asiste nsi	80%	80%	1.944.177.850	80%	4.084.847.200	80%	5.310.301.360	80%	6.903.391.768	85%	8.974.409.298	85%	11.666.732.088	85%	38.883.859.564	Inspektorat
4	2	2	Program Dukun gan Pelaksa naan Tugas	Prosen tase Pening katan Dukun gan Pelaks	90%	100	19.801.449.316	100	25.664.960.300	100	27.546.960.300	100	30.236.050.000	100	34.566.050.000	100	38.696.050.000	100	176.511.519.916	Sekretariat Dewan Perwakilan



			Dan Fungsi DPRD	anaan Tugas dan Fungsi DPRD															lan Rakyat Daerah
4	1	4	Program Administrasi Umum	Persentase Tertatanya Administrasi Umum	80%	1.470.000.000												1.470.000.000	Sekretariat daerah
2	1	2	Program Penataan Desa	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	5000%	79.998.100	65	2.150.000.000	70	2.400.000.000	75	2.700.000.000	80	3.000.000.000	90	3.300.000.000	90	13.629.998.100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
																			dan Kampung



Meningkatkan pelayanan penyediaan	nya kualitas publik dan saraan daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	A (89,36)	A (89,66)	7.539.323.496	A (90,12)	12.365.160.465	A (92,16)	23.331.140.608	A (94,06)	22.677.103.138	A (96,26)	26.980.411.947	A (98)	27.065.060.766	A (98)	113.985.247.323		
5	3	2	Program Kepegawaian Daerah	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	10	4.114.963.912	12	1.978.596.500	15	9.276.777.206	18	9.004.819.900	20	10.053.888.240	25	10.058.888.240	25	44.487.933.998	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5	4	2	Program Pengembangan Sumber Daya	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan			993 Orang	5.614.506.000	993 Orang	6.175.956.600	1000 orang	6.793.552.260	1000 orang	7.472.907.486	1000 orang	8.220.198.235	5979 Orang	34.277.120.581	Badan Kepegawaian, Pendidikan



			Manusia	an SDM														n dan Pelatihan		
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kecamatan															Kecamatan	
						207.00 0.000		105.40 0.000		421.39 5.040		430.44 5.040		488.80 0.040		505.07 4.540		1.683.1 04.160		
7	1	6	Program Pembiayaan Dan Penguasaan Pemer	Tingkat Cakupan pembiayaan dan penguasaan	10 0%	100%	557.37 3.000	100%	676.65 7.965	100%	1.167. 011.76 2	100%	988.28 5.938	100%	1.114. 816.18 1	100%	1.130. 899.75 1	100%	137.10 2.000	Kecamatan



			intaha n Desa	pemeri ntahan desa																			
2	1	3	4	Program Admin istrasi Pemer intaha n Desa	Persen tase desa mandir i	80 0%	9		10		11		12		13		14		14				
					Persen tase desa maju	31 00 %	41		50		54		58		62		71		71				
					Persen tase desa berke mbang	60 0%	49	2.659. 986.58 4		40	3.990. 000.00 0		35	6.290. 000.00 0		30	5.460. 000.00 0		25	7.850. 000.00 0		15	7.150. 000.00 0
					Persen tase desa terting gal	10 0%	1		0		0		0		0		0		0		0		0
TOTAL ANGGARAN PENCAPAIAN MISI							1.318. 402.82 5.478		1.646. 459.58 4.275		1.797. 748.75 6.633		2.498. 918.99 1.424		2.095. 449.32 5.621		2.254. 218.09 7.289		11.424. 471.69 1.024				

Sumber Data:RPJMD Kabupaten Berau 2021-2026



d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan.

Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2024 pada table berikut:

Tabel 1.13

Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Berau Tahun 2024

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	2024		Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Misi 1. Meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia yang cerdas, sejahtera dan berbudi luhur				1.133.566.174.902		3.961.761.892.550	
	Mewujudkan Masyarakat Berau yang berdaya saing	Indek Pembangunan Manusia	74,71	75,89	1.133.566.174.902	76,69	3.961.761.892.550	
	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13,32	14,47	270.165.892.650	14,83	1.421.965.526.550	
		Rata-rata Lama Sekolah	09,52	9,98		10,26		
		Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	75,14	79,35		81,54		
		Angka partisipasi kasar SD/MI	104,29	108,52		110,71		
		Angka partisipasi kasar SMP/MTS	95,82	99,71		100,00		
		Angka Partisipasi Murni SD/MI	95,79	97,37		98,17		



Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	2024		Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
		Angka Partisipasi Murni SMP/MTS	76,53	84,15		88,24				
		Angka partisipasi sekolah SD/MI	100,34	104,41		106,51				
1	1	2	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka partisipasi sekolah SMP/MTS	91.85	95,58	265.605.767.650	97,50	1.396.801.007.487	Dinas Pendidikan
				Angka Putus Sekolah SD/MI	0,02	0,00		0,00		
				Angka Putus Sekolah SMP/MTS	0,03	0,00		0,00		
				Angka Kelulusan	-	-		-		
				Angka Kelulusan SD/MI	100	100,00		100,00		
				Angka Kelulusan SMP/MTs	100	100,00		100,00		
				Angka Melanjutkan Sekolah SD ke SMP	105.59.00	100,00		100,00		
				Angka melek huruf	99,42	99,56		99,64		
				Sekolah dalam kondisi bangunan baik	65	79,01		87,11		
1	1	4	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV			4.560.125.000		25.164.519.063	Dinas Pendidikan



Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	2024		Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
		PAUD	33,13	34,48		35,17				
		SD	76,36	79,46		81,06				
		SMP	94,38	98,21		100,00				
		Rasio murid/guru sekolah	-	-		-				
		Rasio murid/guru SD Negeri	15,00	15,00		15,00				
		Rasio murid/guru SD Swasta	15,19	15,19		15,19				
		Rasio murid/guru SMP Negeri	13,36	13,36		13,36				
		Rasio murid/guru SMP Swasta	12,76	12,76		12,76				
		Rasio guru/murid per kelas rata-rata								
	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan kesehatan	Angka Harapan Hidup (Tahun)	72,06	72,49	863.400.282.252	72,71	2.539.796.366.000			
		Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	9.30%	66.60%		100,00				
1	2	2	Program Pemenuhan Upaya	Persentase balita gizi kurang	7,30	7,80	723.210.957.928	7,80	1.736.011.743.359	Dinas Kesehatan



Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	2024		Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	22,00	18,00		18,00		
		Jumlah kematian ibu melahirkan	8,00	8,00		7,00		
		Angka kematian anak balita	15,00	15,00				
		Persentase desa/kelurahan dengan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) /ODF	30,00	95,00		100,00		
		Persentase Pemenuhan Kualitas Kesehatan Lingkungan	60,00	80,00		85,00		
		Persentase penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) / Wabah < 24 jam	100,00	100,00		100,00		
			Cakupan Desa/kelurahan (%) Universal Child Immunization (UCI)	59,00	110,00		85,00	
		Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	94,00	95,00		95,00		



Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	2024		Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		presentasi unit kerja melaksanakan upaya kesehatan terhadap PTM sesuai standar	100,00	100,00		100,00		
		Persentase Imunisasi Dasar lengkap	87,90	95,00		95,00		
		Persentase Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan	79,00	95,00		100,00		
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100,00	100,00		100,00		
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	0,84	0,46		0,85		
		Angka kejadian Malaria	0,00	< 1		< 1		
		Cakupan Pelayanan kesehatan ibu hamil	100,00	100,00		100,00		
		Cakupan Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100,00	100,00		100,00		
		Cakupan Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100,00	100,00		100,00		



Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	2024		Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Cakupan Pelayanan kesehatan balita	100,00	100,00		100,00		
		Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100,00	100,00		100,00		
		Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100,00	100,00		100,00		
		Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100,00	100,00		100,00		
		Cakupan Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100,00	100,00		100,00		
		Cakupan Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100,00	100,00		100,00		
		Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100,00	100,00		100,00		
		Cakupan Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	100,00	100,00		100,00		



Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	2024		Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
		Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	100,00	100,00		100,00			
1	2	3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Presentase tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan	79,00	100,00	12.100.594.000	100,00	63.169.179.896	Dinas Kesehatan
			Jumlah Kebutuhan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	80,00	100,00		100,00		
			Jumlah Tenaga Dokter Umum dan Dokter Gigi	103,00	135,00				
			Jumlah Tenaga Bidan	303,00	330,00				
			Jumlah Tenaga Perawat	584,00	645,00				
1	2	4 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Cakupan Sarana Pelayanan Kefarmasian yang sesuai standar	100,00	100,00	1.831.184.000	100,00	10.622.698.000	Dinas Kesehatan
			Persentase TPM yang memenuhi syarat Kesehatan	65,65	80,00		85,00		
			Persentase IRTP Yang	57,14	75,00		85,00		



Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	2024		Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
		dilakukan Pengawasan Memenuhi Syarat							
1	2	5 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Desa/kelurahan 3,80	59,00 3,80	95,00 55,00	1.615.950.000	95,00 55,00	8.295.494.500	Dinas Kesehatan
		Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) / Wabah ditanggulangi kurang dari 24 jam	100,00	100,00			100,00		
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP di Wilayah Kabupaten	100,00	100,00	122.661.328.771	100,00	711.049.567.904	RSUD dr. Abdul Rivai
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan dan Mutu Tenaga Teknis Kesehatan Rumah Sakit	100,00	100,00	661.267.553	100,00	3.833.270.132	RSUD dr. Abdul Rivai
2	14	4 Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15- 19) per 1.000 perempuan usia	19 per 1000 kelahiran	15 per 1000 kelahiran	1.319.000.000	13 per 1000 kelahiran	6.814.412.210	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdaya



Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	2024		Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
	Sejahtera (KS)	15-19 tahun (ASFR 15-19)						an Perempuan dan Perlindungan Anak		
	Misi 2: Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sektor hilir sumber daya alam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangan kerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal				141.186.843.768		799.819.227.838			
	Meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat yang mantap dan berdaya saing	Laju Pertumbuhan ekonomi	-3,35	4,29	74.351.843.768	5,29	422.730.936.972			
	Menurunnya angka pengangguran di Kab. Berau	Tingkat Pengangguran terbuka	5,08	4,62	5.538.200.000	09,50	28.541.513.818			
2	7	3	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Presentase Angkatan Kerja Lokal yang berkompeten	70	75	1.476.200.000	80	8.142.293.818	Dinas Tenaga Kerja dan T ransmigrasi
2	7	4	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Lokal yang ditempatkan	20	30	3.314.000.000	35	16.368.340.000	Dinas Tenaga Kerja dan T ransmigrasi
2	7	5	Program Hubungan Industrial	Persentase Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	100	100	748.000.000	100	4.030.880.000	Dinas Tenaga Kerja dan T ransmigrasi
	Menurunnya Angka Kemiskinan		Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	5,19	4,95	68.813.643.768	4,84	394.189.423.154		



Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	2024		Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	6	2	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tertangani					
					100	3.750.000.000	100	14.045.000.000	Dinas Sosial
1	6	4	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase terlaksananya kegiatan pelayanan dan rehabilitasi					
					100	2.730.000.000	100	14.674.000.000	Dinas Sosial
				Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial			100		
				Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial			100		
1	6	5	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase masyarakat yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial					
					100%	395.000.000	100%	1.945.000.000	Dinas Sosial
2	13	5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga Adat, Dan	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	TAD				
					120	4.600.000.000	160	24.764.998.909	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
				Persentase LPM Berprestasi	TAD				
					100		100		
				Persentase PKK aktif	100		100		



Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	2024		Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
	Masyarakat Hukum Adat	Persentase Posyandu aktif	26,4	100		100				
		Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	TAD	25		35				
4	1	2 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Presentase meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kab. Berau	100	100	2.500.000.000	100	13.598.800.000	Bagian Tata Pemerintahan	
			Persentase Meningkatnya kualitas dan pendalaman agama, mental Spritual dan capaian kinerja sosial serta masyarakat	100	100	32.450.000.000	100	192.098.000.000	Bagian Kesra	
			Prosentase pelayanan bidang hukum dan kerjasama yang terfasilitasi & terkoordinir.		95	2.099.300.000	98	11.454.683.000	Bagian Hukum dan Perundangundangan	
7	1	3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	100	100	20.289.343.768	100	121.608.941.245	Kecamatan	
			Meningkatkan pendapatan masyarakat	PDRB Per Kapita (Juta)	148,90	159,35	66.835.000.000	164,85	377.088.290.866	



Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	2024		Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
	melalui program ekonomi kerakyatan	Rp)								
	Meningkatnya Industri Kecil Dan menengah (IKM)	Presentase Usaha mikro dan kecil	24	2	2.460.000.000	40	14.040.000.000			
2	17	7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM Aktif	45	4	630.000.000	70	4.110.000.000	Dinas Koperasi, Perindustria n dan Perdagangan
2	17	8	Program Pengembangan UMKM	Jumlah UMKM Naik Kelas	3000 UMKM	15 UKM	250.000.000	25 UKM	1.390.000.000	Dinas Koperasi, Perindustria n dan Perdagangan
3	30	2	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Jumlah SKA yang diterbitkan	250 SKA	180 SKA	200.000.000	1220 SKA	1.040.000.000	Dinas Koperasi, Perindustria n dan Perdagangan
3	30	3	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar yang dikelola	2 Pasar	4 Pasar	500.000.000	4 pasar	2.750.000.000	Dinas Koperasi, Perindustria n dan Perdagangan
3	30	7	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Sistem Jaringan Informasi Perdagangan	12 Laporan	12 Laporan	80.000.000	12 Laporan	450.000.000	Dinas Koperasi, Perindustria n dan Perdagangan
3	30	4	Program Stabilisasi Harga Barang	Presentase perkembangan Harga Kebutuhan Pokok	0.2%	0.2%	800.000.000	0,01	4.300.000.000	Dinas Koperasi, Perindustria n dan



Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	2024		Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	dan Bahan Penting						Perdagangan	
	Terwujudnya pengembangan Pariwisata berbasis sustainable tourism	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB		0,041666667	21.695.000.000	0,04375	116.053.734.986		
3	26	2 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Wisatawan	127396 Orang	236141 Orang	12.845.000.000	270355 Orang	70.513.736.012	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Lama kunjungan Wisata	2 Hari	4 Hari		4 Hari		
3	26	3 Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Destinasi Wisata Yang Dipasarkan	5 Destinasi	7 Destinasi	3.050.000.000	8 Destinasi	15.639.999.774	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	26	5 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Usaha Berbasis Ekonomi Kreatif Unggulan	30 orang	90 orang	2.300.000.000	150 orang	11.614.999.800	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22	2 Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	4 Event	7 Event	3.500.000.000	7 Event	18.284.999.400	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Menigkatnya Produksi Sektor Primer	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	11,64	11,94	38.345.000.000	12,09	224.704.555.880	
3	27	2 Program Penyediaan	Produksi Komoditas	Ton	2385000	1.754.500.000	1520000	9.556.381.174	Dinas Perkebunan



Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	2024		Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
	Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Perkebunan (Ton)		0		0				
		Kelapa Dalam	3,483	8,371		9980				
		Kakao	788	1700		2100				
		Karet	82	300		515				
		Lada	827	1340		1500				
3	27	3	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas Kebun yang dikembangkan		100	1.750.000.000	100	9.494.996.760	Dinas Perkebunan
3	27	5	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Luas ANKT di lokasi Usaha Perkebunan yang dikelola/ dibina (Hektar)	3000	10000	2.525.000.000	15000	12.556.283.916	Dinas Perkebunan
3	27	6	Program Perizinan Usaha Pertanian	Jumlah Penerapan Ijin Usaha yang dibina dan diawasi	15	20	550.000.000	130	3.024.991.800	Dinas Perkebunan
3	27	7	Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan petani yang mendapatkan pelatihan /pembinaan	30 Kelompok Tani	10 Kelompok Tani	1.275.000.000	60 Kelompok Tani	6.623.714.800	Dinas Perkebunan
3	27	2	Program Penyediaan Dan Pengembangan	Produktivitas Padi (Padi Sawah dan Padi Ladang)	3	3,37	10.920.000.000	3,62	71.231.398.494	Dinas Pertanian dan Peternakan



Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	2024		Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	Sarana Pertanian	Produktivitas Jagung	5	5,85		6			
		Produktivitas Cabai (Besar, Keriting, dan Rawit)	4	4,02		4,25			
		Produksi Daging Sapi	470	479,47		484,28			
		Produksi Telur Ayam Ras	1753	1973,02		2093,17			
3	27	3 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan Pemanfaatan Luas Lahan	230	450	2.393.000.000	550	18.600.473.232	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	5 Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Tingkat Cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	312	4000	2.477.500.000	5000	13.642.799.800	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	6 Program Perizinan Usaha Pertanian	Jumlah Rekomendasi izin usaha pertanian dan peternakan yang difasilitasi		42	1.525.000.000	45	7.841.376.200	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	7 Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan bina kelompok petani	83	87	2.750.000.000	89	10.578.875.088	Dinas Pertanian dan
3	25	3 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi perikanan Tangkap	20448,98 ton	25569,53	7.275.000.000	27126,71	42.859.479.788	Dinas Perikanan
3	25	4 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi perikanan Budidaya		2,452.01 ton	1.650.000.000	2,501.30 ton	11.463.784.828	Dinas Perikanan



Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	2024		Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
3	25	6	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan		4,759.53 ton	1.500.000.000	5,049.39 ton	7.230.000.000	Dinas Perikanan
Meningkatnya Ketahanan dan Keberagaman Konsumsi Pangan			Score Pola Pangan Harapan	78,05	83,00	4.335.000.000	85,10	22.290.000.000		
2	9	2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Jumlah Ketersediaan pangan utama (beras)	26694 ton	21500 ton	1.030.000.000	22500	4.960.000.000	Dinas Pangan
2	9	3	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	78,05	83	2.680.000.000	86	14.230.000.000	Dinas Pangan
				Persentase Penguatan cadangan pangan	50	100		100		
2	9	4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Presentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	40,15	60	625.000.000	60	3.100.000.000	Dinas Pangan
Misi 3: Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil dan berwawasan lingkungan							801.403.895.000		4.150.049.869.119	
Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah			Indeks Gini	0,300	0,290	791.851.770.000	0,280	4.094.926.329.130		



Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	2024		Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	65,50	67,50	658.657.520.000	68,50	3.641.299.674.131		
		Capaian akses Air Minum Jaringan Perpipaan	9.70%	80,00		13.70%			
		Capaian Akses Air Minum Layak	73,28	90,00		97,00			
		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	19.00%	22.97%		30.00%			
		Persentase rumah tangga pengguna listrik	99,54	99.74		99.94			
		Rasio rumah layak huni	0,195	0,198		0,200			
1	3	2 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	19.10%	22.97%	67.300.000.000	32.61%	380.847.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	3 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk berakses air minum	73	90	172.462.520.000	97	931.399.009.100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	71	87		94		
1	3	6 Program Pengelolaan	Persentase drainase dalam	40	38	16.100.000.000	40.0%	100.967.000.000	Dinas Pekerjaan Umum



Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	2024		Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	Dan Pengembangan Sistem Drainase	kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat						dan Penataan Ruang	
1	3	8 Program Penataan Bangunan Gedung	Jumlah Infrastruktur Bangunan Gedung yang terbangun dan ditingkatkan	66 unit	92	74.350.000.000	106	415.150.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10 Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	66	67,5	303.300.000.000	68,5	1.659.340.385.407	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	4	2 Program Pengembangan Perumahan	Rasio rumah layak huni	0,195	0,198	1.900.000.000	0,200	17.075.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	3 Program Kawasan Permukiman	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	79%	93.86%	675.000.000	100%	7.416.801.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Persentase lingkungan pemukiman kumuh	0.14%	0.05%		0.00%		
1	4	4 Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	90.11%	91.45%	900.000.000	91.72%	3.660.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	5 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	46,4	80,7	8.670.000.000	100,0	53.310.700.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman



Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	2024		Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
2	10	5	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian Kasus ganti rugi dan santunan Tanah		100%	13.000.000.000	100	72.133.778.624	Dinas Pertanahan
Meningkatnya konektivitas antar wilayah		Rasio Konektivitas antar wilayah di kabupaten	39	65	133.194.250.000	75	453.626.654.999			
		Indeks SPBE	1,30	1,4		1,6				
2	15	2	Program Penyelenggaraa n Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio konektivitas antar wilayah di Kabupaten	39	65	16.501.000.000	75	116.105.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	3	Program Pengelolaan Pelayaran	Jumlah pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang dibangun	57	2	106.950.000.000	12	294.785.000.000	Dinas Perhubungan
2	16	2	Program Aplikasi Informatika	Indeks SPBE		1,4	9.743.250.000	1,6	42.736.654.999	Dinas Komunikasi dan Informatika
Meningkatkan Fungsi Ekologi Lingkungan Hidup		Penurunan Gas Emisi Rumah Kaca	416.564	366.998	9.552.125.000	342.901	55.123.539.989			
Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup		Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air	56,19	56,59	9.552.125.000	56,79	55.123.539.989			
		Indeks Kualitas Tutupan	85,87	86,27		86,47				



Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	2024		Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
		Lahan								
		Hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara	89,78	89,8		89.81				
2	11	3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Terjaganya kualitas lingkungan hidup	2,38	90%	1.149.025.000	90%	6.252.512.697	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Jumlah B3 dan Limbah B3 yang tertangani	2,38	90%	82.600.000	90%	488.986.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	1	Program Pengelolaan Persampahan	Terkelolanya sampah	97,58	100%	8.320.500.000	100%	48.382.041.292	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Misi 4: Meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel						422.762.077.753		2.512.840.701.517		
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas KKN		Indeks Reformasi Birokrasi			A	422.762.077.753	A	2.512.840.701.517		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja		Opini BPK	WTP		WTP	400.084.974.616	WTP	2.398.855.454.194		



Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	2024		Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
	dan keuangan daerah	Nilai/Predikat AKIP	B (63,50)	B (68)		BB (72)				
		Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kab. Berau	sangat tinggi	Tinggi		Tinggi				
5	2	2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	325.624.950.943	WTP	1.971.268.122.613	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
				Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu		
				Persentase SILPA terhadap APBD	25.93	19		18		
5	2	3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Presentase Aset yang terdata dengan baik	80%	100%	4.545.342.300	100%	23.821.051.988	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
				Presentase Aset yang Tercatat dengan baik	80%	100%		100%		
				Presentase Aset yang sudah dinilai	65%	85%		100%		
				Presentase Aset yang termanfaatkan	65%	85%		100%		
				Presentase penghapusan aset	65%	85%		100%		
5	2	4		Kontribusi PAD dalam APBD	10.01%	11%	6.294.823.634	12%	36.548.433.585	Badan Pendapatan Daerah



Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	2024		Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Persentase target penerimaan pajak daerah yang terealisasi	100%	100%	6.294.823.634	100%	36.548.433.585	
5	2	2 Program Pengelolaan Keuangan Daerah		2.155.129.900.000	2.598.112.000	2.322.129.900.000	15.060.870.720	Badan Pendapatan Daerah
5	1	2 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%	100%	1.920.000.000	100%	12.249.999.770	Badan Perencanaan , Penelitian dan Pengembangan
5	1	3 Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	3.129.500.000	100%	18.157.498.988	Badan Perencanaan , Penelitian dan Pengembangan
6	1	2 Program Penyelenggaraan Pengawasan	80%	85%	9.837.980.337	85%	54.705.665.365	Inspektorat
6	1	3 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	80%	80%	6.903.391.768	85%	38.883.859.564	Inspektorat



Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	2024		Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
4	2	2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Prosentase Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	90%	100	30.236.050.000	100	176.511.519.916	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	1	4	Program Administrasi Umum	Persentase Tertatanya Administrasi Umum					1.470.000.000	Sekretariat daerah
2	13	2	Program Penataan Desa	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	5000%	75	2.700.000.000	90	13.629.998.100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar			Indek Kepuasan Masyarakat	A (89,36)	A (94,06)	22.677.103.138	A (98)	113.985.247.323		
5	3	2	Program Kepegawaian Daerah	Nilai Indeks Profesionalitas ASN		18	9.004.819.900	25	44.487.933.998	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5	4	2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan SDM		1000 orang	6.793.552.260	5979 Orang	34.277.120.581	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayana Publik lingkup Kecamatan			430.445.040		1.683.104.160	Kecamatan
7	1	6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan	100%	100%	988.285.938	100%	137.102.000	Kecamatan



Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	2024		Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
		desa							
2	13 4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa mandiri	800%	12	5.460.000.000	14	33.399.986.584	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
		Persentase desa maju	3100%	58	71				
		Persentase desa berkembang	600%	30	15				
		Persentase desa tertinggal	100%	0	0				
TOTAL ANGGARAN PENCAPAIAN MISI						2.498.918.991.424		11.424.471.691.024	

Sumber : RKPD Kabupaten Berau Tahun 2024



1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik yang dapat dijangkau oleh masyarakat, semua aspek/sektor dalam urusan wajib yang dikategorikan sebagai pelayanan dasar harus disusun standar pelayanan minimal (SPM). Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu yang dijadikan sebagai acuan standar kualitas dan kuantitas pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat secara minimal.

Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar. Kebutuhan Dasar Warga Negara meliputi kebutuhan pemenuhan atas barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak. Adapun Jenis Pelayanan Dasar SPM adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Ketentuan terkait penerapan Standar Pelayanan Minimal diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 yang memuat ketentuan tentang jenis dan mutu urusan wajib pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Jenis Pelayanan Dasar yang ditetapkan menurut peraturan pemerintah Pasal 2 tahun 2018 untuk daerah kabupaten/kota terdiri atas:

1. pendidikan anak usia dini;



2. pendidikan dasar;
3. pendidikan kesetaraan;
4. pelayanan kesehatan ibu hamil;
5. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
6. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
7. pelayanan kesehatan balita;
8. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
9. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
10. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
11. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
12. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
13. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
14. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
15. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*);
16. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
17. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
18. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota;
19. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
20. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
21. pelayanan informasi rawan bencana;
22. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
23. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
24. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;



25. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
26. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
27. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
28. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
29. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.



Tabel 1.14

Jenis Pelayanan Dasar, Program, Kegiatan dan Anggaran penerapan SPM Tahun 2024

No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN
URUSAN PENDIDIKAN				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				255,150,694,994
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	46.134	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			99,229,656,672
					1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	4,387,823,399
					5	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	13,527,164,682
					6	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	1,549,931,780
					10	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	579,376,980
					11	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	11,477,550,800
					15	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Peserta didik	4,171,000,000
					16	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	425,636,000
					17	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta didik	250,000,000



No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN
					18	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	15,000,000
					19	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	917,998,600
					20	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	175,000,000
					21	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Satuan Pendidikan	34,886,282,093
					22	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang	1,350,000,000
					27	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	100,000,000
					28	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	90,089,700
					29	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	150,000,000
					30	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	187,000,000
					31	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	75,000,000



No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN
					32	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas	50,000,000
					34	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	200,000,000
					36	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	100,000,000
					37	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	100,000,000
					38	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	14,209,816,139
					40	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	400,000,000
					41	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	599,999,900
					42	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	9,254,986,599
				2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			117,338,220,962
					1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	2,244,994,452
					2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	1,451,925,000



No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN
					3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	1,128,000,000
					4	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	1,124,999,902
					5	Pembangunan Laboratorium	Ruang	3,481,820,654
					8	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	749,998,760
					11	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	9,999,999,775
					12	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	8,789,999,630
					15	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Ruang	449,999,003
					17	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	674,998,975
					21	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	20,049,999,410
					23	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	7,300,613,500
					25	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta didik	20,049,999,410
					27	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	398,475,000
					28	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta didik	403,540,000



No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN
					29	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	30,000,000
					30	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	920,879,600
					31	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	845,880,000
					32	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Satuan Pendidikan	16,373,952,530
					33	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang	899,999,500
					38	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	150,000,000
					39	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	149,999,400
					40	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	150,000,000
					41	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	221,147,000
					43	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas	150,000,000



No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN
					44	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	400,000,000
					47	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	626,999,600
					48	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	17,519,999,861
					49	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	100,000,000
					50	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	100,000,000
					51	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	300,000,000
2	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	7.751	3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			33,297,017,398
					1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit	4,486,069,940
					2	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Unit	916,413,800
					4	Pengadaan Mebel PAUD	Paket	446,260,000



No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN
					6	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Paket	2,081,374,000
					7	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Peserta didik	5,579,309,307
					8	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Paket	380,000,000
					9	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Peserta didik	8,094,997,000
					10	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Orang	35,000,000
					11	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Orang	813,000,000
					12	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidikan	674,999,500
					13	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Satuan Pendidikan	5,209,599,331
					14	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang	400,000,000
					18	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	0
					19	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	45,000,000



No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN
					20	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	235,000,000
					21	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	35,000,000
					23	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas	25,000,000
					28	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Peserta didik	100,000,000
					29	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	50,000,000
					31	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	50,000,000
					33	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	50,000,000
					34	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	2,499,998,760
					35	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	1,089,995,760



No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	1.040	4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			5,285,799,962
					2	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Peserta didik	150,000,000
					3	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Paket	49,999,650
					5	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	320,000,000
					6	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan	199,999,800
					7	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan	1,970,002,112
					8	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Orang	225,200,000
					11	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	30,000,000



No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN
					12	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	30,000,000
					13	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	30,000,000
					14	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	75,000,000
					15	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	50,000,000
					16	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas	5,000,000
					17	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	10,000,000
					22	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	50,000,000
					23	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	100,000,000
					28	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	30,000,000
					32	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Peserta didik	1,960,598,400



No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN
URUSAN KESEHATAN				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				5,443,726,800
				1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			5,443,726,800
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	4995		1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Orang	1,369,380,000
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	4945		2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Orang	986,000,000
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	4666		3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	248,565,100
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	23621		4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Orang	568,468,000
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	49862		5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	190,000,000
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif,	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	159781		6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Orang	100,000,000
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	19021		7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	272,370,200



No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	15499		8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang	50,000,000
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	4010		9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Orang	457,934,900
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	190		10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	180,000,000
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	6211		11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	891,010,600
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	6199		12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang	129,998,000
URUSAN PEKERJAAN UMUM								
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari- hari	8371	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				213,763,577,782



No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN
				1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			213,763,577,782
					23	Peningkatan KapasitasKelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Lembaga	471,000,000
					25	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dokumen	1,300,000,000
					28	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	96,246,967,782
					29	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Unit	9,474,250,000
					32	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	106,271,360,000
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	2045	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				8,756,000,000
				2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota			8,756,000,000
					38	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Unit	283,500,000



No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN
					40	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	8,472,500,000
URUSAN PERUMAHAN RAKYAT				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				303,270,000
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	N/A	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota K2023340			303,270,000
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	5		1	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	303,270,000
URUSAN TRANTIBUMLINMAS								
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara Kabupaten/Kota	10	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)				541,803,400



No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN	
				1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			541,803,400	
					3	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	442,000,000	
					7	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Laporan	99,803,400	
				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)					6,513,948,600
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	11064	4	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			899,727,000	
					1	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	500,000,000	
					2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Orang	399,727,000	



No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN
	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	11064	5	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			2,809,506,900
					2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	Orang	315,000,000
					3	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1,082,253,500
					4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Unit	14,999,900
					16	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kawasan	315,000,000
					17	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Laporan	1,082,253,500
	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	11064	6	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			2,411,305,200
					1	Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas	Laporan	20,000,000



No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN
					2	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	927,036,100
					3	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	749,509,100
					6	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	64,760,000
					8	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan	650,000,000
				7	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			393,409,500
					1	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	75,000,000
					3	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	148,649,500
					10	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Dokumen	169,760,000
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	3200	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)				11,322,239,050



No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN
				8	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota K2023449			10,759,909,050
					1	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	10,149,299,050
					2	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	610,610,000
				9	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			74,760,000
					1	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen	34,880,000
					2	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen	39,880,000
				10	Investigasi Kejadian Kebakaran			10,000,000
					1	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Dokumen	10,000,000
				11	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			477,570,000
					1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang	250,000,000



No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN
					2	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Desa	227,570,000
URUSAN SOSIAL				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				8,476,383,833
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	44	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			8,121,490,283
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	348		1	Penyediaan permakanan	Orang	5,500,000,000
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di luar panti	1000		2	Penyediaan sandang	Orang	124,980,000
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	8		3	Penyediaan alat bantu	Orang	172,281,000



No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN
					4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	179,999,800
					5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	261,322,000
					6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang	1,239,714,000
					9	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang	200,000,000
					10	Pemberian layanan kedaruratan	Orang	283,193,683
					12	Pemberian layanan rujukan	Dokumen	159,999,800
	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten / kota	270	2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			354,893,550
					1	Penyediaan makanan	Orang	74,996,750
					2	Penyediaan sandang	Orang	74,912,000



No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN
					3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	69,989,800
					4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	74,995,000
					5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	60,000,000



BAB II
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Pada tahun Anggaran 2024, Capaian Kinerja Makro pada Kabupaten Berau dapat digambarkan dalam table berikut:

Table II.1
Capaian Kinerja Makro pada Kabupaten Berau TA. 2024

NO	IKK	RUMUS	CAPAIAN KINERJA 2023	CAPAIAN KINERJA 2024	LAJU KINERJA 2024	SATUAN
1	Indeks Pembangunan Manusia	Laju Indeks Pembangunan Manusia	76,71	77,17	0,6	%
2	Angka Kemiskinan	Laju Angka Kemiskinan	5,54	5,08	-8,303	%
3	Angka Pengangguran	Laju Angka Pengangguran	4,95	5,15	4,04	%
4	Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	31570052,94	33868493,43	7,28	%
5	Pendapatan Per-Kapita	Laju Pendapatan Per-Kapita	198,53	194,08	-2,241	%
6	Ketimpangan Pendapatan	Laju Kelimpangan Pendapatan	0,327	0,317	-3,058	%

Sumber Data : BPS Kab. Berau

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah



memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah juga secara teknis disusun dengan berpedoman kepada Surat Direktorat Jenderal Otonomi Daerah 100.2.2.7/10582/OTDA Tanggal 24 Desember 2024 Perihal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024, yang secara rinci di jabarkan sebagai berikut:

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran (*Outcome*)

Table II.2

Indikator Kinerja Kunci Keluaran (*Outcome*)

No.	URUSAN	No.	Indikator Kinerja Kunci (<i>Outcome</i>)	Rumus	Data LPPD 2024	Capaian Kinerja
C.	PENDIDIKAN	1.a.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	8900,00	74,75
				Jumlah anak usia 5-6 tahun pada provinsi bersangkutan	11907,00	
		1.a.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sedang belajar di sekolah dasar	34622,00	96,46
				Jumlah anak usia 7-12 tahun pada provinsi bersangkutan	35892,00	
		1.a.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sedang belajar di sekolah menengah pertama	16140,00	94,14
				Jumlah anak usia 13-15 tahun pada provinsi yang bersangkutan	17145,00	
		1.a.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat/ sedang belajar di pendidikan kesetaraan	797,00	26,01
				Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan	3064,00	



No.	URUSAN	No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Data LPPD 2024	Capaian Kinerja
				menengah pada provinsi yang bersangkutan		
	KESEHA TAN	1.b.1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan di kabupaten/kota	270,00	0,90
				Jumlah penduduk di kabupaten/kota	299005,00	
		1.b.2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS rujukan yang terakreditasi	2,00	100,00
				Jumlah RS di kabupaten/kota	2,00	
		1.b.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	3778,00	72,77
				Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota	5192,00	
		1.b.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	4470,00	86,09
				Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota	5192,00	
		1.b.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	3642,00	83,88
				Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota	4342,00	
		1.b.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	18455,00	71,09
				Jumlah balita di kabupaten/kota	25961,00	
		1.b.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	38151,00	71,93
				Jumlah anak pendidikan dasar di kabupaten/kota	53037,00	
		1.b.8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	78545,00	39,44
				Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota	199170,00	
		1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	11266,00	65,96
				Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di kabupaten/kota	17081,00	
		1.b.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	23482,00	100,00



No.	URUSAN	No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Data LPPD 2024	Capaian Kinerja
				Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota	23482,00	
		1.b.1 1	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	5680,00	100,00
				Jumlah penderita DM di kabupaten/kota	5680,00	
		1.b.1 2	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	230,00	100,00
				Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota	230,00	
		1.b.1 3	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	6782,00	100,00
				Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota	6782,00	
		1.b.1 4	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	6191,00	99,87
				Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/ kota	6199,00	
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.c.1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kabupaten/kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kabupaten/kota (ha)	0,00	0,00
1,00						
1.c.2		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	Luas kawasan permukiman rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota (ha)	0,00	0,00	
				1,00		
1.c.3		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan yang dibangun (ha) ditingkatkan (ha) dioperasikan dan pelihara (ha)	1278,00	100,00	
				1278,00		
1.c.4		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan	51033,00	83,17	



No.	URUSAN	No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Data LPPD 2024	Capaian Kinerja
				terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota		
				Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut	61359,00	
		1.c.5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya di olah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	56200,00	91,59
				Jumlah rumah di kabupaten/ kota	61359,00	
		1.c.6	Rasio kepatuhan IMB kabupaten/ kota	Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai peruntukannya	199,00	100,00
				Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku	199,00	
		1.c.7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Panjang jalan kewenangan kabupaten/kota yang mantap	1179,72	69,97
				Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten/kota	1686,08	
		1.c.8.1	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga konstruksi yang terlatih di wilayah kab kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/ analis	314,00	100,00
				Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah kabupaten/kota	314,00	
		1.c.8.2	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	985,00	100,00
				jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	985,00	
	PERUMAHAN	1.d.1	Hunian untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2022	0,00	0,00
				jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2021	1,00	



No.	URUSAN	No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Data LPPD 2024	Capaian Kinerja
		1.d.2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan+rumah tangga penerima subsidi uang sewa+rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni	0,00	0,00
				Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima layanan	1,00	
		1.d.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)	2,47	100,00
				Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	2,47	
		1.d.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni	4279,00	7,58
				Jumlah total unit rumah kabupaten/kota	56431,00	
		1.d.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	2378,00	40,44
				Jumlah unit rumah kabupaten/kota	5881,00	
	TRANSTI BUMLIN MAS	1.e.1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani	10,00	100,00
				Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	10,00	
		1.e.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan	4,00	100,00
				Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	4,00	
		1.e.3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	229842,00	86,15
				Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan	266800,00	
		1.e.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	437,00	3,95
				Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	11064,00	



No.	URUSAN	No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Data LPPD 2024	Capaian Kinerja
		1.e.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana	2479,00 2479,00	100,00
		1.e.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat daerah + Jumlah layanan pemadaman di kab/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota	50,00 50,00	100,00
		1.e.7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	12,82	12,82
	SOSIAL	1.f.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	1400,00	100,00
Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis				1400,00		
1.f.2		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran populasi korban bencana alam dan sosial yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten kota	270,00 270,00	100,00	



No.	URUSAN	No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Data LPPD 2024	Capaian Kinerja
C.	KETENAGAKERJAAN	2.a.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD	11,00	91,67
				Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota	12,00	
		2.a.2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	5861,00	12,38
				Jumlah tenaga kerja keseluruhan	47327,00	
		2.a.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)	33868493430,00	71562730,4287193
	Jumlah tenaga kerja			47327,00		
	2.a.4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	213,00	100,00	
			Jumlah perusahaan	213,00		
	2.a.5	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	6266,00	82,93	
			Jumlah pencari kerja yang terdaftar	7556,00		
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.g.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja operasi dan modal APBD	2402854699220,00	40,45	
			Jumlah seluruh belanja operasi dan modal APBD	5940329275906,80		
	2.g.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	Jumlah anak (penduduk usia kurang 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi	59,00	100,00	
			Jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)	59,00		
	2.g.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan	19,00	20,45	
Jumlah penduduk perempuan			92914,00			
PANGAN	2.h.1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan	86480,00	288,27	
			Jumlah target cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang ditetapkan	30000,00		
PERTANAHAN	2.i.1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan	Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	123643863,25	100	



No.	URUSAN	No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Data LPPD 2024	Capaian Kinerja
			dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	123643863,25	
		2.i.2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	1,00	100,00
				Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	1,00	
		2.i.3	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	123295189,25	100,00
				Luas tanah di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan	123295189,25	
		2.i.4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha	0,00	0,00
					1,00	
		2.i.5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah	19458298,82	100,00
				luas izin membuka tanah yang diterbitkan	19458298,82	
		2.i.6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani	5,00	100
				Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan	5,00	
	LINGKUNGAN HIDUP	2.j.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (IKLH)	78,97	78,97
		2.j.2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah kabupaten/kota	Total volume sampah yang dapat ditangani	43123,95	81,78
				Total volume timbunan sampah kabupaten/kota	52732,10	
		2.j.3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah kabupaten/kota	18,00	56,25
				usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	32,00	
	KEPENDUDUKAN DAN CATAT	2.k.1.1	Perekaman KTP Elektronik	Jumlah penduduk wajib KTP-el yang telah melakukan perekaman	203923,00	99,43
					Jumlah penduduk wajib KTP-el	205099,00



No.	URUSAN	No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Data LPPD 2024	Capaian Kinerja
	AN SIPIL	2.k.1.2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA	65103,00	69,33
				Jumlah anak usia 0-17 tahun	93900,00	
		2.k.1.3	Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir	96980,00	99,40
				Jumlah anak usia 0-18 tahun	97564,00	
		2.k.1.4	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	16,00	100,00
				Jumlah Perangkat Daerah	16,00	
PEMBE RDAYA AN MASYA RAKAT DAN DESA	2.1.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	1,00	100,00	
			Jumlah desa tertinggal (per awal tahun-n)	1,00		
	2.1.2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	5,00	11,63	
			Jumlah desa berkembang (per awal tahun-n)	43,00		
PENGEN DALIAN PENDUD UK DAN KB	2.m.1	TFR (Angka Kelahiran Total)	ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur	2,2	2,2	
	2.m.2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB aktif modern	33561,00	72,59	
			Jumlah pasangan usia subur	46233,00		
	2.m.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	2745,00	5,94	
Jumlah Pasangan Usia Subur			46233,00			
PERHUB UNGAN	2.n.1	Rasio konektivitas	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	0,75	0,75	
		V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0,77	0,77	
KOMIN FO	2.o.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo	45,00	100,00	
			Jumlah Perangkat Daerah	45,00		



No.	URUSAN	No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Data LPPD 2024	Capaian Kinerja
		2.o.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah layanan publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi	63,00	100,00
				Jumlah layanan publik	63,00	
		2.o.3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	206509,00	100,00
				Jumlah penduduk	206509,00	
	KOPERASI DAN UKM	2.p.1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset	25,00	45,45
Jumlah seluruh koperasi				55,00		
2.p.2		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	10534,00	74,15	
			Jumlah usaha mikro keseluruhan	14207,00		
PENANAMAN MODAL	2.q	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	Jumlah investasi PMDN dan PMA tahun 2023	4999498740000,00	-25,07	
			Jumlah investasi PMDN dan PMA tahun 2024	3746045195708,00		
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.r.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten/kota	3096,00	3,88	
			Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota	79871,00		
	2.r.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota	436,00	0,55	
			Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota	79871,00		
	2.r.3	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	69,00	69,00	
	STATISTIK	2.s.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	45,00	100,00
Jumlah Perangkat Daerah				45,00		



No.	URUSAN	No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Data LPPD 2024	Capaian Kinerja
		2.s.2	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	45,00	100,00
				Jumlah Perangkat Daerah	45,00	
	PERSANDIAN	2.t	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi	389,00	60,31
				Jumlah area penilaian	645,00	
	BUDAYA	2.u	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	742,00	98,54
				Jumlah cagar budaya yang terdata	753,00	
	PERPUS-TAKAAN	2.v.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	67,54	67,54
		2.v.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)	70,51	70,51
	KEARSIPAN	2.w.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	75,01	75,01
		2.w.2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK	66,67	66,67
	KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.a	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota	29783,81	106,29
				Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan	28021,54	
	PARIWISATA	3.b.1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Jumlah wisatawan mancanegara tahun 2023	1666,00	157,74
				Jumlah wisatawan mancanegara tahun 2024	4294,00	



No.	URUSAN	No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Data LPPD 2024	Capaian Kinerja
		3.b.2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	Jumlah wisatawan nusantara tahun 2023 Jumlah wisatawan nusantara tahun 2024	420926,00 552920,00	31,36
		3.b.3	Tingkat Hunian Akomodasi	Jumlah kamar yang terjual Jumlah kamar yang tersedia dikali 365 hari	274574,00 1262170,00	21,75
		3.b.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Jumlah Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku Total PBRB harga berlaku	592732,17 50816509,61	1,17
		3.b.5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Jumlah Pendapatan dari sektor pariwisata Jumlah total PAD	15805807562,00 343480236165,39	4,60
	PERTANIAN	3.c.1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Produktivitas pertanian per hektar per tahun Luas Panen	30476,50 10051,50	3,03
		3.c.2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Jumlah kejadian penyakit kasus tahun 2023 Jumlah kejadian penyakit kasus tahun 2024	14,00 14,00	0,00
	KEHUTANAN	3.d			100,00	100,00
	ESDM	3.e	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kabupaten/kota	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi	0,00 1,00	0,00
	PERDAGANGAN	3.f.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan Jumlah pelaku usaha di wilayah kabupaten/kota	78,00 78,00	100,00
		3.f.2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi pupuk Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)	4982,287 9680,484	51,47
		3.f.3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota	532,00 1319,00	40,33
	PERINDUSTRIAN	3.g.1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	Jumlah Industri kecil dan menengah tahun 2023 Jumlah Industri kecil dan menengah tahun 2024	2244,00 2778,00	23,80



No.	URUSAN	No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Data LPPD 2024	Capaian Kinerja
		3.g.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	0,00	0,00
		3.g.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan Jumlah izin yang dikeluarkan	20,00 20,00	100,00
		3.g.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan Jumlah izin yang dikeluarkan	0,00 1,00	0,00
		3.g.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan Jumlah izin yang dikeluarkan	0,00 1,00	0,00
		3.g.6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	90,00	90
	TRANS MIGRAS I	3.h	-		100,00	100

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Table II.4

Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No.	URUSAN	No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Data LPPD 2024	Capaian Kinerja
E.	PERENCANAAN DAN KEUANGAN	4.a.1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	377242636329,00	5,88
				Total belanja APBD	6411806512153,80	
		4.a.2	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah PAD	343480236165,39	5,55
				Jumlah Pendapatan pada APBD	6194026383086,10	
4.a.3	Mauritas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Mauritas SPIP	3,00	3,00		
4.a.4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP	3,00	3,00		



No.	URUSAN	No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Data LPPD 2024	Capaian Kinerja
		4.a.5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Total Belanja Urusan Pemerintahan – transfer expenditures Total belanja APBD	1906756904306,60 6411806512153,80	29,74
		4.a.6	Opini Laporan Keuangan	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kabupaten/Kota 10 Tahun terakhir	9,00	9,00
	PENGAD AAN	4.b.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Jumlah kontrak infrasrtuktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun 2023	1,00	0,10
Jumlah kontrak keseluruhan tahun 2023				1046,00		
4.b.2		Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	2923,00	47,44	
			Jumlah seluruh pengadaan	6162,00		
4.b.3		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan	2602031942935,60	53,08	
			total belanja operasi dan modal	4902169209198,50		
4.b.4		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun 2023	1864099141499,00	95,60	
			Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun 2024	3646204640586,00		
KEPEGA WAIAN	4.c.1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai menurut pendidikan Perguruan Tinggi ke atas	1488,00	63,18	
			Total seluruh PNS (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	2355,00		
	4.c.2	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)	365,00	15,50	
			Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	2355,00		
4.c.3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi	365,00	100,00		



No.	URUSAN	No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Data LPPD 2024	Capaian Kinerja
				Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	365,00	
	MANAJE MEN KEUANGAN	4.d.1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi	6411806512153,80	26,34
Total belanja APBD dikurangi satu				5074960000000,00		
4.d.2		Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi	343480236165,39	35,12	
			Total PAD dalam APBD dikurangi satu	254199669650,00		
4.d.3		Assets Management	Total Assets Management	4,00	4,00	
4.d.4		Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	Nilai realisasi SiLPA	673431043094,28	14,61	
	Total belanja anggaran tahun sebelumnya		4608120868464,30			
	TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK	4.e.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda	12.702.798.090,00	92,13
Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda				13.787.621.804,00		
4.e.2		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website pemda	12,00	100,00	
			Total jumlah dokumen yang telah dirinci	12,00		

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Manajemen pembangunan berbasis kinerja merupakan orientasi untuk mendorong perubahan dimana program atau kegiatan dan sumber anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan yang baik pada hasil (*outcome*) yang ingin dicapai, keluaran (*output*) maupun dampak dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakatnya.

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021 - 2026 pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah



a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja;

Table II.5

Target kinerja dalam perjanjian kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	1	Harapan lama sekolah	%	14,47
		2	Rata-rata lama sekolah	%	9,98
2	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan kesehatan	3	Angka harapan hidup	%	72,49
		4	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	%	66,60
3	Menurunnya angka pengangguran di Kab.Berau	5	Tingkat Pengangguran terbuka	persen	4,62
4	Menurunnya Angka Kemiskinan	6	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	persen	4,95
5	Meningkatnya Industri Kecil Dan menengah (IKM)	7	Presentase Usaha mikro dan kecil	persen	2,00
6	Terwujudnya pengembangan Pariwisata berbasis sustainable tourism	8	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	persen	1,00
7	Meningkatnya Produksi Sektor Primer	9	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	11,94
8	Meningkatnya Ketahanan dan Keberagaman Konsumsi Pangan	10	Score pola pangan harapan	Score	83
9	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar	11	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	persen	67,50
		12	Capaian akses Air Minum Jaringan Perpipaan	persen	11,70
		13	Capaian Akses Air Minum Layak	persen	90
		14	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	persen	23
		15	Persentase rumah tangga pengguna listrik	persen	99,74
		16	Rasio rumah layak huni	persen	0,198
10	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	17	Rasio Konektivitas antar wilayah di kabupaten	persen	0,65



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target
		18	Indeks SPBE	Indeks	1,4
11	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	19	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air	Indeks	56,59
		20	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara	Indeks	86,27
		21	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	89,804
12	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	22	Opini BPK	Opini	WTP
		23	Nilai/Predikat AKIP	Nilai/ Predikat	68
		24	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kab. Berau	Status	Tinggi
13	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan daerah	25	Survei Kepuasan Masyarakat	Kategori/Nilai	92,16

b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja;

Table II.6

Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja;

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	1	Harapan lama sekolah	Persentase	14,47	13,37	92,39
		2	Rata-rata lama sekolah	Persentase	9,98	9,57	95,89
2	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan kesehatan	3	Angka harapan hidup	Persentase	72,49	73,66	101,53
		4	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang kesehatan	Persentase	66,60	100	150,15
3	Menurunnya angka pengangguran di Kab. Berau	5	Tingkat pengangguran terbuka	Persentase	4,62	5,15	88



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
4	Menurunnya angka kemiskinan	6 Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan	Persentase	4,95	5,08	97
5	Meningkatnya Industri Kecil dan Menengah (IKM)	7 Persentase usaha Mikro dan Kecil	Persentase	2,00	3,50	175
6	Terwujudnya pengembangan pariwisata berbasis <i>sustainable tourism</i>	8 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persentase	1,00	1,17	117
7	Meningkatnya produksi sektor primer	9 Kontribusi Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Persentase	11,94	12,42	104
8	Meningkatnya ketahanan dan keberagaman konsumsi pangan	10 Score pola pangan harapan	Score	83	85,7	103,25
9	Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur layanan dasar	11 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persentase	67,50	69,97	103,66
		12 Capaian akses air minum jaringan perpipaan	Persentase	11,70	81,49	696,5
		13 Capaian akses air minum layak	Persentase	90	83,17	92,41
		14 Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persentase	23	32,97	143,54
		15 Persentase rumah tangga pengguna listrik	Persentase	99,74	99,60	99
		16 Rasio rumah layak huni	Persentase	0,198	0,207	105
10	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	17 Rasio konektivitas antar wilayah di kabupaten	Persentase	65	0,6	92
		18 Indeks SPBE	Indeks	1,4	2,8	162
11	Meningkatnya kualitas, daya	19 Hasil pengukuran indeks kualitas air	Indeks	56,59	59,96	100,65



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	
	dukung dan daya tampung lingkungan hidup	20	Hasil pengukuran indeks kualitas udara	Indeks	86,27	91,61	106,18
		21	Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	89,804	94,85	105,61
12	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	22	Opini BPK	Opini	WTP	WTP*	100*
		23	Nilai/Predikat AKIP	Nilai/ predikat	68 (B)	62,74	92
		24	Status kinerja penyelenggara pemerintah daerah Kab. Berau	Status	Tinggi (3,41)	3,1964*	93*
13	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan daerah	25	Survei Kepuasan Masyarakat	Kategori/ nilai	94,06 (A)	85	90

c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya;

1. Sasaran “Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Layanan Pendidikan”.

Pendidikan merupakan yang terpenting yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan kualitas dan layanan pendidikan demi terciptanya sumber daya manusia yang mantap dan berkualitas.

Sasaran meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan di Kabupaten Berau. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan dengan 2 (dua) indikator kinerja rata-rata mencapai 96,52 dan termasuk predikat “**Baik**”.



Table II.7

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Indikator kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Harapan Lama Sekolah	%	14,47	13,37	92,39
2	Rata-rata Lama Sekolah	%	9,98	9,57	95,89

Table II.8

Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
1	Harapan Lama Sekolah	%	13,35	13,36	13,37
2	Rata-rata Lama Sekolah	%	9,54	9,56	9,57

2. **“Meningkatnya kualitas dan jangkuan layanan kesehatan”.**

Sasaran Meningkatnya kualitas dan jangkuan layanan kesehatan melalui upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, meningkatkan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dan penyediaan dan pendistribusian farmasi, alat kesehatan dan makanan dan minuman. Jumlah tenaga kesehatan 1.451 pada tahun 2021 dan mengalami kenaikan 1.552 pada tahun 2022, sedangkan untuk tahun 2023 masih dalam proses pembaharuan data.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “meningkatnya kualitas dan jangkuan layanan kesehatan rata-rata capaian 162,1 dan termasuk predikat **“Baik Sekali”**.

Table II.9

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Indikator kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
3	Angka harapan hidup	%	72,49	73,66	101,53%
4	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan	%	66,60	100	150,15%



Table II.10

Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
3	Angka harapan hidup	%	72,32	73,45	73,66
4	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan	%	82,81	100	100

3. “Menurunnya angka pengangguran di Kabupaten Berau”

Sasaran menurunnya angka pengangguran di Kab.Berau masih menjadi perhatian khusus dalam mengurangi tingkat pengangguran terbuka. Peningkatan penganggur pada suatu wilayah tidak hanya berdampak lemah Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Menurunnya angka pengangguran di Kab.Berau” mencapai 88 persen dan termasuk predikat **“Baik”**.perekonomian melainkan juga masalah sosial.

Table II.11

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Indikator kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
5	Tingkat pengangguran terbuka	%	4,62	5,15	88

Table II.12

Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
5	Tingkat pengangguran terbuka	%	5,02	4,95	5,15

4. “Menurunnya Angka Kemiskinan

Keberhasilan suatu pembangunan dan tingkat kesejahteraan suatu perekonomian bagi masyarakat dapat dilihat dari indicator



kemiskinan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini indicator kemiskinan yang ada di Kabupaten Berau.

Table II.13

Indikator kemiskinan Kabupaten Berau 2020-2024

No	Uraian	2021	2022	2023	2024
1	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	595.550	624.948	677,819	731,250
2	Jumlah Penduduk Miskin (000 Jiwa)	13,62	13,31	13,26	12,35
3	Persentase Penduduk Miskin	5,88	5,65	5,54	5,08
4	Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,95	0,98	0,16	0,41
5	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,20	0,22	0,01	0,07

Sumber: Dnas Sosial Desember 2024

Table II.14

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Indikator kinerja	Satuan	Target	Tahun 2024	
			Target	Realisasi	Capaian
6	Persentase penduduk yang di bawah garis kemiskinan	%	4,95	5,08	97%

Table II.15

Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
6	Persentase penduduk yang di bawah garis kemiskinan	%	5,65	5,54	5,08

5. “Meningkatnya Industri Kecil Dan menengah (IKM)”

Jumlah UMKM di Kabupaten Berau Tahun 2024 Usaha Mikro sebesar 14.206, Usaha Kecil berjumlah 288 sedangkan Usaha Menengah 16 yang termasuk dalam 13 Kecamatan.



Table II.16

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Indikator kinerja	Satuan	Target	Tahun 2024	
			Target	Realisasi	Capaian
7	Persentase Usaha mikro dan kecil	%	2,00%	3,50%	175%

Table II.17

Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi	Realisasi	Realisasi
			2022	2023	2024
7	Persentase Usaha mikro dan kecil	%	10,41	1,04	3,50

6. Terwujudnya pengembangan Pariwisata berbasis sustainable tourism

Table II.18

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Indikator kinerja	Satuan	Target	Tahun 2024	
			Target	Realisasi	Capaian
8	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	1,00	1,17	117

Table II.20

Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi	Realisasi	Realisasi
			2022	2023	2024
8	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	1,38	1,38	1,17



7. “Meningkatnya Produksi Sektor Primer”

Table II.21

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Indikator kinerja	Satuan	Target	Tahun 2024	
			Target	Realisasi	Capaian
9	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	11,94	12,42	104

Table II.22

Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
9	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	9,33	11,26	12,42

8. “Meningkatnya Ketahanan dan Keberagaman Konsumsi Pangan

Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan target 11,86 dapat terealisasi sebesar 11,26 % dengan tingkat capaian adalah 94,94%. Produksi Pertanian meliputi padi (padi sawah dan ladang) , produktivitas jagung dan produktivitas cabai (besar,keriting dan rawit).

Table II.23

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Indikator kinerja	Satuan	Target	Tahun 2024	
			Target	Realisasi	Capaian
10	Score pola pangan harapan	score	83	85,7	103,25%

Table II.24

Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
10	Score pola pangan harapan	score	89,5	86,9	85,7



9. “Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar dengan 6 (enam) indikator.

Table II.25

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Indikator kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
11	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	persen	67,50	69,97	103,66%
12	Capaian akses Air Minum Jaringan Perpipaan	persen	11,70	81,49	696,5%
13	Capaian Akses Air Minum Layak	Persen	90,00	83,17	92,41%
14	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	persen	23	32,97	143,54%
15	Persentase rumah tangga pengguna listrik	persen	99,74	99,60	99
16	Rasio rumah layak huni	persen	0,198	0,207	105%

Table II.26

Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
11	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	persen	66,93	67,05	69,97
12	Capaian akses Air Minum Jaringan Perpipaan	persen	79,65	79,84	81,49
13	Capaian Akses Air Minum Layak	Persen	81,51	81,70	83,17
14	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	persen	22,53	73,61	32,97
15	Persentase rumah tangga pengguna listrik	persen	93,50	99,99	99,60
16	Rasio rumah layak huni	persen	0,197	0,2	0,207

10. “Meningkatnya konektivitas antar wilayah”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah dengan 2 (dua) indikator rasio konektivitas antar wilayah di kabupaten dan indeks SPBE.

Rasio konektivitas antar wilayah kabupaten yang di dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan pada saat penginputan target dalam perencanaan



ada kesalahan inputan data yaitu sebesar 65 yang seharusnya target 0,65. Sedangkan indikator SPBE ini dilaksanakan oleh Dinas Kominfo.

Table II.27

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Indikator kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
17	Rasio Konektivitas antar wilayah di kabupaten	persen	0,65	0,6	92%
18	Indeks SPBE	Indeks	1,4	2,28	162%

Table II.28

Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
17	Rasio Konektivitas antar wilayah di kabupaten	persen	0.56	0,75	0,6
18	Indeks SPBE	indeks	1,97	2,02	2,28

11. “Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dengan 3 (tiga) indikator.

Table II.29

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Indikator kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
19	Hasil pengukuran indeks kualitas air	Indeks	56,59	59,96	100,65%
20	Hasil pengukuran indkes kualitas udara	Indeks	86,27	91,61	106,18%
21	Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	89,804	94,85	105,61%



Table II.30
Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
19	Hasil pengukuran indeks kualitas air	Indeks	53,48	53,33	59,96
20	Hasil pengukuran indeks kualitas udara	Indeks	83,76	85,17	91,61
21	Indeks kualitas tutupan lahan	indeks	94,64	93,76	94,85

12. “Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah”

Table II.31
Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Indikator kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
22	Opini BPK	Opini	WTP	WTP*	100*
23	Nilai/Predikat AKIP	Nilai/ Kategori	68	62,74	92
24	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kab. Berau	Status	Tinggi (3,41)	Belum rilis (3,1964)	94

Table II.32
Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
22	Opini BPK	Opini	WTP*	WTP*	100*
23	Nilai/Predikat AKIP	Nilai/ Kategori	61,62	62,40	62,74
24	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kab. Berau	Status	Sangat Tinggi*	3,1964	3,1964*



13. “Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan daerah”

Table II.33

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Indikator kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
25	Survei Kepuasan Masyarakat	Kategori atau nilai	94,06	85	90%

Table II.34

Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
25	Survei Kepuasan Masyarakat	Kategori atau nilai	90,12	92,16	85

d. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah;

1. Sasaran “Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Layanan Pendidikan”.

Table II.35

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD

No	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2024	Tingkat Pencapaian
1	Harapan Lama Sekolah	%	14,83	13,37	90
2	Rata-rata Lama Sekolah	%	10,26	9,57	93



2. “Meningkatnya kualitas dan jangkuan layanan kesehatan”.

Table II.36

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD

No	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2024	Tingkat Pencapaian
3	Angka harapan hidup	%	72,71	73,66	101,22%
4	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan	%	100	100	100%

3. “Menurunnya angka pengangguran di Kabupaten Berau”

Table II.36

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD

No	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2024	Tingkat Pencapaian
5	Tingkat pengangguran terbuka	%	4,41	5,15	83

4. “Menurunnya Angka Kemiskinan

Table II.38

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD

No	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2024	Tingkat Pencapaian
6	Persentase penduduk yang di bawah garis kemiskinan	%	4,84	5,08	95%



5. “Meningkatnya Industri Kecil Dan menengah (IKM)”

Table II.39

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD

No	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2024	Tingkat Pencapaian
7	Presentase Usaha mikro dan kecil	%	3	3,50	116

6. Terwujudnya pengembangan Pariwisata berbasis sustainable tourism

Table II.40

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD

No	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2024	Tingkat Pencapaian
8	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	1,03	1,17	114

7. “Meningkatnya Produksi Sektor Primer”

Table II.41

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD

No	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2024	Tingkat Pencapaian
9	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	12,09	12,42	103



8. “Meningkatnya Ketahanan dan Keberagaman Konsumsi Pangan

Table II.42

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD

No	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2024	Tingkat Pencapaian
10	Score pola pangan harapan	score	85,1	85,7	100,7

9. “Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar”

Table II.43

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD

No	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2024	Tingkat Pencapaian
11	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	persen	68,50	69,97	102
12	Capaian akses Air Minum Jaringan Perpipaan	persen	13,70	81,49	594
13	Capaian Akses Air Minum Layak	Persen	97	83,17	85
14	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	persen	33	32,97	99
15	Persentase rumah tangga pengguna listrik	persen	99,94	99,60	100
16	Rasio rumah layak huni	persen	0,2	0,207	104



10. “Meningkatnya konektivitas antar wilayah”

Table II.44

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD

No	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2024	Tingkat Pencapaian
17	Rasio Konektivitas antar wilayah di kabupaten	persen	0,75	0,6	80%
18	Indeks SPBE	indeks	1,6	2,28	152%

11. “Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup”

Table II.45

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD

No	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2024	Tingkat Pencapaian
19	Hasil pengukuran indeks kualitas air	Indeks	56,69	59,96	105%
20	Hasil pengukuran indeks kualitas udara	Indeks	86,47	91,61	106%
21	Indeks kualitas tutupan lahan	indeks	89,814	94,85	105,61%

12. “Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah”

Table II.46

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD

No	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2024	Tingkat Pencapaian
22	Opini BPK	Opini	WTP	WTP*	100
23	Nilai/Predikat AKIP	Nilai/Kategori	72	62,74	88



No	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2024	Tingkat Pencapaian
24	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kab.Berau	Status	Tinggi (3,41)	3,1964*	94

13. “Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan daerah”

Table II.47

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD

No	Indikator kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2024	Tingkat Pencapaian
25	Survei Kepuasan Masyarakat	Kategori atau nilai	98	85	86

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

Bagian yang disajikan dalam tabel dibawah ini terkait efesiensi anggaran dengan capaian kinerja yang telah di targetkan didalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yang dituangkan didalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2023.

Table II.48

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Indikator Kinerja	2024		Tingkat Efisiensi	OPD Penanggungjawab
		Capaian Kinerja %	Penyerapan Anggaran %		
1	Harapan lama sekolah	92,39	89,35	3,04	Dinas Pendidikan
2	Rata-rata lama sekolah	95,89	89,35	6,54	
3	Angka harapan hidup	101,53	87,81	13,72	Dinas Kesehatan



No	Indikator Kinerja	2024		Tingkat Efisiensi	OPD Penanggungjawab
		Capaian Kinerja %	Penyerapan Anggaran %		
4	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	150,15	100	50,15	
5	Tingkat Pengangguran terbuka	88	80	8	Disnakertrans
6	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	97	92,27	4,73	Dinas Sosial
7	Presentase Usaha mikro dan kecil	175	77	98	Diskoperindag
8	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	117	88,57	28,43	Disbudpar
9	Kontribusi Sektor Pertanian,	12,42	68,12	-55,70	Dinas Perkebunan
					Dinas perikanan
					DTPHP
10	Score pola pangan harapan	103,25	88,43	14,82	Dinas Pangan
11	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	103,66	95,26	8,40	DPUPR
12	Capaian akses Air Minum Jaringan Perpipaan	696,5	97,53	598,97	
13	Capaian Akses Air Minum Layak	92,41	97,63	-5,22	
14	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	143,54	98,59	44,95	
15	Persentase rumah tangga pengguna listrik	99	Provinsi	-	
16	Rasio rumah layak huni	105	97,88	7,12	Disperkim
17	Rasio Konektivitas antar wilayah di kabupaten	92	94,18	2,18	Dishub
18	Indeks SPBE	162	91,64	70,36	Diskominfo
19	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air	100,65	85,92	14,73	DLHK
20	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara	106,18	85,92	20,26	
21	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	105,61	85,92	19,69	
22	Opini BPK	100*	95,78	4,22	BPKAD
23	Nilai/Predikat AKIP	92	83,35	8,65	Bagian Organisasi



No	Indikator Kinerja	2024		Tingkat Efisiensi	OPD Penanggungjawab
		Capaian Kinerja %	Penyerapan Anggaran %		
24	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kab.Berau	94	76,81	17,19	Bagian Tata Pemerintahan
25	Survei Kepuasan Masyarakat	90	59,44	30,56	Bagian Organisasi

f. Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Program prioritas pembangunan Daerah merupakan program perangkat daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terpilih sebagaimana dituangkan dalam RPJMD. Dengan demikian program prioritas II meliputi Program Perangkat Daerah pendukung janji kampanye sebagaimana disajikan dalam 203able dibawah ini :

Table II.49

No	Program Unggulan Bupati dalam Janji Kampanye	Program Terkait dalam Kemandagri 50	OPD Penyelenggaraan
1	Melanjutkan Program Percepatan Pembangunan Desa dengan SIGAP	1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan
2	Melanjutkan Program Percepatan Pembangunan 50 s/d 100 Juta Per RT	2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kec. Tanjung Redeb, Kec. Teluk Bayur, Kec.Sambaliung, dan Kec. Gunung Tabur
3	Pembangunan Rumah Sakit Tipe B Termasuk Layanan PCR Gratis	3. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
		4. Program Penataan Bangunan Gedung	DPUPR



No	Program Unggulan Bupati dalam Janji Kampanye	Program Terkait dalam Kepmendagri 50	OPD Penyelenggaraan
		5. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Distanah
4	Gratis Iuran BPJS Kesehatan Bagi Warga Yang Tidak Mampu	6. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
5	Gratis Fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal	7. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Disnakertrans
		8. Program Hubungan Industrial	
6	Penyediaan 1000 Titik Wifi Gratis Hingga Ke Tingkat Kampung	9. Program Aplikasi Informatika	Diskominfo
7	Peningkatan Infrastruktur Jalan Untuk Menunjang Perekonomian Kampung dan Kota	10. Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR
		11. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	
		12. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Disperkim
8	Peningkatan Program Beasiswa Berau Cerdas, 1.000 Laptop Untuk Guru Sekolah dan Bantuan Perlengkapan Sekolah Bagi Pelajar yang Tidak Mampu	13. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesra
		14. Program Pengelolaan Pendidikan	Disdik
9	Peningkatan Insentif Untuk Kader Posyandu, Tenaga Kesehatan, PTT, Ketua RT & Pembimbing	15. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Disdik



No	Program Unggulan Bupati dalam Janji Kampanye	Program Terkait dalam Kepmendagri 50	OPD Penyelenggaraan
	Rohani dan Tenaga Pendidikan (Guru Sekolah dan PAUD)	16. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesra
		17. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kec. Tanjung Redeb, Kec. Teluk Bayur, Kec. Sambaliung, dan Kec. Gunung Tabur
10	Program Peningkatan Sarana Fasilitas Air Bersih (25.000 Sambungan Baru) dan Listrik di Seluruh Kampung	18. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR
		19. Program Tentang Kelistrikan Masuk dalam Program Urusan Provinsi (Program Pengelolaan Ketenagalistrikan)	Distamben Prop
11	Pembangunan Kawasan Terpadu Pusat Seni, Budaya dan Kreativitas (Terdiri dari Taman, Budaya, Amphiteater, Pusat Kreativitas & Kawasan UMKM Terpadu) Serta Pembangunan Balai Adat	20. Program Penataan Bangunan Gedung	DPUPR
		21. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Disbudpar
		22. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	DLHK
12	Bantuan Langsung Tunai Bagi Fakir Miskin, Yatim Piatu & Orang Tua Jompo yang Terlantar Termasuk Warga Terdampak COVID-19	23. Program Rehabilitasi Sosial	Dinsos
13	Revitalisasi Bangunan Bersejarah (Keraton, Makam Bersejarah, dan lain- lain)	24. Program Penataan Bangunan Gedung	DPUPR



No	Program Unggulan Bupati dalam Janji Kampanye	Program Terkait dalam Kepmendagri 50	OPD Penyelenggaraan
14	Pemberian Bantuan Stimulan (SAPRONAK, SAPRODI, ALSINTAN) Serta Mewujudkan Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan yang Maju Berbasis Teknologi	25. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Distanak & Dinas Perkebunan
		26. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
		27. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		28. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
15	Pengembangan Sarana & Prasarana Destinasi Pariwisata	29. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Disbudpar
		30. Program Penataan Bangunan Gedung	DPUPR
		31. Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR
		32. Program Pengelolaan Pelayaran	Dishub

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada table berikut ini:

Table II.50

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

NO	SASARAN	PROGRAM PD PENDUKUNG VIS DAN MISI KEPALA DAERAH	ANGGARAN			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			PAGU	REALISASI	%	
MISI KE 1 MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG CERDAS, SEJAHTERA DAN BERBUDI LUHUR						



NO	SASARAN	PROGRAM PD PENDUKUNG VIS DAN MISI KEPALA DAERAH	ANGGARAN			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	
			PAGU	REALISASI	%		
TUJUAN KE 1 Mewujudkan Masyarakat Berau yang Berdaya Saing							
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	1	Program Pengelolaan Pendidikan	319.049.433.744,00	291.778.239.761,89	91	Dinas Pendidikan
		2	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	10.377.483.000,00	9.198.335.971,00	88	Dinas Pendidikan
Rata-rata Capaian							
2	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan kesehatan	3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	130.699.158.532	114.616.383.115	88	Dinas Kesehatan
		4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	3.338.980.999	3.175.466.438	95	Dinas Kesehatan
		5	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	810.000.000	510.209.120	63	Dinas Kesehatan
		6	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.122.948.000	1.968.572.459	93	Dinas Kesehatan
		7	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	3.834.330.140	3.535.907.559	86,10	Rsud Abdul Rivai
		8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.801.985.000	2.490.849.550	88,89	Rsud Abdul Rivai
		9	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	3.328.804.700	3.042.529.919	91,40	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Rata-rata Capaian							
MISI KE 2 MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DENGAN OPTIMALISASI SEKTOR HILIR SUMBER DAYAALAM DAN PERTANIAN DALAM ARTI LUAS YANG BERBASIS KERAKYATAN DENGAN PERLUASAN LAPANGANKERJA DAN PENGEMBANGAN USAHA BERBASIS PARIWISATA DAN KEARIFAN LOKAL							
Tujuan Ke 2 Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Masyarakat Yang Mantap Dan Berdaya Saing							



NO	SASARAN	PROGRAM PD PENDUKUNG VIS DAN MISI KEPALA DAERAH	ANGGARAN			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	
			PAGU	REALISASI	%		
3	Menurunnya angka pengangguran di Kab.Berau	10	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.455.477.000	1.391.512.538	96	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		11	Program Penempatan Tenaga Kerja	1.276.615.200	1.228.903.427	96	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		12	Program Hubungan Industrial	3.640.863.600	2.871.918.294	79	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Rata-rata Capaian							
4	Menurunnya Angka Kemiskinan	13	Program Pemberdayaan Sosial	1.957.007.800	1.893.099.375	96,73	Dinas Sosial
		14	Program Rehabilitasi Sosial	9.265.000.483	8.776.030.184	94,72	Dinas Sosial
		15	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1.132.918.800	954.210.816	84,23	Dinas Sosial
		16	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	4.398.555.300	3.852.092.697	87,58	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
		17	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	68.273.277.988	51.725.198.774	75,76	Sekretariat Daerah Tapem dan Kesra
		18	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	848.288.700	602.522.674	71,03	Kecamatan Tanjung Redeb
Tujuan Ke 3 Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program ekonomi kerakyatan							
Rata-rata Capaian							
5	Meningkatnya Industri Kecil Dan menengah (IKM)	19	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	1.748.996.000	1.347.971.416	77,1	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
		20	Program Pengembangan UMKM	1.600.000.000	1.243.835.000	77,73	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
		21	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	360.000.000	326.420.700	90,67	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan



NO	SASARAN	PROGRAM PD PENDUKUNG VIS DAN MISI KEPALA DAERAH	ANGGARAN			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	
			PAGU	REALISASI	%		
		22	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	9.367.265.200	8.831.276.775	94,28	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
		23	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	70.000.000	41.025.960	58,61	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
		24	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	446.091.000	376.200.312	84,33	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Rata-rata Capaian							
6	Terwujudnya pengembangan Pariwisata berbasis <i>sustainable tourism</i>	25	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	30.998.382.942	28.704.365.867,83	92,60	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		26	Program Pemasaran Pariwisata	4.829.123.800	4.509.868.030,98	93,39	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		27	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.920.510.670	1.161.980.335	60,50	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		28	Program Pengembangan Kebudayaan	5.185.679.600	3.879.599.460	74,81	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Rata-rata Capaian							
7	Meningkatnya Produksi Sektor Primer	29	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.263.219.800	1.704.671.253	75,32	Dinas Perkebunan
		30	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	796.733.000	732.193.700	91,	Dinas Perkebunan
		31	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1.293.700.000	1.014.954.586	78,45	Dinas Perkebunan
		32	Program Perizinan Usaha Pertanian	1.308.013.000	394.837.415	30,19	Dinas Perkebunan
		33	Program Penyuluhan Pertanian	1.606.380.400	1.338.289.713	83,31	Dinas Perkebunan



NO	SASARAN	PROGRAM PD PENDUKUNG VIS DAN MISI KEPALA DAERAH	ANGGARAN			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	
			PAGU	REALISASI	%		
		34	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	9.915.206.600	8.654.565.874	87,29	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan
		35	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2.363.423.500	2.079.103.334	87,97	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan
		36	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	332.898.000	244.783.488	73,53	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan
		37	Program Perizinan Usaha Pertanian	334.362.000	240.703.076	71,99	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan
		38	Program Penyuluhan Pertanian	1.619.399.600	1.292.294.668	79,80	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan
		39	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	5.428.896.200	4.881.417.514	89,92	Dinas Perikanan
		40	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	5.221.905.850	4.668.415.364	89,40	Dinas Perikanan
		41	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.988.245.647	1.887.661.611	94,94	Dinas Perikanan
Rata-rata Capaian							
8	Meningkatnya Ketahanan dan Keberagaman Konsumsi Pangan	42	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	502.465.000	319.790.470	63,64	Dinas Pangan
		43	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	3.249.147.500	3.042.043.608	93,63	Dinas Pangan
		44	Program Penanganan Kerawanan Pangan	919.062.500	828.198.043	90,11	Dinas Pangan
MISI KE 3 MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA PUBLIK YANG BERKUALITAS, ADIL DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN							
Tujuan 4. Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah							



NO	SASARAN	PROGRAM PD PENDUKUNG VIS DAN MISI KEPALA DAERAH	ANGGARAN			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	
			PAGU	REALISASI	%		
9	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar	45	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	510.222.194.396	486.818.654.476	95,41	DPUPR
		46	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	213.763.577.782	208.488.297.735	97,53	DPUPR
		47	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	539.301.787.541	523.711.962.030	97,11	DPUPR
		48	Program Penataan Bangunan Gedung	428.499.379.199	329.683.070.845	76,94	DPUPR
		49	Program Penyelenggaraan Jalan	1.947.701.349.353	1.855.447.060.732	95,26	DPUPR
		50	Program Pengembangan Perumahan	411.890.000,00	403.161.694,50	97,88	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		51	Program Kawasan Permukiman	3.868.175.999,00	3.364.587.869,00	86,98	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		52	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	9.833.000.000,00	9.780.666.189,50	99,47	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		53	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	33.156.799.500,00	32.349.772.503,00	97,57	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
54	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	18.742.503.200	2.123.349.431	11,33	Dinas Pertanahan		
Rata-rata Capaian							
10	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	55	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	102.569.998.980	99.135.537.038	96,65	Dinas Perhubungan
		56	Program Pengelolaan Pelayaran	24.859.935.294	22.185.734.044	89,24	Dinas Perhubungan
		57	Program Aplikasi Informatika	17.832.951.300	16.342.518.808	91,64	Dinas Komunikasi dan Informatika



NO	SASARAN	PROGRAM PD PENDUKUNG VIS DAN MISI KEPALA DAERAH	ANGGARAN			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	
			PAGU	REALISASI	%		
Tujuan 5							
Meningkatkan Fungsi Ekologi Lingkungan Hidup							
Rata-rata Capaian							
11	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	58	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	4.791.564.100	4.039.731.759	84,31	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
		59	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	298.198.000	255.825.150	85,79	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
		60	Program Pengelolaan Persampahan	15.880.794.980	14.912.841.262	93,90	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Rata-rata Capaian							
MISI KE 4							
MENINGKATKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BERWIBAWA, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL							
Tujuan 6 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bebas Korupsi							
12	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	61	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	496.103.186.875	477.541.162.879	96,26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		62	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	9.372.514.200	7.749.512.142	82,68	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		63	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	6.052.434.700	5.416.938.171	89,50	Badan Pendapatan Daerah
		64	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	750.000.000	740.757.317	98,77	Badan Pendapatan Daerah
		65	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	4.359.846.800	4.101.626.667	94,08	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
		66	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan	4.680.090.400	4.294.608.028	91,76	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan



NO	SASARAN	PROGRAM PD PENDUKUNG VIS DAN MISI KEPALA DAERAH	ANGGARAN			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			PAGU	REALISASI	%	
		Pembangunan Daerah				
		67 Program Penyelenggaraan Pengawasan	4.860.487.980	3.907.555.403	80,39	Inspektorat
		68 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	2.108.587.400	1.731.687.201	82,12	Inspektorat
		69 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	44.346.905.426	31.556.554.884	71,2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
		70 Program Administrasi Umum/Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	85.341.943.928	75.362.196.582	88,31	Sekretariat Daerah
		71 Program Penataan Desa	471.544.000	261.582.626	55,47	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
Rata-rata Capaian						
13	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan daerah	72 Program Kepegawaian Daerah	6.147.046.800	5.562.987.714	90,50	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		73 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.174.088.000	7.395.234.775	90,47	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		74 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	211.999.800	144.002.856	67,93	Kecamatan Tanjung Redeb
		75 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	34.998.000	13.239.000	37,83	Kecamatan Tanjung Redeb
		76 Program Administrasi Pemerintahan Desa	4.732.599.000	3.986.691.510	84,24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
Rata-rata Capaian						



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Pada tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Berau tidak menerima dan melaksanakan tugas pembantuan baik dari Pemerintah maupun dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.



BAB IV
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL

4.1 Urusan Pendidikan

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar SPM urusan Pendidikan adalah :

- a) Pendidikan Dasar dengan Indikator Pencapaian adalah Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar
- b) Pendidikan Kesetaraan dengan Indikator Pencapaian adalah Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan
- c) Pendidikan Anak Usia Dini dengan Indikator Pencapaian Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD

4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Table IV.1

Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		
1	Pendidikan Anak Usia Dini		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	7751
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output
	1 . Angka partisipasi sekolah	%	100
	2 . Angka partisipasi murni	%	100
	3 . Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	50.49.00
	4 . Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%	57.02.00
	5 . Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	00.33
	6 . Kecukupan formasi guru ASN	%	0
	7 . Indeks distribusi guru	%	00.05
	8 . Proporsi PTK bersertifikat	%	15.46
	9 . Proporsi PTK penggerak*	%	0
2	Pendidikan Dasar		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total
			Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	46134
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	SD		
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	56.91
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	41.02.00
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	64.18.00
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	53.45.00
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	75.92
	8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	74.17.00
	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	61.85
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	0
	11 . Indeks distribusi guru	%	00.04
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	19.08
	13 . Proporsi PTK penggerak*	%	0



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output
	SMP		
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	72.09.00
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	68.16.00
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	75.71
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	65.87
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	75.24.00
	8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	72.47.00
	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	61.72
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	03.17
	11 . Indeks distribusi guru	%	00.35
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	23.07
	13 . Proporsi PTK penggerak*	%	0
3	Pendidikan Kesetaraan		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total
			Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1040
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	100
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	100
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	80.59.00
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	81.73
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	70.26.00
	8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	61.68
	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	56.08.00
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	0
	11 . Indeks distribusi guru	%	0



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	0
	13 . Proporsi PTK penggerak*	%	0

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Berau 2024

4.1.3 Realisasi

Table IV.2
Realisasi

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output		Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM				93.38 %
1	Pendidikan Anak Usia Dini				94.21 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	80.00 %
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	7751	7751	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				14.21 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	71.06 %
	1 . Angka partisipasi sekolah	%	100	77.43.00	77.43 %
	2 . Angka partisipasi murni	%	100	69.76	69.76 %
	3 . Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	50.49.00	50.43.00	99.88 %
	4 . Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%	57.02.00	52.89	92.47 %
	5 . Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	00.33	00.33	100.00 %
	6 . Kecukupan formasi guru ASN	%	0	0	0.00 %
	7 . Indeks distribusi guru	%	00.05	00.05	100.00 %
	8 . Proporsi PTK bersertifikat	%	15.46	15.46	100.00 %
	9 . Proporsi PTK penggerak*	%	0	0	0.00 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output		Total Pencapaian
2	Pendidikan Dasar				96.88 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	80.00 %
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	46134	46134	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				16.88 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	84.39 %
	SD				81.06 %
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100	104.52.00	100.00 %
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	99.64	99.64 %
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	56.91	64.18.00	100.00 %
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	41.02.00	53.45.00	100.00 %
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	64.18.00	61.24.00	95.42 %
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	53.45.00	44.22.00	82.73 %
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	75.92	70.51.00	92.87 %
	8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	74.17.00	71.89	96.93 %
	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	61.85	53.27.00	86.13 %
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	0	0	0.00 %
	11 . Indeks distribusi guru	%	00.04	00.04	100.00 %
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	19.08	19.08	100.00 %
	13 . Proporsi PTK penggerak*	%	0	0	0.00 %
	SMP				87.72 %
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100	109.49.00	100.00 %
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	96.79	96.79 %
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	72.09.00	75.71	100.00 %
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	68.16.00	65.87	96.64 %
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	75.71	70.23.00	92.76 %
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	65.87	47.03.00	71.40 %
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	75.24.00	69.65	92.57 %
	8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	72.47.00	73.54.00	100.00 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output		Total Pencapaian
	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	61.72	55.67	90.20 %
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	03.17	03.17	100.00 %
	11 . Indeks distribusi guru	%	00.35	00.35	100.00 %
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	23.07	23.07	100.00 %
	13 . Proporsi PTK penggerak*	%	0	0	0.00 %
3	Pendidikan Kesetaraan				89.06 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	80.00 %
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1040	1040	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				9.06 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	45.31 %
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100	0,847916667	19.81 %
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	0,847916667	19.81 %
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	100	74.44.00	74.44 %
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	100	77.33.00	77.33 %
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	80.59.00	46.55.00	57.76 %
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	81.73	32.06.00	39.89 %
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	70.26.00	70.26.00	100.00 %
	8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	61.68	61.68	100.00 %
	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	56.08.00	56.08.00	100.00 %
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	0	0	0.00 %
	11 . Indeks distribusi guru	%	0	0	0.00 %
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	0	0	0.00 %
	13 . Proporsi PTK penggerak*	%	0	0	0.00 %

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Berau 2024



4.1.4 Alokasi Anggaran

a. Anggaran Dasar

Table IV.3
Anggaran Dasar

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KAB. BERAU	6,999,194,000,000
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	0
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	1,608,401,071,444
	APBD	1,608,401,071,444
	A. APBD MURNI	804,200,535,722
	B. APBD DAU	627,120,526,722
	C. APBD DAK FISIK	7,214,112,000
	D. APBD DAK NON FISIK	169,865,897,000
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Berau 2023

b. Rincian kegiatan

Table IV.4
Rincian Kegiatan

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN	SERAPAN		
I	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				255.150.694.994	235.695.419.707	92.37 %	
	I	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				99.229.656.672	93.818.789.977	94.55 %
		I	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	4.387.823.399	4.023.299.858	91.69 %	



No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		5	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	13,527,164,682	13,249,887,036	97.95 %
		6	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	1,549,931,780	1,497,092,000	96.59 %
		10	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	579,376,980	493,776,000	85.23 %
		11	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	11,477,550,800	11,410,174,854	99.41 %
		15	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Peserta didik	4,171,000,000	3,747,062,000	89.84 %
		16	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	425,636,000	402,668,360	94.60 %
		17	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta didik	250,000,000	177,375,500	70.95 %
		18	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	15,000,000	14,984,600	99.90 %
		19	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	917,998,600	665,106,863	72.45 %
		20	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	175,000,000	80,106,360	45.78 %
		21	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Satuan Pendidikan	34,886,282,093	33,573,061,046	96.24 %
		22	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang	1,350,000,000	1,066,239,199	78.98 %
		27	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	100,000,000	93,684,000	93.68 %
		28	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	90,089,700	83,579,700	92.77 %
		29	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	150,000,000	117,634,000	78.42 %
		30	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	187,000,000	185,950,000	99.44 %
		31	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	75,000,000	61,718,000	82.29 %
		32	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas	50,000,000	37,961,000	75.92 %
		34	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan	Kegiatan	200,000,000	168,309,407	84.15 %



No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN	
			pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi					
		36	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	100,000,000	92,000,000	92.00 %	
		37	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	100,000,000	93,450,000	93.45 %	
		38	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	14,209,816,139	12,963,029,946	91.23 %	
		40	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	400,000,000	336,654,899	84.16 %	
		41	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	599,999,900	365,870,900	60.98 %	
		42	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	9,254,986,599	8,818,114,449	95.28 %	
	JUMLAH INDIKATOR					99,229,656,672	93,818,789,977	94.55 %
	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama K20240327110647			117,338,220,962	109,696,228,128	93.49 %	
		1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	2,244,994,452	1,760,437,069	78.42 %	
		2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	1,451,925,000	1,181,925,188	81.40 %	
		3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	1,128,000,000	1,000,062,440	88.66 %	
		4	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	1,124,999,902	1,106,055,798	98.32 %	
		5	Pembangunan Laboratorium	Ruang	3,481,820,654	3,049,657,650	87.59 %	
		8	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	749,998,760	547,952,103	73.06 %	
		11	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	9,999,999,775	9,724,919,164	97.25 %	
		12	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	8,789,999,630	8,274,467,232	94.14 %	
		15	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Ruang	449,999,003	409,429,009	90.98 %	
		17	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	674,998,975	565,538,794	83.78 %	
		21	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	20,049,999,410	19,871,384,029	99.11 %	
		23	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	7,300,613,500	7,217,444,125	98.86 %	



No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		25	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta didik	20.049.999,410	19.871.384,029	99.11 %
		26	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Paket	0	0	0%
		27	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	398.475.000	381.600.000	95.77 %
		28	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta didik	403.540.000	287.082.471	71.14 %
		29	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	30.000.000	25.350,042	84.50 %
		30	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	920.879,600	539.814,497	58.62 %
		31	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	845.880.000	592.308,123	70.02 %
		32	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Satuan Pendidikan	16.373.952,530	15.736.329,472	96.11 %
		33	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang	899.999,500	602.829,123	66.98 %
		38	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	150.000.000	125,152,892	83.44 %
		39	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	149.999,400	102.439,400	68.29 %
		40	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	150.000.000	126.320,042	84.21 %
		41	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	221,147,000	206.709,000	93.47 %
		43	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas	150.000.000	120,940,000	80.63 %
		44	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	400.000.000	349.502,288	87.38 %
		47	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	626.999,600	407.582,447	65.01 %
		48	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	17,519,999,861	15,062,418,521	85.97 %



No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		49	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	100.000.000	59.734.680	59.73 %
		50	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	100.000.000	95.118.500	95.12 %
		51	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	300.000.000	294.340.000	98.11 %
	3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			33.297.017.398	28.937.062.920	86.91 %
		1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit	4.486.069.940	4.194.436.200	93.50 %
		2	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Unit	916.413.800	878.241.000	95.83 %
		4	Pengadaan Mebel PAUD	Paket	446.260.000	337.427.000	75.61 %
		6	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Paket	2.081.374.000	1.988.683.740	95.55 %
		7	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Peserta didik	5.579.309.307	3.774.698.207	67.66 %
		8	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Paket	380.000.000	370.867.600	97.60 %
		9	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Peserta didik	8.094.997.000	7.770.801.690	96.00 %
		10	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Orang	35.000.000	32.098.624	91.71 %
		11	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Orang	813.000.000	437.861.363	53.86 %
		12	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidikan	674.999.500	477.598.460	70.76 %
		13	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Satuan Pendidikan	5.209.599.331	4.605.254.878	88.40 %
		14	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang	400.000.000	304.751.693	76.19 %
		18	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	0	0	0%
		19	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	45.000.000	1.800.000	4.00 %
		20	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	235.000.000	159.709.780	67.96 %
		21	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	35.000.000	4.800.000	13.71 %



No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN	
		23	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas	25.000.000	20.237.000	80.95 %	
		28	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Peserta didik	100.000.000	78.242.000	78.24 %	
		29	Pertengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	50.000.000	49.340.000	98.68 %	
		31	Pembertan layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	50.000.000	38.242.000	76.48 %	
		33	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	50.000.000	37.583.800	75.17 %	
		34	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	2.499.998.760	2.307.224.285	92.29 %	
		35	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	1.089.995.760	1.067.163.600	97.91 %	
	4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				5.285.799.962	3.243.338.682	61.36 %
		1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Unit	0	0	0%	
		2	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Peserta didik	150.000.000	0	0%	
		3	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Paket	49.999.650	31.499.000	63.00 %	
		4	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	0	0	0%	
		5	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	320.000.000	278.167.680	86.93 %	
		6	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan	199.999.800	170.937.748	85.47 %	
		7	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan	1.970.002.112	1.590.979.810	80.76 %	



No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		8	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Orang	225.200.000	193.630.731	85.98 %
		11	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	30.000.000	22.452.200	74.84 %
		12	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	30.000.000	21.416.100	71.39 %
		13	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	30.000.000	19.096.500	63.66 %
		14	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	75.000.000	29.910.000	39.88 %
		15	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	50.000.000	38.726.713	77.45 %
		16	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas	5.000.000	3.409.000	68.18 %
		17	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	10.000.000	9.290.000	92.90 %
		22	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	50.000.000	48.199.000	96.40 %
		23	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	100.000.000	82.067.400	82.07 %
		28	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	30.000.000	17.630.000	58.77 %
		32	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Peserta didik	1.960.598.400	685.926.800	34.99 %

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Berau 2024



4.1.5 Dukungan Personil

Table IV.5
Dukungan personil PNS

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PNS	LK	PR	Guru	JFT	PENDIDIKAN						
							SD/ SMP	SMA	DI/ DII	DIII	DIV/ S1	S2	S3
1	DINAS PENDIDIKAN	1.621	690	931	1.339	25	20	237	78	16	1.222	48	-

Dukungan personil PPPK

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	PPPK		
		LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PPPK
1	DINAS PENDIDIKAN	372	735	1.107

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Berau 2024

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

a. PENGUMPULAN DATA

Permasalahan:

1. Proses pengumpulan data SPM bidang pendidikan mengalami kendala pada saat menghitung selisih jumlah penduduk usia sekolah 7-18 Th antara data Disdukcapil dengan Data Kemendikbud yang bersumber dari Dapodik terjadi perbedaan dimana angka dari data base Dapodik lebih banyak dari angka yang bersumber Disdukcapil, sehingga menyebabkan perhitungan yang seharusnya akan dilayani tidak sinkron
2. Masih rendahnya pemahaman terkait Standar Pelayanan Minimal pendidikan terutama pada Bidang teknis sebagai pelaksana kegiatan yang mendukung capaian SPM
3. Belum adanya intervensi terhadap penduduk usia sekolah yang belum bersekolah
4. Masih terdapat beberapa sekolah belum menyelesaikan pengisian Sulingjar dan Asesmen Nasional



Solusi:

1. Pemerintah Daerah perlu memperhatikan dan mengupayakan adanya sarana dan prasarana yang mendukung akses internet khususnya daerah yang masih kategori blank spot
2. perlu adanya bimtek secara berkala
3. perlu adanya rapat koordinasi secara berkala diinternal Dinas Pendidikan
4. Perlu adanya dukungan anggaran terhadap kegiatan tersebut
5. karena kaitannya dengan lintas OPD, hanya memberikan saran saja untuk OPD yang menangani agar dapat pro aktif lagi pemetaan terhadap penduduk non dokumen

b. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN

Permasalahan:

1. Indikator-indikator yang ada pada setiap layanan baik Paud, Pendidikan Dasar dan Kesetaraan kegiatan operasional yang mengacu pada Permendikbudristek terbaru Nomor 32 tahun 2022 secara detail belum dirincikan sehingga kesulitan dalam hal perhitungan kebutuhan
2. Pada bidang teknis sebagai pelaksana kegiatan operasional SPM persentase kegiatan yang mendukung SPM masih minim Antara dokumen perencanaan dengan sistem untuk penganggaran belum sepenuhnya terhubung sehingga kesulitan dalam memunculkan sub kegiatan yang mendukung pemenuhan capaian SPM

Solusi:

1. perlu dilakukan koordinasi ke tingkat propinsi atau ke tingkat pusat yaitu Kemendikbud
2. Sub kegiatan yang belum ada pada dokumen anggaran perlu di ajukan kembali ke bidang anggaran dengan catatan sudah bersama sama memahami SPM itu sendiri

c. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Permasalahan:



1. Antara perencanaan yang mendukung capaian pemenuhan SPM terhadap penganggaran belum terintegrasi dengan baik.
2. Contoh operasional kegiatan yang mendukung SPM pada masing-masing indikator belum terlihat dengan detail

Solusi:

1. perlu adanya integrasi terarah antara OPD dan Bagian Penganggaran
2. Masih menunggu perubahan dari Kemendagri pada aplikasi E-SPM

d. PELAKSANAAN

Permasalahan:

1. Pelaksanaan kegiatan operasional yang mendukung SPM masih relatif sangat kecil dan belum maksimal.
2. Banyak ditemukannya sub kegiatan yang tidak sesuai antara isi dan nama programnya

Solusi:

1. perlu adanya upaya peningkatan dari sisi penganggaran secara signifikan terhadap kegiatan operasional yang mendukung capaian SPM
2. perlu adanya koordinasi secara internal dan berkala

e. LAIN – LAIN

Permasalahan:

Capaian angka partisipasi sekolah belum 100% terutama anak usia PAUD 5-6 Th dan Pendidikan Dasar khususnya SMP 13-15 Th, dikarenakan sasarannya masih pada siswa yang bersekolah sementara penduduk usia sekolah yang belum sama sekali bersekolah belum di programkan

4.2 Urusan Kesehatan

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar SPM urusan Kesehatan adalah

- a) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dengan indikator pencapaian Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan



- b) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin dengan indikator pencapaian Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan
- c) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir dengan indikator pencapaian Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan
- d) Pelayanan kesehatan balita dengan indikator pencapaian Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan
- e) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan
- f) Pelayanan kesehatan pada usia produktif, dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan
- g) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut dengan indikator pencapaian Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan
- h) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan
- i) Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan
- j) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan
- k) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan
- l) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara dengan



risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan

4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Table IV.6

Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS MADYA
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	4995
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Vaksin	4995
	2 . Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tablet	979020
	3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Orang	4995
	4 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	218
	5 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	0
	6 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	Paket	544
	7 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	4995
	8 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	4995
	9 . Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	6000
	10 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	21
	11 . Gel USG (untuk Puskesmas yang memiliki alat USG) (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	Botol	226



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output
	12 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi; (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)"	Orang	5
	13 . Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	415
	14 . Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang	302
	15 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	53
	16 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	35
	17 . Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)	Orang	4776
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	4945
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	1 . Formulir partograf	Formulir	0
	2 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	4945
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) (Terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)	Buku	6000
	4 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	21
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	Orang	5
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	Paket	302
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal : dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	415



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output
	8 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	53
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	35
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total
			Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	4666
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	1 . Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	4666
	2 . Vitamin K1 injeksi	Ampul	4666
	3 . Salep/tetes mata antibiotik	Orang	4666
	4 . Formulir bayi baru lahir	Formulir	4666
	5 . Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	Formulir	4666
	6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	6000
	7 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	21
	8 . Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	3
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	302
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	415
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	53
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	53
	13 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	35
	14 . Kader Kesehatan	Orang	2423
4	Pelayanan Kesehatan Balita		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total
			Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	23621
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	1 . Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Dokumen	23621
	2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir	23621
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Orang	6000
	4 . Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	Kapsul	23621
	5 . Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	Kapsul	23621
	6 . Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	700
	7 . Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	786
	8 . Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	786
	9 . Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin	2055
	10 . Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin	930
	11 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	Vaksin	2055
	12 . Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	Vaksin	930
	13 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	21
	14 . Peralatan Anafilaktik	Paket	21
	15 . Formula Terapi Gizi Buruk	Paket	1250
	16 . Tenaga medis : Dokter	Orang	52
	17 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	302
	18 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	415
	19 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	35
	20 . Guru PAUD	Orang	229
	21 . Kader Kesehatan	Orang	2423
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	49862
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	1 . Form pencatatan/buku rapor kesehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)	Buku	49862
	2 . Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	Buku	49862
	3 . Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	Dokumen	49862
	4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)	Formulir	49862
	5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)	Formulir	49862
	6 . Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opnameyang ada di gudangfarmasi kabupaten/kota)	Tablet	510870
	7 . Alat Pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Alat	21
	8 . Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Strip	0
	9 . Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	Paket	21
	10 . Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	Vaksin	20375
	11 . Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang	17
	12 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	302
	13 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	415



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output
	14 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	35
	15 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	53
	16 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	86
	17 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	3594
	18 . Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	Orang	0
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	159781
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	21
	2 . Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Unit	21
	3 . Alat : Tensimeter	Unit	21
	4 . Alat : Glukometer	Unit	21
	5 . Alat: Alat Pemeriksa Hb	Unit	21
	6 . Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Unit	21
	7 . Alat : KIT IVA Tes	Unit	21
	8 . Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	21
	9 . Kit Ophthalmologi Komunitas	Unit	0
	10 . Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/PPOK)	Dokumen	21
	11 . Alat Pelayanan KB	Unit	3
	12 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	21
	13 . Vaksin Tetanus Difteri (td)	Ampul	159781
	14 . Tenaga medis : Dokter	Orang	52
	15 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	302
	16 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	415
	17 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	35



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output
	18 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	86
	19 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	0
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total
			Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	19021
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	1 . Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	21
	2 . Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	21
	3 . Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	21
	4 . Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	21
	5 . Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	0
	6 . Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	19021
	7 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	21
	8 . Tenaga medis : Dokter	Orang	52
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	302
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	415
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	35
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	86
	13 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	0
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total
			Yang Harus Dilayani



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	15499
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	1 . Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	Paket	21
	2 . Obat Hipertensi	Paket	356200
	3 . Tensimeter (mengukur tekanan darah)	Unit	21
	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Aplikasi	1
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	Paket	0
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	52
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	302
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	415
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	35
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	53
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	53
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	86
9,00	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	4010
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	1 . Obat Diabetes Melitus	Paket	221630
	2 . Fotometer atau Glukometer (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	Unit	21



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output
	3 . BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	21
	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	1
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular)	Paket	21
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	52
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	302
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	415
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	53
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	86
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	35
	12 . Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	47
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	190
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	1 . Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) bentuk fisik atau elektronik)	Buku	21
	2 . Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)	Jenis	0
	3 . Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi	Formulir	2425



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output
	(instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)		
	4 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	Formulir	1
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	21
	6 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	52
	7 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	Orang	20
	8 . Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	Orang	6
	9 . Tenaga profesional lainnya	Orang	0
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	6211
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	0
	2 . Reagen Zn TB	Kit	109
	3 . Masker bedah dan Masker N95	Paket	6211
	4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	6211
	5 . Katrid tes cepat molekuler	Test	0
	6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	21
	7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	21
	8 . Tuberkulin	Vial	239
	9 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	4
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	786
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	212
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	99



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output
	13 . Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	96
	14 . Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	0
	15 . Kader Kesehatan	Orang	2382
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total
			Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	6199
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	21
	2 . Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Test	6199
	3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	6199
	4 . Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket	6199
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	6
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	302
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	415
	8 . Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	47
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	86
	10 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Berau 2023



4.2.3 Realisasi

Table IV.7

Realisasi

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output		Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS MADYA		85.32 %
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				79.09 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	60.51 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	4995	3778	75.64 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				18.58 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	92.89 %
	1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Vaksin	4995	4995	100.00 %
	2 . Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tablet	979020	979020	100.00 %
	3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Orang	4995	4995	100.00 %
	4 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	218	218	100.00 %
	5 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	0	0	0.00 %
	6 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	Paket	544	544	100.00 %
	7 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	4995	4995	100.00 %
	8 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	4995	4995	100.00 %
	9 . Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	6000	6000	100.00 %
	10 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	21	21	100.00 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output		Total Pencapaian
	11 . Gel USG (untuk Puskesmas yang memiliki alat USG) (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	Botol	226	226	100.00 %
	12 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi; (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)"	Orang	5	5	100.00 %
	13 . Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	415	415	100.00 %
	14 . Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang	302	302	100.00 %
	15 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	53	53	100.00 %
	16 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	35	35	100.00 %
	17 . Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)	Orang	4776	3778	79.10 %
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				90.09 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	72.32 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	4945	4470	90.39 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				17.78 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	88.89 %
	1 . Formulir partograf	Formulir	0	0	0.00 %
	2 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	4945	4945	100.00 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output		Total Pencapaian
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) (Terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)	Buku	6000	6000	100.00 %
	4 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	21	21	100.00 %
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	Orang	5	5	100.00 %
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	Paket	302	302	100.00 %
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal : dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	415	415	100.00 %
	8 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	53	53	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	35	35	100.00 %
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				82.44 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	62.44 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	4666	3642	78.05 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	4666	4666	100.00 %
	2 . Vitamin K1 injeksi	Ampul	4666	4666	100.00 %
	3 . Salep/tetes mata antibiotik	Orang	4666	4666	100.00 %
	4 . Formulir bayi baru lahir	Formulir	4666	4666	100.00 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output		Total Pencapaian
	5 . Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	Formulir	4666	4666	100.00 %
	6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	6000	6000	100.00 %
	7 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	21	21	100.00 %
	8 . Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	3	3	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	302	302	100.00 %
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	415	415	100.00 %
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	53	53	100.00 %
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	53	53	100.00 %
	13 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	35	35	100.00 %
	14 . Kader Kesehatan	Orang	2423	2423	100.00 %
4	Pelayanan Kesehatan Balita				82.50 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	62.50 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	23621	18455	78.13 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Dokumen	23621	23621	100.00 %
	2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir	23621	23621	100.00 %
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Orang	6000	6000	100.00 %
	4 . Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	Kapsul	23621	23621	100.00 %
	5 . Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	Kapsul	23621	23621	100.00 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output		Total Pencapaian
	6 . Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	700	700	100.00 %
	7 . Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	786	786	100.00 %
	8 . Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	786	786	100.00 %
	9 . Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin	2055	2055	100.00 %
	10 . Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin	930	930	100.00 %
	11 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	Vaksin	2055	2055	100.00 %
	12 . Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	Vaksin	930	930	100.00 %
	13 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	21	21	100.00 %
	14 . Peralatan Anafilaktik	Paket	21	21	100.00 %
	15 . Formula Terapi Gizi Buruk	Paket	1250	1250	100.00 %
	16 . Tenaga medis : Dokter	Orang	52	52	100.00 %
	17 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	302	302	100.00 %
	18 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	415	415	100.00 %
	19 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	35	35	100.00 %
	20 . Guru PAUD	Orang	229	229	100.00 %
	21 . Kader Kesehatan	Orang	2423	2423	100.00 %
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar				80.20 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	61.31 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	49862	38212	76.64 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				18.89 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	94.44 %
	1 . Form pencatatan/buku rapor kesehatanku	Buku	49862	49862	100.00 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output		Total Pencapaian
	(Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)				
	2 . Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	Buku	49862	49862	100.00 %
	3 . Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	Dokumen	49862	49862	100.00 %
	4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)	Formulir	49862	49862	100.00 %
	5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)	Formulir	49862	49862	100.00 %
	6 . Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan 52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opname yang ada di gudangfarmasi kabupaten/kota)	Tablet	510870	510870	100.00 %
	7 . Alat Pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Alat	21	21	100.00 %
	8 . Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Strip	0	0	0.00 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output		Total Pencapaian
	9 . Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	Paket	21	21	100.00 %
	10 . Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	Vaksin	20375	20375	100.00 %
	11 . Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang	17	17	100.00 %
	12 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	302	302	100.00 %
	13 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	415	415	100.00 %
	14 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	35	35	100.00 %
	15 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	53	53	100.00 %
	16 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	86	86	100.00 %
	17 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	3594	3594	100.00 %
	18 . Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	Orang	0	0	100.00 %
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif				58.27 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	39.33 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	159781	78545	49.16 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				18.95 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	94.74 %
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	21	21	100.00 %
	2 . Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Unit	21	21	100.00 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output		Total Pencapaian
	3 . Alat : Tensimeter	Unit	21	21	100.00 %
	4 . Alat : Glukometer	Unit	21	21	100.00 %
	5 . Alat: Alat Pemeriksa Hb	Unit	21	21	100.00 %
	6 . Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Unit	21	21	100.00 %
	7 . Alat : KIT IVA Tes	Unit	21	21	100.00 %
	8 . Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	21	21	100.00 %
	9 . Kit Opthalmologi Komunitas	Unit	0	0	0.00 %
	10 . Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/PPOK)	Dokumen	21	21	100.00 %
	11 . Alat Pelayanan KB	Unit	3	3	100.00 %
	12 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	21	21	100.00 %
	13 . Vaksin Tetanus Difteri (td)	Ampul	159781	159781	100.00 %
	14 . Tenaga medis : Dokter	Orang	52	52	100.00 %
	15 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	302	302	100.00 %
	16 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	415	415	100.00 %
	17 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	35	35	100.00 %
	18 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	86	86	100.00 %
	19 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	0	0	100.00 %
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut				64.31 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	47.38 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	19021	11266	59.23 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				16.92 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	84.62 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output		Total Pencapaian
	1 . Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	21	21	100.00 %
	2 . Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	21	21	100.00 %
	3 . Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	21	21	100.00 %
	4 . Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	21	21	100.00 %
	5 . Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	0	0	0.00 %
	6 . Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	19021	19021	100.00 %
	7 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	21	21	100.00 %
	8 . Tenaga medis : Dokter	Orang	52	52	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	302	302	100.00 %
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	415	415	100.00 %
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	35	35	100.00 %
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	86	86	100.00 %
	13 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	0	0	0.00 %
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				98.33 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	15499	20938	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				18.33 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	91.67 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output		Total Pencapaian
	1 . Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	Paket	21	21	100.00 %
	2 . Obat Hipertensi	Paket	356200	356200	100.00 %
	3 . Tensimeter (mengukur tekanan darah)	Unit	21	21	100.00 %
	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Aplikasi	1	1	100.00 %
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	Paket	0	0	0.00 %
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	52	52	100.00 %
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	302	302	100.00 %
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	415	415	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	35	35	100.00 %
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	53	53	100.00 %
	11 . Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	Orang	53	53	100.00 %
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	86	86	100.00 %
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	4010	5171	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	100.00 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output		Total Pencapaian
	1 . Obat Diabetes Melitus	Paket	221630	221630	100.00 %
	2 . Fotometer atau Glukometer (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	Unit	21	21	100.00 %
	3 . BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	21	21	100.00 %
	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	1	1	100.00 %
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular)	Paket	21	21	100.00 %
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	52	52	100.00 %
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	302	302	100.00 %
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	415	415	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	53	53	100.00 %
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	86	86	100.00 %
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	35	35	100.00 %
	12 . Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	47	47	100.00 %
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat				95.56 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	80.00 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output		Total Pencapaian
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	190	230	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				15.56 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	77.78 %
	1 . Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) bentuk fisik atau elektronik)	Buku	21	21	100.00 %
	2 . Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)	Jenis	0	0	0.00 %
	3 . Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	Formulir	2425	2425	100.00 %
	4 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	Formulir	1	1	100.00 %
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	21	21	100.00 %
	6 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	52	52	100.00 %
	7 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	Orang	20	20	100.00 %
	8 . Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	Orang	6	6	100.00 %
	9 . Tenaga profesional lainnya	Orang	0	0	0.00 %
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				96.00 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output		Total Pencapaian
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	6211	6781	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				16.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	80.00 %
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	0	0	0.00 %
	2 . Reagen Zn TB	Kit	109	109	100.00 %
	3 . Masker bedah dan Masker N95	Paket	6211	6211	100.00 %
	4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	6211	6211	100.00 %
	5 . Katrid tes cepat molekuler	Test	0	0	0.00 %
	6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	21	21	100.00 %
	7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	21	21	100.00 %
	8 . Tuberkulin	Vial	239	239	100.00 %
	9 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	4	4	100.00 %
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	786	786	100.00 %
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	212	212	100.00 %
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	99	99	100.00 %
	13 . Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	96	96	100.00 %
	14 . Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	0	0	0.00 %
	15 . Kader Kesehatan	Orang	2382	2382	100.00 %
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang				97.02 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output		Total Pencapaian
	Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)				
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	77.02 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	6199	5968	96.27 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	21	21	100.00 %
	2 . Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Test	6199	6199	100.00 %
	3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	6199	6199	100.00 %
	4 . Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket	6199	6199	100.00 %
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	6	6	100.00 %
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	302	302	100.00 %
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	415	415	100.00 %
	8 . Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	47	47	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	86	86	100.00 %
	10 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	0	0	100.00 %

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Berau 2024



4.2.4 Alokasi Anggaran

a. Anggaran Dasar

Table IV.8
Anggaran dasar

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KAB. BERAU	6,999,194,000,000
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	361,978,169,694
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	5,443,726,800
	APBD	5,443,726,800
	A. APBD MURNI	5,443,726,800
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Berau 2024

b. Rincian Kegiatan

Table IV.9
Rincian Kegiatan

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				5,443,726,800	4,647,201,983	85.37 %
1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			5,443,726,800	4,647,201,983	85.37 %



PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
	1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Orang	1,369,380,000	964,054,901	70.40 %
	2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Orang	986,000,000	790,704,340	80.19 %
	3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	248,565,100	213,112,714	85.74 %
	4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Orang	568,468,000	548,160,460	96.43 %
	5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	190,000,000	173,698,041	91.42 %
	6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Orang	100,000,000	68,361,055	68.36 %
	7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	272,370,200	269,005,655	98.76 %
	8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang	50,000,000	43,730,000	87.46 %
	9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Orang	457,934,900	443,292,000	96.80 %
	10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	180,000,000	169,401,130	94.11 %



PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
	11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	891,010,600	853,993,687	95.85 %
	12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang	129,998,000	109,688,000	84.38 %

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Berau 2024

4.2.5 Dukungan Personil

Table IV.10

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Urusan Kesehatan

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PEGAWAI	LK	PR	JFT	NAKES	PENDIDIKAN						
							SD/ SMP	SMA	DI/ DII	DIII	DIV/ S1	S2	S3
1	DINAKESEHATAN	678	224	424	9	484	2	49	3	350	198	56	-
2	RSUD DR. ABDUL RIVAI	477	145	332	1	368	16	43	2	238	92	86	-

Dukungan Tenaga PPPK

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	PPPK		
		LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PPPK
1	DINAS KESEHATAN	101	311	412
2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ABDUL RIVAI	29	75	104

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Berau 2024

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

a. PENGUMPULAN DATA

Permasalahan:



1. Keterlambatan pihak PUSKESMAS dalam penyampaian data kebidang.

2. Kurangnya koordinasi / MOU pihak jejaring dengan puskesmas

Solusi:

1. Melakukan Sosialisasi Penginputan, Pencatatan dan Pelaporan

2. Melakukan Perubahan kesepakatan ulang oleh Puskesmas terkait pengumpulan data SPM

3. Selalu melakukan Monitoring Laporan di share setiap minggunya di grup masing masing pengelola program

b. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN

Permasalahan:

1. masih banyak Masyarakat melakukan pemeriksaan klinik kesehatan

2. Besarnya Jumlah sasaran sehingga terjadi perbedaan antara sasaran kabupaten dengan sasaran rill

3. Target atau sasaran pindah sehingga perhitungan tidak sesuai yang diharapkan

4. Kurang/Rendahnya kesadaran masyarakat untuk datang melakukan pemeriksaan di Puskesmas

5. Penyebaran nakes dan dokter yang tidak merata

6. Masih Kurangnya Kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeriksaan rutin/berkala bagi lansia

7. Lansia lebih percaya melakukan pemeriksaan rutin di dokter praktek maupun rumah sakit daripada ke posyandu maupun Puskesmas

Solusi:

1. Melakukan Pemetaan/Perhitungan ulang target / sasaran

2. Melakukan Sosialisasi kepada Masyarakat bahwa melakukan pemeriksaan Kepuskesmas sangat lah penting

3. Melakukan penataan sebaran nakes dan dokter dan sumberdaya kesehatan lainnya.



4. melakukan Kordinasi oleh pihak klinik terkait data masyarakat yang melakukan pemeriksaan di klinik kesehatan

c. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Permasalahan:

Dana minim bagi beberapa kegiatan..

Solusi:

1. Alokasi Dana bagi pelayanan yang kekurangan anggaran
2. Mengusulkan ulang anggaran sesuai kebutuhan program

d. PELAKSANAAN

Permasalahan:

1. Kurang/Rendahnya kesadaran masyarakat untuk datang melakukan pemeriksaan di Puskesmas
2. Petugas yang belum terlatih dan kurang aktif dalam menjalankan program
3. Target yang menjadi sasaran pelayanan kesehatan pindah keluar kabupaten
4. Budaya dimasyarakat
5. Kurangnya petugas pelatih
6. Adanya penggantian petugas sehingga Program/Kegiatan dilaksanakan kurang maksimal
7. Belum ada puskesmas perkotaan (Tanjung Redeb, puskesmas Kampung Bugis, Smbaliung, Gunung tabur dan Teluk bayur) tidak ada Puskesmas yang melaksanakan layanan persalinan 24 Jam

Solusi:

1. Faskes harus mampu mengcover kegiatan SPM
2. Melakukan Sosialisasi ke Masyarakat
3. Melaksanakan Pelatihan Bagi Petugas Pelaksana
4. Melakukan Pemetaan/Perhitungan ulang target / sasaran
5. Pengusulan Puskesmas Perkotaan sebagai BLUD dan pelayanan 24 Jam.



e. LAIN – LAIN

Permasalahan:

1. Kurangnya informasi bagi penerima layanan kesehatan
2. Kondisi dilapangan yang tidak memungkinkan bagi penerima layanan untuk ke fasyankes
3. Kurangnya sosialisasi pencatatan pelaporan
4. Blangko atau form pengisian kegiatan tertentu tidak tersedia
Perubahan standar layanan dari K4 menjadi K6, yang mengikut sertakan layanan dokter pada TM 11 dan TM3 (32-36 minggu)
5. Rendahnya cakupan layanan Kunjungan ANC pada usia kehamilan <12 minggu ada satu puskesmas yang belum memiliki Dokter
6. Layanan Persalinan pada saat ini masih menggunakan Komposit layanan dengan 4 tangan

Solusi:

1. Melakukan Monitoring dan Evaluasi
2. Melakukan Sosialisasi Penginputan, Pencatatan dan Pelaporan

4.3 Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar SPM urusan Pekerjaan Umum adalah :

- a) Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- b) Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik



4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Table IV.11

Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA
01.00	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	8371
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	JARINGAN PERPIPAAN		
	1 Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	1385
	2 Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	393
	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN		
	3 Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	2
	4 Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	1
02.00	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	2045
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	1 Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	434



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output
	2 Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	Rumah Tangga	1
	3 Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septik sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	434

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Berau 2024

4.3.3 Realisasi

Table IV.12

Realisasi

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output		Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA		100.00 %
01.00	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	80.00 %
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	8371	8371	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	JARINGAN PERPIPAAN				
	1 Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	1385	1385	100.00 %
	2 Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak	Rumah Tangga	393	393	100.00 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output		Total Pencapaian
	berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau				
BUKAN JARINGAN PERPIPAAN					
	3 Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	2	2	100.00 %
	4 Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	1	1	100.00 %
02.00	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	80.00 %
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	2045	2045	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	434	434	100.00 %
	2 Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	Rumah Tangga	1	1	100.00 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output		Total Pencapaian
	3 Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	434	434	100.00 %

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Berau 2024

4.3.4 Alokasi Anggaran

a. Anggaran dasar

Table IV.13
Anggaran dasar

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KAB. BERAU	6,999,194,000,000
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	2,395,689,619,745
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	243,045,327,782
	APBD	243,045,327,782
	A. APBD MURNI	243,045,327,782
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Berau 2024



b. Rincian Kegiatan

Table IV.14
Rincian Kegiatan

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN	REALISASI	SERAPAN
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				213,763,577,782	208,488,297,735	97.53 %
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			213,763,577,782	208,488,297,735	97.53 %
		23	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Lembaga	471,000,000	290,797,082	61.74 %
		25	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dokumen	1,300,000,000	835,905,700	64.30 %
		28	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	96,246,967,782	94,616,076,236	98.31 %
		29	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Unit	9,474,250,000	9,085,416,220	95.90 %
		32	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	106,271,360,000	103,660,102,497	97.54 %
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				8,756,000,000	8,427,821,294	96.25 %
	2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota			8,756,000,000	8,427,821,294	96.25 %

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Berau 2023



4.3.5 Dukungan Personil

Table IV.15

Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PEGAWAI	LK	PR	JFT	PENDIDIKAN						
						SD/SMP	SMA	DI/DII	DIII	DIV/S1	S2	S3
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	101	81	20	18	-	33	-	6	47	15	-

Table IV.16

Dukungan Tenaga PPPK

NAMA PERANGKAT DAERAH	PPPK		
	LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PPPK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6	2	8

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Berau 2024

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

a. PENGUMPULAN DATA

Permasalahan:

1. Luasnya wilayah Kabupaten Berau yang meliputi 13 kecamatan dengan kondisi geografis berkontur, rentang jarak yang jauh dan pola Kampung/ permukiman yang sporadic dan berjauhan
2. butuh dilakukan update data secara berkala dikarenakan luasnya wilayah dan cepatnya data berubah
3. terbatasnya jumlah anggota yang melakukan pengumpulan data

Solusi:

1. Direncanakan untuk melakukan survey sekala berkala baik secara mandiri atau melalui konsultan individu
2. Penambahan anggota pengumpul data atau di bantu melalui mekanisme konsultan individu

b. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN



Permasalahan:

1. Jumlah penduduk Kabupaten Berau yang terus meningkat setiap tahunnya sehingga menyebabkan jumlah penduduk yang harus dilayani juga semakin meningkat
2. Dalam kondisi dan lokasi tertentu terjadi permasalahan status lahan yg muncul sebagai permasalahan baru.
3. tidak adanya satu data pada daerah sehingga perhitungan kebutuhan terkadang memakai pendekatan yang berubah-ubah

Solusi:

1. Dilakukan perhitungan pada setiap project yang ada pada kampung tersebut
2. Kordinasi dengan pihak terkait
3. Selalu berkordinasi dengan dinas2 terkait mengenai penyamaan pandangan dan data

c. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Permasalahan:

1. Dokumen Perencanaan / DED sebagian hasil produk tahun-tahun sebelumnya, sehingga perlu di lakukan update harga dan dinamika lapangan
2. Masih ditemukan pelaksanaan kegiatan yang tidak mengacu pada Konsep pengembangan yang ada pada Rencana Induk SPAM yang dimiliki
3. Kurang / terbatasnya anggaran yang dapat disediakan oleh Pemerintah dalam rangka Revitalisasi Dan Pembangunan Baru
4. jumlah penganggaran dengan realisasi yang dibutuhkan sangat besar sehingga kenaikan capaian sangat sedikit

Solusi:

1. Untuk daerah yang dednya sudah melewati bertahun-tahun akan di lakukan review atau perencanaan ulang



2. Di sinkronkan pekerjaan dengan renja dan rispm yang ada
3. Kordinasi dengan pihak terkait
4. Kordinasi dengan pihak terkait dan biasanya dilakukan pembangunan secara bertahap

d. PELAKSANAAN

Permasalahan:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelola dan memelihara Sarana dan Prasarana yang ada, sehingga terkadang perlu dilakukan perbaikan dan penggantian terhadap sarana dan prasarana tersebut, hal ini yang menyebabkan angka capaian tidak terlalu besar naiknya,
2. pada bidang DPUPR belum terlaksananya kegiatan sampai pada bulan juli sehingga realisasi dirasa akan ada pada triwulan 3 atau 4
3. perlu dilakukan percepatan program agar bisa memenuhi pelaporan triwulan 1 2 dan 3 dikarenakan sifat pekerjaan PUPR yang akan selesai pada triwulan 4

Solusi:

1. Dilakukan sosialisasi dan kordinasi pada setiap kegiatan yang dilaksanakan di lokasi tersebut
2. Percepatan program dan proses tender diperlukan dengan berkoordinasi dengan pihak - pihak terkait dan sesuai dengan aturan yang berlaku
3. Pelaporan sesuai data yang di dapat secara real

e. LAIN – LAIN

Permasalahan:

1. Lemahnya Pendataan dan updating nilai cakupan pelayanan Air Minum dan Limbah Domestik, yang berdampak pada akurasi nilai capaian yang diperoleh,
2. Terbatasnya jumlah dan kualitas SDM pada instansi pada tahap perencanaan dan pengawasan serta pendampingan pasca kontruksi,
3. ada perbedaan sistem pelaporan antara kemendagri dan pendekatan dari kemenPUPR



Solusi:

1. Selalu berkordinasi dan pengupdatetan data sesuai data-data yang masuk pada setiap tahunnya
2. Akan dilakukan kegiatan sosialisasi dan pendampingan pada awal kegiatan dan akhir kegiatan agar kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan capaiannya
3. Membuat data untuk kedua pendekatan agar tetap bisa saling bersinergi dan saling berkordinasi

4.4 Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimum Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Yaitu :

- a) Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni
- b) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni

4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Table IV.17

Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA
01.00	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		
Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form Tahapan Penerapan)			



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		0 (tidak terjadi bencana)
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	1. Pendataan	Persen	100%
	2. Perhitungan	Persen	100%
	3. Perencanaan	Persen	100%
	UPLOAD FILE PENDUKUNG		
02.00	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		5
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	1. Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumah	5
	a. Penilaian oleh tim penaksir (appraisal);	Rumah	0
	b. Proses sosialisasi kepada masyarakat; dan	Rumah	5
	c. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Rumah	0
	2. Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	Rumah	0

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Berau 2024



4.4.3 Realisasi

Table IV.18

Realisasi

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
			-4	-5	-6	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100.00 %
01.00	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100.00 %
Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form Tahapan Penerapan)						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		0	0	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1. Pendataan	Persen	100%	100%	100%	100%
	2. Perhitungan	Persen	100%	100%	100%	100%
	3. Perencanaa	Persen	100%	100%	100%	100%
UPLOAD FILE PENDUKUNG						
02.00	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80.00 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		5	5	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1. Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumah	5	5	0	100.00 %
	a. Penilaian oleh tim penaksir (appraisal);	Rumah	0	0	0	
	b. Proses sosialisasi kepada masyarakat; dan	Rumah	5	5	0	100.00 %
	c. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Rumah	0	0	0	
	2. Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	Rumah	0	0	0	100.00 %

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Berau 2024

4.4.4 Alokasi Anggaran

a. Anggaran Dasar

Table IV.19
Anggaran dasar

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KAB. BERAU	6,999,194,000,000
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	0
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	303,270,000
	APBD	303,270,000
	A. APBD MURNI	303,270,000



NO	PENDANAAN	PAGU
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Berau 2024

b. Rincian Kegiatan

Table IV.20
Rincian kegiatan

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN	REALISASI	SERAPAN
	KAB. BERAU				303,270,000	296,416,046	97.74 %
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				303,270,000	296,416,046	97.74 %
	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			303,270,000	296,416,046	97.74 %
		1	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	303,270,000	296,416,046	97.74 %

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Berau 2024



4.4.5 Dukungan Personil

Secara umum sumber daya manusia yang merupakan dukungan personil pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Berau sebagai berikut.

Table IV.21

Dukungan Personil

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PEGAWAI	LK	PR	JFT	PENDIDIKAN						
						SD/ SMP	SMA	DI/ DII	DIII	DIV/ S1	S2	S3
1	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	33	20	13	8	-	113	-	-	16	4	-

Table IV.22

Dukungan Tenaga PPPK

NAMA PERANGKAT DAERAH	PPPK		
	LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PPPK
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2	7	9

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Berau 2024

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

a. PENGUMPULAN DATA

Permasalahan:

Pendataan dilakukan secara bertahap mengingat jangkauan dan biaya yang tersedia

Solusi:

Dilakukan Perencanaan pendataan secara bertahap pada Dokumen Perencanaan Daerah

b. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN

Permasalahan:



perhitungan kebutuhan dilaksanakan setelah pengumpulan data terlaksana dan secara bertahap

Solusi:

Memastikan perhitungan kebutuhan dapat segera dilaksanakan dan dipastikan tetap dimasukkan dalam dokumen perencanaan Daerah

c. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Permasalahan:

Biaya yang diperlukan direncanakan secara bertahap sesuai rencana aksi dengan target yang bertahap

Solusi:

Dilakukan Perencanaan pendataan secara bertahap pada Dokumen Perencanaan Daerah

d. PELAKSANAAN

Permasalahan:

Pelaksanaan masih berproses untuk pembangunan kembali dan masih terkendala dengan cuaca

Solusi

Pengawasan dan monitoring secara berkala untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan rencana

e. LAIN – LAIN

4.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan **Satpol PP**

a) Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum (Sub Trantibum)

Jenis Pelayanan Dasar SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan BPBD



- b) Pelayanan informasi rawan bencana dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (Sub Kebencanaan)
- c) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Sub Kebencanaan)
- d) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (Sub Kebencanaan)
- e) Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran (Sub Pemadam Kebakaran)

4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target Pelayanan Dasar SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Table IV.23

Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM		
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM)		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		
			Jumlah Total
			Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	10
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)		
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		
	1. Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)	Unit	29
	2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada* (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Dokumen	7
	Data Dukung : 6403-202407291153067 SOP.pdf Status : Approved		
	3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	Orang	50
	4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	Dokumen	1
	Data Dukung : 6403-20250115024843SOP PELAYANAN GANTI RUGI MATERIL STEMP.pdf Status : Approved		
	5. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	Orang	0
	6. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	Orang	10
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN		
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		
			Jumlah Total
			Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	11064
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)		
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		
	1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	Dokumen	1



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output
	(tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)		
	Data Dukung : 6403-2024071908485101_BAHAYA_BANJIR_KABUPATEN_BERAU.jpg Status : Approved		
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	Orang	11064
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	Orang	11064
	4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Unit	36
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		
			Jumlah Total
			Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	11064
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)		
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	Unit	14
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang	25
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)		
	Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		
			Jumlah Total
			Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	11064
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)		
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		
	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	Posko	12
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Orang	11064



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output
	3 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokumen	1
	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (respon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	Layanan	1
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	Layanan	3
KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR			
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)		
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			
			Jumlah Total
			Yang Harus Dilayani
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		Orang	3200
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)			
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI			
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	Layanan	12
	2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	Dokumen	3
Data Dukung : 6403-20240718081639SOP KEBAKARAN , PENYELAMATAN dan EVAKUASI_compressed (1).pdf Status : Approved			
	3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	Unit	21
	4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang	10
	5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	Layanan	28
	6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	Layanan	28

Sumber: Satpol PP dan BPBD Kab. Berau 2024



4.5.3 Realisasi

Table IV.24

Realisasi Pelayanan Dasar SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output		Total Pencapaian
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM				100.00 %
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM)				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80.00 %
			Jumlah Total	Jumlah Total	
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	10	10	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI				100.00 %
	1. Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)	Unit	29	29	100.00 %
	2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada* (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Dokumen	7	7	100.00 %
	Data Dukung : 6403-202407291153067 SOP.pdf Status : Approved				
	3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM***	Orang	50	50	100.00 %



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output		Total Pencapaian
	(Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)				
	4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	Dokumen	1	1	100.00 %
	Data Dukung : 6403-20250115024843SOP PELAYANAN GANTI RUGI MATERIL STEMP.pdf Status : Approved				
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	Orang	0	0	100.00 %
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	Orang	10	10	100.00 %
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN				100.00 %
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80.00 %
			Jumlah Total	Jumlah Total	
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	11064	11064	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI				100.00 %
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	Dokumen	1	1	100.00 %



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output		Total Pencapaian
	(tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)				
	Data Dukung : 6403-2024071908485101_BAHAYA_BANJIR_KABUPATEN_BERAU.jpg Status : Approved				
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana`	Orang	11064	11064	100.00 %
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	Orang	11064	11064	100.00 %
	4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Unit	36	36	100.00 %
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80.00 %
			Jumlah Total	Jumlah Total	
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	11064	11064	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI				100.00 %
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	Unit	14	14	100.00 %
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang	25	25	100.00 %
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)				100.00 %
	Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)				
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80.00 %
			Jumlah Total	Jumlah Total	



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output		Total Pencapaian
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	11064	11064	100.00 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI				100.00 %
	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pUSDalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	Posko	12	12	100.00 %
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Orang	11064	11064	100.00 %
	3 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokumen	1	1	100.00 %
	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (respon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	Layanan	1	1	100.00 %
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	Layanan	3	3	100.00 %
KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR					100.00 %
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)				100.00 %
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	3200	3200	100.00 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output		Total Pencapaian
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI				100.00 %
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	Layanan	12	12	100.00 %
	2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	Dokumen	3	3	100.00 %
Data Dukung : 6403-20240718081639SOP KEBAKARAN , PENYELAMATAN dan EVAKUASI_compressed (1).pdf Status : Approved					
	3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	Unit	21	21	100.00 %
	4 . Kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparaturnya SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang	10	10	100.00 %
	5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	Layanan	28	28	100.00 %
	6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	Layanan	28	28	100.00 %

Sumber: Satpol PP dan BPBD Kab. Berau 2024



4.5.4 Alokasi Anggaran

a. Anggaran dasar

Table IV.25
Anggaran Dasar

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KAB. BERAU	6,999,194,000,000
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	78,044,072,504
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	14,508,622,850
	APBD	14,508,622,850
	A. APBD MURNI	3,941,383,800
	B. APBD DAU	10,567,239,050
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Berau dan BPBD Kab. Berau 2024

b. Rincian Kegiatan

Table IV.26
Rincian Kegiatan

No	PR OG RA M	KE GIA TA N	SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARA N	REALISASI	SERA PAN
1			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)		541,803,400	480,849,673	88.75 %



No	PR OG RA M	KE GIA TA N	SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARA N	REALISASI	SERA PAN
	1		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		541,803,400	480,849,673	88.75 %
		3	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	442,000,000	421,116,060	95.28 %
		7	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Laporan	99,803,400	59,733,613	59.85 %
	JUMLAH INDIKATOR				541,803,400	480,849,673	88.75 %
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)				6,513,948,600	5,963,712,618	91.55 %
	4	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota K2023456			899,727,000	845,246,320	93.94 %
		1	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	500,000,000	474,521,777	94.90 %
		2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Orang	399,727,000	370,724,543	92.74 %
	JUMLAH INDIKATOR				899,727,000	845,246,320	93.94 %
	5	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana K20240401115443			2,809,506,900	2,675,311,896	95.22 %
		2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	Orang	315,000,000	300,747,161	95.48 %
		3	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1,082,253,500	1,036,908,787	95.81 %
		16	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kawasan	315,000,000	300,747,161	95.48 %
		17	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Laporan	1,082,253,500	1,036,908,787	95.81 %
	6	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana K2023445			2,411,305,200	2,201,805,640	91.31 %
		2	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	927,036,100	910,974,898	98.27 %



No	PR OG RA M	KE GIA TA N	SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARA N	REALISASI	SERA PAN
		3	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	749,509,100	727,869,579	97.11 %
		6	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	64,760,000	64,760,000	100.00 %
		8	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan	650,000,000	498,201,163	76.65 %
	7		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana K2023446		393,409,500	241,348,762	61.35 %
		1	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	75,000,000	35,709,108	47.61 %
		3	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	148,649,500	51,206,400	34.45 %
		10	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Dokumen	169,760,000	154,433,254	90.97 %
3			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)		11,322,239,050	11,093,137,294	97.98 %
	8		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota K2023449		10,759,909,050	10,620,683,435	98.71 %
		1	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	10,149,299,050	10,075,884,716	99.28 %
		2	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	610,610,000	544,798,719	89.22 %
	9		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran K2023450		74,760,000	41,752,000	55.85 %
		1	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen	34,880,000	18,727,000	53.69 %
		2	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen	39,880,000	23,025,000	57.74 %
	10		Investigasi Kejadian Kebakaran K2023451		10,000,000	5,536,250	55.36 %
		1	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Dokumen	10,000,000	5,536,250	55.36 %



No	PR OG RA M	KE GIA TA N	SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARA N	REALISASI	SERA PAN
	11		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran K2023459		477,570,000	425,165,609	89.03 %
		1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang	250,000,000	232,666,705	93.07 %
		2	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Desa	227,570,000	192,498,904	84.59 %

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Berau dan BPBD Kab. Berau 2024

4.5.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Urusan ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Berau dapat dilihat pada tabel berikut:

Table IV.27
Dukungan Personil

N O	NAMA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PEGAWA I	L K	P R	JF T	PENDIDIKAN						
						SD/ SM P	SM A	DI/ DI I	DII I	DIV /S1	S 2	S 3
1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	46	45	1		2	21	-	1	21	1	-
2	BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH	41	39	2	6	2	22	-	2	10	5	-

N O	NAMA PERANGKAT DAERAH	PPPK		
		LAKILAKI	PEREMPUA N	JUMLAH PPPK
1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	-



2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2	-	2
---	-------------------------------------	---	---	---

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Berau dan BPBD Kab. Berau 2024

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

a. PENGUMPULAN DATA

Permasalahan:

Masih adanya perbedaan pemahaman konsep penerapan SPM di Bidang Bidang sebagai sumber data penerapan dan realisasi SPM

Solusi:

Mengadakan rapat untuk menyamakan persepsi terhadap penerapan SPM bid Trantibum

b. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN

Permasalahan:

1. Diperlukan adanya pendataan ulang terhadap WN yang menjadi sasaran
2. Data penduduk dari sumber Dinas Capil dan Kependudukan belum bisa diakses secara detail (data by name dan by address)
3. Kekurangan keahlian / SDM dalam pencatatan dan perhitungan jumlah yang menjadi target sasaran dalam pemenuhan data SPM

Solusi:

Bekerja sama dengan RT dan Disdukcapil dalam memvalidasi data penduduk yang rawan akan dampak penegakan perda dan perbup

c. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Permasalahan:

Ada beberapa Kegiatan / Sub Kegiatan yang belum tercantum dalam Renstra BPBD sehingga berpengaruh terhadap anggaran yang diperlukan dalam penerapan SPM

Solusi:

Mengusulkan pada Anggaran Tahun Berikutnya



d. PELAKSANAAN

Permasalahan:

Masih adanya beberapa kegiatan yang mendukung pelaksanaan SPM, namun belum terdokumentasikan dengan baik dan juga adanya perbedaan persepsi dalam memahami tentang jenis layanan / mutu layanan SPM

Solusi:

Akan mendokumentasikan dengan baik terkait pelayanan yang SPM bidang Trantibum

e. LAIN - LAIN

4.6 Urusan Sosial

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar SPM urusan Sosial adalah :

- a) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti
- b) Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti dengan indikator pencapaian Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti
- c) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti
- d) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti
- e) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota dengan indikator pencapaian Jumlah



Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial

4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Table IV.28

Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total
			Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	44
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	44
	layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial		
	2 . Penyediaan permakanan	Orang	8
	(layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)		
	3 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	11
	(merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada disabilitas terlantar)		



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output
	4 . Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	8
	5 . Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	34
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	10
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	44
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	44
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	10
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	2
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	9



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	7
	13 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	11
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	348
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	1 . Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada anak terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	348
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar)	Orang	336
	3 . Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	348
	4 . Penyediaan sandang	Orang	348



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output
	(berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)		
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	348
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	348
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	348
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	336
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	16
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	348
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	336
	12 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	3



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total
			Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1000
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	1000
	layanan data yang diberikan kepada lanjut usia terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial		
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	997
	(merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar)		
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	1000
	(layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)		
	4 . Penyediaan sandang	Orang	15
	(berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)		
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	1
	(kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)		
	6 . Penyediaan persediaan kesehatan	Orang	998



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output
	(obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)		
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	1000
	bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)		
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	Orang	1000
	(pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)		
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	1000
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	996
	(fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)		
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	1000
	(pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk tujuan reunifikasi)		
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	999
	(pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)		
	13 . Layanan rujukan	Orang	5
	(layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)		
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total
			Yang Harus Dilayani



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	8
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	8
	layanan data yang diberikan kepada tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial		
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	2
	layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis		
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	3
	(layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)		
	4 . Penyediaan sandang	Orang	3
	(berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)		
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	3
	(obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)		
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	3
	bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan		



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output
	psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)		
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	7
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	2
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	2
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	Orang	1
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	2
	12 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	1
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total
			Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	270
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	1 . Penyediaan permakanan (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	Orang	270
	2 . Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	193
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	Unit	2
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	Orang	5
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)	Orang	6

Sumber: Dinas Sosial Kab. Berau 2024



4.6.3 Realisasi

Table IV.29

Realisasi

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SAT UAN	Indikator Pencapaian / Output		Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM				100.00 %
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Oran g	44	44	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Oran g	44	44	100.00 %
	2 . Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Oran g	8	8	100.00 %
	3 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada disabilitas terlantar)	Oran g	11	11	100.00 %
	4 . Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Oran g	8	8	100.00 %
	5 . Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Oran g	34	34	100.00 %
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Oran g	10	10	100.00 %
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial		44	44	100.00 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SAT UAN	Indikator Pencapaian / Output		Total Pencapaian
	bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Oran g			
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Oran g	44	44	100.00 %
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Oran g	10	10	100.00 %
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Oran g	2	2	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Oran g	9	9	100.00 %
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Oran g	7	7	100.00 %
	13 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Oran g	11	11	100.00 %
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	80.00 %
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Oran g	348	348	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada anak terlantar untuk diuskan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Oran g	348	348	100.00 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output		Total Pencapaian
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar)	Orang	336	336	100.00 %
	3 . Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	348	348	100.00 %
	4 . Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	348	348	100.00 %
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	348	348	100.00 %
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	348	348	100.00 %
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	348	348	100.00 %
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	336	336	100.00 %
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	16	16	100.00 %
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	348	348	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	336	336	100.00 %
	12 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	3	3	100.00 %
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	80.00 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SAT UAN	Indikator Pencapaian / Output		Total Pencapaian
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Oran g	1000	1000	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada lanjut usia terlanjar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Oran g	1000	1000	100.00 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlanjar)	Oran g	997	997	100.00 %
	3 . Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Oran g	1000	1000	100.00 %
	4 . Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Oran g	15	15	100.00 %
	5 . Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Oran g	1	1	100.00 %
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Oran g	998	998	100.00 %
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Oran g	1000	1000	100.00 %
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlanjar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlanjar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di	Oran g	1000	1000	100.00 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SAT UAN	Indikator Pencapaian / Output		Total Pencapaian
	Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)				
	9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Oran g	1000	1000	100.00 %
	10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Oran g	996	996	100.00 %
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Oran g	1000	1000	100.00 %
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Oran g	999	999	100.00 %
	13. Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Oran g	5	5	100.00 %
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	80.00 %
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Oran g	8	8	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1. Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Oran g	8	8	100.00 %
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis	Oran g	2	2	100.00 %
	3. Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Oran g	3	3	100.00 %
	4. Penyediaan sandang		3	3	100.00 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SAT UAN	Indikator Pencapaian / Output		Total Pencapaian
	(berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Oran g			
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Oran g	3	3	100.00 %
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Oran g	3	3	100.00 %
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Oran g	7	7	100.00 %
	8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Oran g	2	2	100.00 %
	9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Oran g	2	2	100.00 %
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	Oran g	1	1	100.00 %
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Oran g	2	2	100.00 %
	12. Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Oran g	1	1	100.00 %
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Oran g	270	270	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus	Jumlah Mutu Yang Terlayani	100.00 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SAT UAN	Indikator Pencapaian / Output		Total Pencapaian
			Dilayani / Dipenuhi	/ Terpenuhi	
	1 . Penyediaan permakanaan (penyediaan permakanaan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	Oran g	270	270	100.00 %
	2 . Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Oran g	193	193	100.00 %
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	Unit	2	2	100.00 %
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	Oran g	5	5	100.00 %
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)	Oran g	6	6	100.00 %

Sumber: Dinas Sosial Kab. Berau 2024

4.6.4 Alokasi Anggaran

a. Anggaran Dasar

Table IV.30
Anggaran Dasar

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KAB. BERAU	6,999,194,000,000
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	21,520,152,288
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	8,476,383,833
	APBD	8,476,383,833
	A. APBD MURNI	8,476,383,833
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0



NO	PENDANAAN	PAGU
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

Sumber: Dinas Sosial Kab. Berau 2024

b. Rincian Kegiatan

Table IV.31
Rincian Kegiatan

No	PR OG RA M	KE GI AT AN	SUB KEGIATAN	SATUA N	ANGGARAN	REALISASI	SERAP AN
1			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		8,476,383,833	8,144,877,925	96.09 %
	1		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial K2023152		8,121,490,283	7,942,594,425	97.80 %
		1	Penyediaan permakanan	Orang	5,500,000,000	5,500,000,000	100.00 %
		2	Penyediaan sandang	Orang	124,980,000	101,048,000	80.85 %
		3	Penyediaan alat bantu	Orang	172,281,000	138,540,000	80.42 %
		4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	179,999,800	174,519,285	96.96 %
		5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	261,322,000	222,453,300	85.13 %
		6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang	1,239,714,000	1,233,865,497	99.53 %
		9	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang	200,000,000	157,700,628	78.85 %
		10	Pemberian layanan kedaruratan	Orang	283,193,683	264,019,996	93.23 %
		12	Pemberian layanan rujukan	Dokumen	159,999,800	150,447,719	94.03 %



No	PR OG RA M	KE GI AT AN	SUB KEGIATAN	SATUA N	ANGGARAN	REALISASI	SERAP AN
	2		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota K2023153		354,893,550	202,283,500	57.00 %
		1	Penyediaan makanan	Orang	74,996,750	74,482,500	99.31 %
		2	Penyediaan sandang	Orang	74,912,000	74,462,000	99.40 %
		3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	69,989,800	12,747,000	18.21 %
		4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	74,995,000	25,117,000	33.49 %
		5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	60,000,000	15,475,000	25.79 %

Sumber: Dinas Sosial Kab. Berau 2024

4.6.5 Dukungan Personil

Table IV.32

Dukungan Personil

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PEGAWAI	LK	PR	JFT	PENDIDIKAN						
						SD/ SMP	SMA	DI/ DII	DIII	DIV/ S1	S2	S3
1	DINAS SOSIAL	28	14	14	8	-	4	-	2	15	7	-

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	PPPK		
		LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PPPK
1	DINAS SOSIAL	-	-	-

Sumber: Dinas Sosial Kab. Berau 2024

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

a. PENGUMPULAN DATA

Permasalahan:



Data yang akan diinput pada aplikasi SPM bersumber dari Bidang terkait yang melaksanakan SPM, sehingga memerlukan waktu dan SDM yang kompeten dalam pengumpulan data yang akurat.

Solusi:

Memaksimalkan potensi SDM yang ada guna terhimpunnya data yang akurat.

b. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN

Permasalahan:

1. Ada beberapa kebutuhan klien yang tidak dapat dihitung secara pasti, seperti penyediaan layanan Adminduk, Alat bantu lansia, Rujukan, karena layanan itu belum tentu dibutuhkan oleh semua klien yg terdata.
2. Adanya target yang tidak dapat ditentukan jumlah besarnya secara pasti khususnya pada Gepeng dan Korban Pasca Bencana, karena kejadiannya di tahun depan tidak diketahui, bisa lebih besar atau lebih kecil dari tahun lalu atau tidak ada kejadiannya.
3. Masih diperlukan peningkatan kecermatan pada bidang yang melaksanakan perhitungan kebutuhan SPM bidang sosial ini.

Solusi:

Mengusulkan Anggaran Tambahan (ABT) pada anggaran yang targetnya telah tercapai sebelum triwulan IV

c. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Permasalahan:

1. Anggaran Permakanan masih tergabung di rekening kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat. yang berupa Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu.
2. Adanya beberapa mutu layanan yang tidak teranggarkan al : Fasilitas Adminduk, Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan, dan Layanan



Penelusuran Keluarga. Hal ini disebabkan karena rekening tersebut pada saat itu belum muncul di Aplikasi SIPD.

Solusi:

1. Menyusun rencana kebutuhan anggaran SPM sesuai dengan mutu layanan SPM yang telah ditetapkan kemensos yang dituangkan dalam renja dinas social tahun berikutnya.
2. Melakukan rapat internal dengan pemegang program untuk mempedomani juknis penyusunan anggaran SPM

d. PELAKSANAAN

Permasalahan:

1. Pelaksanaan pemberian mutu layanan pada klien berdasarkan hasil asesment peksos, sehingga tidak semua mutu layanan diberikan pada klien sebagaimana yang telah ditargetkan.
2. Target yang telah ditetapkan pada perencanaan awal dapat berubah dikarenakan ada yang meninggal, pindah keluar daerah

Solusi:

Optimalisasi pemegang program SPM Dinas Sosial dalam melaksanakan kegiatannya.

e. LAIN – LAIN



4. 7. Program dan Kegiatan

Table IV.33

Program dan kegiatan percepatan penerapan SPM

No	PROG RAM	KEGIA TAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN	REALISASI	SERAPA N
URUSAN PENDIDIKAN							
1			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		255,150,694,994	235,695,419,70 7	92.37 %
	1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		99,229,656,672	93,818,789,977	94.55 %
		1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	4,387,823,399	4,023,299,858	91.69 %
		5	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	13,527,164,682	13,249,887,036	97.95 %
		6	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	1,549,931,780	1,497,092,000	96.59 %
		10	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	579,376,980	493,776,000	85.23 %
		11	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	11,477,550,800	11,410,174,854	99.41 %
		15	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Peserta didik	4,171,000,000	3,747,062,000	89.84 %
		16	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	425,636,000	402,668,360	94.60 %
		17	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta didik	250,000,000	177,375,500	70.95 %
		18	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	15,000,000	14,984,600	99.90 %
		19	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	917,998,600	665,106,863	72.45 %



No	PROG RAM	KEGIA TAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN	REALISASI	SERAPAN
URUSAN PENDIDIKAN							
		20	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	175,000,000	80,106,360	45.78 %
		21	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Satuan Pendidikan	34,886,282,093	33,573,061,046	96.24 %
		22	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang	1,350,000,000	1,066,239,199	78.98 %
		27	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	100,000,000	93,684,000	93.68 %
		28	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	90,089,700	83,579,700	92.77 %
		29	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	150,000,000	117,634,000	78.42 %
		30	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	187,000,000	185,950,000	99.44 %
		31	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	75,000,000	61,718,000	82.29 %
		32	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas	50,000,000	37,961,000	75.92 %
		34	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	200,000,000	168,309,407	84.15 %
		36	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	100,000,000	92,000,000	92.00 %
		37	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	100,000,000	93,450,000	93.45 %
		38	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	14,209,816,139	12,963,029,946	91.23 %
		40	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	400,000,000	336,654,899	84.16 %



No	PROG RAM	KEGIA TAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN	REALISASI	SERAPAN	
URUSAN PENDIDIKAN								
		41	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	599,999,900	365,870,900	60.98 %	
		42	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	9,254,986,599	8,818,114,449	95.28 %	
	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama K20240327110647				117,338,220,962	109,696,228,128	93.49 %
		1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	2,244,994,452	1,760,437,069	78.42 %	
		2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	1,451,925,000	1,181,925,188	81.40 %	
		3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	1,128,000,000	1,000,062,440	88.66 %	
		4	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	1,124,999,902	1,106,055,798	98.32 %	
		5	Pembangunan Laboratorium	Ruang	3,481,820,654	3,049,657,650	87.59 %	
		8	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	749,998,760	547,952,103	73.06 %	
		11	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	9,999,999,775	9,724,919,164	97.25 %	
		12	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	8,789,999,630	8,274,467,232	94.14 %	
		15	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Ruang	449,999,003	409,429,009	90.98 %	
		17	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	674,998,975	565,538,794	83.78 %	
		21	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	20,049,999,410	19,871,384,029	99.11 %	
		23	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	7,300,613,500	7,217,444,125	98.86 %	
		25	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta didik	20,049,999,410	19,871,384,029	99.11 %	



No	PROG RAM	KEGIA TAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN	REALISASI	SERAPAN
URUSAN PENDIDIKAN							
		27	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	398,475,000	381,600,000	95.77 %
		28	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta didik	403,540,000	287,082,471	71.14 %
		29	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	30,000,000	25,350,042	84.50 %
		30	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	920,879,600	539,814,497	58.62 %
		31	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	845,880,000	592,308,123	70.02 %
		32	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Satuan Pendidikan	16,373,952,530	15,736,329,472	96.11 %
		33	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang	899,999,500	602,829,123	66.98 %
		38	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	150,000,000	125,152,892	83.44 %
		39	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	149,999,400	102,439,400	68.29 %
		40	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	150,000,000	126,320,042	84.21 %
		41	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	221,147,000	206,709,000	93.47 %
		43	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas	150,000,000	120,940,000	80.63 %
		44	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	400,000,000	349,502,288	87.38 %



No	PROG RAM	KEGIA TAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN	REALISASI	SERAPA N	
URUSAN PENDIDIKAN								
		47	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	626,999,600	407,582,447	65.01 %	
		48	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	17,519,999,861	15,062,418,521	85.97 %	
		49	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	100,000,000	59,734,680	59.73 %	
		50	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	100,000,000	95,118,500	95.12 %	
		51	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	300,000,000	294,340,000	98.11 %	
	3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				33,297,017,398	28,937,062,920	86.91 %
		1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit	4,486,069,940	4,194,436,200	93.50 %	
		2	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Unit	916,413,800	878,241,000	95.83 %	
		4	Pengadaan Mebel PAUD	Paket	446,260,000	337,427,000	75.61 %	
		6	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Paket	2,081,374,000	1,988,683,740	95.55 %	
		7	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Peserta didik	5,579,309,307	3,774,698,207	67.66 %	
		8	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Paket	380,000,000	370,867,600	97.60 %	
		9	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Peserta didik	8,094,997,000	7,770,801,690	96.00 %	
		10	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Orang	35,000,000	32,098,624	91.71 %	
		11	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Orang	813,000,000	437,861,363	53.86 %	



No	PROG RAM	KEGIA TAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN	REALISASI	SERAPA N	
URUSAN PENDIDIKAN								
		12	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidikan	674,999,500	477,598,460	70.76 %	
		13	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Satuan Pendidikan	5,209,599,331	4,605,254,878	88.40 %	
		14	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang	400,000,000	304,751,693	76.19 %	
		19	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	45,000,000	1,800,000	4.00 %	
		20	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	235,000,000	159,709,780	67.96 %	
		21	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	35,000,000	4,800,000	13.71 %	
		23	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas	25,000,000	20,237,000	80.95 %	
		28	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Peserta didik	100,000,000	78,242,000	78.24 %	
		29	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	50,000,000	49,340,000	98.68 %	
		31	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	50,000,000	38,242,000	76.48 %	
		33	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	50,000,000	37,583,800	75.17 %	
		34	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	2,499,998,760	2,307,224,285	92.29 %	
		35	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	1,089,995,760	1,067,163,600	97.91 %	
	4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				5,285,799,962	3,243,338,682	61.36 %
		3	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Paket	49,999,650	31,499,000	63.00 %	



No	PROG RAM	KEGIA TAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN	REALISASI	SERAPA N
URUSAN PENDIDIKAN							
		5	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	320,000,000	278,167,680	86.93 %
		6	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan	199,999,800	170,937,748	85.47 %
		7	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan	1,970,002,112	1,590,979,810	80.76 %
		8	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Orang	225,200,000	193,630,731	85.98 %
		11	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	30,000,000	22,452,200	74.84 %
		12	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	30,000,000	21,416,100	71.39 %
		13	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	30,000,000	19,096,500	63.66 %
		14	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	75,000,000	29,910,000	39.88 %
		15	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	50,000,000	38,726,713	77.45 %
		16	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas	5,000,000	3,409,000	68.18 %
		17	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	10,000,000	9,290,000	92.90 %
		22	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	50,000,000	48,199,000	96.40 %
		23	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	100,000,000	82,067,400	82.07 %
		28	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	30,000,000	17,630,000	58.77 %



No	PROG RAM	KEGIA TAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN	REALISASI	SERAPAN	
URUSAN PENDIDIKAN								
		32	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Peserta didik	1,960,598,400	685,926,800	34.99 %	
URUSAN KESEHATAN								
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				5,443,726,800	4,647,201,983	85.37 %	
	1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				5,443,726,800	4,647,201,983	85.37 %
		1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Orang	1,369,380,000	964,054,901	70.40 %	
		2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Orang	986,000,000	790,704,340	80.19 %	
		3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	248,565,100	213,112,714	85.74 %	
		4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Orang	568,468,000	548,160,460	96.43 %	
		5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	190,000,000	173,698,041	91.42 %	
		6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Orang	100,000,000	68,361,055	68.36 %	
		7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	272,370,200	269,005,655	98.76 %	
		8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang	50,000,000	43,730,000	87.46 %	
		9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Orang	457,934,900	443,292,000	96.80 %	
		10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	180,000,000	169,401,130	94.11 %	
		11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	891,010,600	853,993,687	95.85 %	
		12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang	129,998,000	109,688,000	84.38 %	
URUSAN PEKERJAAN UMUM								



No	PROG RAM	KEGIA TAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN	REALISASI	SERAPA N	
URUSAN PENDIDIKAN								
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				213,763,577,782	208,488,297,735	97.53 %	
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				213,763,577,782	208,488,297,735	97.53 %
		23	Peningkatan KapasitasKelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Lembaga	471,000,000	290,797,082	61.74 %	
		25	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dokumen	1,300,000,000	835,905,700	64.30 %	
		28	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	96,246,967,782	94,616,076,236	98.31 %	
		29	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Unit	9,474,250,000	9,085,416,220	95.90 %	
		32	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	106,271,360,000	103,660,102,497	97.54 %	
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				8,756,000,000	8,427,821,294	96.25 %	
	2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota				8,756,000,000	8,427,821,294	96.25 %
URUSAN PERUMAHAN RAKYAT								
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				303,270,000	296,416,046	97.74 %	
	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				303,270,000	296,416,046	97.74 %
		1	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	303,270,000	296,416,046	97.74 %	
URUSAN TRANTIBUMLINMAS								
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)				541,803,400	480,849,673	88.75 %	



No	PROG RAM	KEGIA TAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN	REALISASI	SERAPAN	
URUSAN PENDIDIKAN								
	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				541,803,400	480,849,673	88.75 %
		3	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bermuansa Hak Asasi Manusia	Orang	442,000,000	421,116,060	95.28 %	
		7	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Laporan	99,803,400	59,733,613	59.85 %	
	JUMLAH INDIKATOR					541,803,400	480,849,673	88.75 %
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)				6,513,948,600	5,963,712,618	91.55 %	
	4	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota K2023456				899,727,000	845,246,320	93.94 %
		1	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	500,000,000	474,521,777	94.90 %	
		2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Orang	399,727,000	370,724,543	92.74 %	
	JUMLAH INDIKATOR					899,727,000	845,246,320	93.94 %
	5	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana K20240401115443				2,809,506,900	2,675,311,896	95.22 %
		2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	Orang	315,000,000	300,747,161	95.48 %	
		3	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1,082,253,500	1,036,908,787	95.81 %	
		16	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kawasan	315,000,000	300,747,161	95.48 %	



No	PROG RAM	KEGIA TAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN	REALISASI	SERAPAN	
URUSAN PENDIDIKAN								
		17	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Laporan	1,082,253,500	1,036,908,787	95.81 %	
	6	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana K2023445				2,411,305,200	2,201,805,640	91.31 %
		2	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	927,036,100	910,974,898	98.27 %	
		3	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	749,509,100	727,869,579	97.11 %	
		6	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	64,760,000	64,760,000	100.00 %	
		8	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan	650,000,000	498,201,163	76.65 %	
	7	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana K2023446				393,409,500	241,348,762	61.35 %
		1	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	75,000,000	35,709,108	47.61 %	
		3	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	148,649,500	51,206,400	34.45 %	
		10	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Dokumen	169,760,000	154,433,254	90.97 %	
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)				11,322,239,050	11,093,137,294	97.98 %	
	8	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota K2023449				10,759,909,050	10,620,683,435	98.71 %
		1	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	10,149,299,050	10,075,884,716	99.28 %	
		2	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	610,610,000	544,798,719	89.22 %	



No	PROG RAM	KEGIA TAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN	REALISASI	SERAPA N
URUSAN PENDIDIKAN							
	9		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran K2023450		74,760,000	41,752,000	55.85 %
		1	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen	34,880,000	18,727,000	53.69 %
		2	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen	39,880,000	23,025,000	57.74 %
	10		Investigasi Kejadian Kebakaran K2023451		10,000,000	5,536,250	55.36 %
		1	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Dokumen	10,000,000	5,536,250	55.36 %
	11		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran K2023459		477,570,000	425,165,609	89.03 %
		1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang	250,000,000	232,666,705	93.07 %
		2	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Desa	227,570,000	192,498,904	84.59 %
URUSAN SOSIAL							
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				8,476,383,833	8,144,877,925	96.09 %
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial K2023152			8,121,490,283	7,942,594,425	97.80 %
		1	Penyediaan permakanan	Orang	5,500,000,000	5,500,000,000	100.00 %
		2	Penyediaan sandang	Orang	124,980,000	101,048,000	80.85 %



No	PROG RAM	KEGIA TAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN	REALISASI	SERAPA N
URUSAN PENDIDIKAN							
		3	Penyediaan alat bantu	Orang	172,281,000	138,540,000	80.42 %
		4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	179,999,800	174,519,285	96.96 %
		5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	261,322,000	222,453,300	85.13 %
		6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang	1,239,714,000	1,233,865,497	99.53 %
		9	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang	200,000,000	157,700,628	78.85 %
		10	Pemberian layanan kedaruratan	Orang	283,193,683	264,019,996	93.23 %
		12	Pemberian layanan rujukan	Dokumen	159,999,800	150,447,719	94.03 %
	2		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota K2023153		354,893,550	202,283,500	57.00 %
		1	Penyediaan makanan	Orang	74,996,750	74,482,500	99.31 %
		2	Penyediaan sandang	Orang	74,912,000	74,462,000	99.40 %
		3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	69,989,800	12,747,000	18.21 %
		4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	74,995,000	25,117,000	33.49 %
		5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	60,000,000	15,475,000	25.79 %



BAB V

P E N U T U P

Capaian Kinerja tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang dijelaskan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini sesungguhnya merupakan kinerja bersama antara eksekutif dan legislatif, karena prosedur yang berlaku sesuai dengan norma yang telah disepakati dan dijalani bersama sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau, sangat disadari bahwa masih terdapat kekurangan yang harus segera diatasi dan dibenahi bersama.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Berau disampaikan kepada kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai dasar Pemerintah melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini juga menyajikan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Nomor : 100.2.2.7/10582/OTDA Tanggal 24 Desember 2024 Perihal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024.

Sebagai Kepala Daerah, kami mencoba memenuhi komitmen moral bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai pemerintahan terdahulu akan menjadi pondasi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Berau dimasa mendatang. Tantangan terbesar Kabupaten Berau adalah menyiapkan Kabupaten Berau agar kedepannya semakin maju dan dapat memperoleh manfaat dari proses pembangunan secara berkelanjutan, terkemuka, berdaya saing dan mandiri.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Berau tahun Anggaran 2024 ini disusun sebagai gambaran tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Daerah Kabupaten



Berau, yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Akhirnya, semoga Allah SWT, senantiasa selalu memberikan petunjuk dan lindungan-Nya kepada kita sekalian, Aamiin.



**BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BERAU**